



**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021**



Drs. H. ACHMAD FIKRY, M.AP
Bupati Hulu Sungai Selatan

SYAMSURI ARSYAD, S.AP, MA
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan





BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu perangkat daerah, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan, RKP Nasional, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kebijakan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

- (3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergisme pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah dan antar sektor pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah dan efektivitas pembangunan di Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Daerah dan Nasional.
- (4) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan
 - b. Pedoman dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2021.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 untuk:

- a. Menyusun Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan
- b. Sebagai bahan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

Pasal 4

Kepala Bappelitbangda melakukan penelaahan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah mengenai kesesuaian dengan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah;
- b. Pagu dana yang tertera dalam RKPD masih bersifat indikatif;
- c. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;
- e. Kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- f. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2021 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Juli 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 15 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,



MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 34

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dapat tersusun.

Penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021 .

RKPD ini merupakan rencana pembangunan tahunan Pemerintah Daerah yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan untuk 1 (satu) tahun dan Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama untuk penyusunan dokumen ini.


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Hubungan antar Dokumen.....	5
1.4 Maksud dan Tujuan.....	6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	7
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	10
2.1 Kondisi Umum Daerah	10
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	113
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	114
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	144
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	144
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	151
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	171
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	171
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021	182
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	212
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	216
BAB VII PENUTUP	223

DAFTAR TABEL

No Tabel		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan & kelurahan Kab.Hulu Sungai Selatan	12
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Ketinggian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	13
Tabel 2.3	Temperatur (OC) Kelembaban Udara (%) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019	14
Tabel 2.4	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018.....	15
Tabel 2.5	Kawasan Budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	16
Tabel 2.6	Jumlah Bencana Alam, Korban, dan Taksiran Kerugiannya Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	25
Tabel 2.7	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	26
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	28
Tabel 2.9	Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan	28
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kab. Hulu Sungai Selatan 2019	29
Tabel 2.11	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Kostan dan Berlaku Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019	37
Tabel 2.12	Perkembangan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019.....	38
Tabel 2.13	Perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019	41
Tabel 2.14	Inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019	42
Tabel 2.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2018-2019.....	47
Tabel 2.16	Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019.....	48
Tabel 2.17	Realisasi Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019	49

Tabel 2.18	Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2015-2019	52
Tabel 2.19	Jumlah Orang Miskin Per Kecamatan Di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019	53
Tabel 2.20	Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018	53
Tabel 2.21	Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.....	56
Tabel 2.22	Pelaku Ekonomi Kreatif Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020	90
Tabel 2.23	Luas Wilayah Produktif Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.....	107
Tabel 2.24	Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019.....	107
Tabel 2.25	Realisasi Indikator Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019	108
Tabel 2.26	Perkembangan Faktor Yang Mempengaruhi Iklim berinvestasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019	111
Tabel 2.27	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019	111
Tabel 2.28	Jumlah Perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 - 2019	112
Tabel 2.29	Perkembangan Rasio Ketergantungan dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019	113
Tabel 2.31	Target Indikator Makro Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	115
Tabel 2.30	Capaian dan Target Indikator Makro RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	116
Tabel 2.32	Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian RPJMD Tahun 2019	117
Tabel 2.33	Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2019.....	120
Tabel 2.34	Portal Website Pemkab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020...	134

Tabel 3.1	Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2021	151
Tabel 3.2	Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah RKPD Tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan	152
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019	156
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019	159
Tabel 3.5	Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019.....	161
Tabel 3.6	Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2019	162
Tabel 3.7	Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	164
Tabel 3.8	Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	165
Tabel 3.9	Rata Rata Pertumbuhan Belanja Yang Mengikat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019.....	167
Tabel 3.10	Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja Yang Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	167
Tabel 3.11	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	169
Tabel 3.12	Proyeksi Anggaran Pengeluaran Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	169
Tabel 4.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	172
Tabel 4.2	Tema RKP dan Prioritas Nasional Tahun 2021	183
Tabel 4.3	Tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2021	184
Tabel 4.4	Tema Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	189
Tabel 4.5	Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Yang Mendukung Prioritas Daerah	192

Tabel 4.6	Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Yang Mendukung Prioritas Provinsi	199
Tabel 4.7	Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Yang Mendukung Prioritas Nasional	205
Tabel 5.1	Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD untuk dana Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021	213
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.....	217

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		Halaman
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan	12
Gambar 2.2	Distribusi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.....	27
Gambar 2.3	Pekerja Menurut Sektor Lapangan Usaha Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	29
Gambar 2.4	Piramida Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.....	30
Gambar 2.5	Produksi Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018	31
Gambar 2.6	Peta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Loksado	32
Gambar 2.7	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan...	35
Gambar 2.8	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2019	41
Gambar 2.9	PDRB Per Kapita Berdasarkan ADHB Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019	43
Gambar 2.10	Indeks Gini (Gini Rasio) Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019.....	45
Gambar 2.11	Jumlah Pengangguran (Orang) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019.....	50
Gambar 2.12	Tingkat Kemiskinan di Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalsel dan Nasional Tahun 2014-2019.....	51
Gambar 2.13	Peningkatan Capaian Indikator Produktifitas padi Kabupaten Hulu Sungai selatan.....	85
Gambar 2.14	Indikator Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan	85
Gambar 2.15	Capaian Indikator Jumlah Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	86
Gambar 2.16	Realisasi Indikator Nilai Tukar Petani Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	87
Gambar 3.1	Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19	149
Gambar 4.1	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kab. Hulu Sungai Selatan Th. 2021	192

DAFTAR BAGAN

No. Bagan	Halaman
Bagan 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Lampiran :

- I. HASIL EVALUASI RKPD TAHUN 2019
- II. POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
- III. USULAN MUSRENBANG KECAMATAN (DAFTAR PENDEK)
- IV. USULAN MUSRENBANG DESA (DAFTAR PANJANG)
- V. FORM 1-7
- VI. MATRIK RKPD KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021
- VII. HASIL MAPPING PEMETAAN PROGRAM, KEGIATAN RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 membagi ruang lingkup perencanaan secara sistematis dan terintegrasi. Makna terintegrasi dapat diartikan sebagai keterpaduan perencanaan pembangunan antar ruang (waktu) maupun antar level pemerintahan. Perencanaan pembangunan berdasar pada ruang lingkup waktu dapat dibedakan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka pendek kurun waktu satu tahunan. Kinerja pemerintah daerah secara akumulatif harus dapat berdampak pada kinerja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Seluruh dokumen perencanaan harus saling terintegrasi dan saling mendukung pencapaian satu sama lain. Setiap tahunnya pemerintah daerah menyusun dokumen RKPD sebagai bentuk dokumen perencanaan jangka pendek, disusun sebagai penjabaran arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun yang ada di dalam RPJMD dan sesuai dengan tema, arah kebijakan, prioritas dan sub prioritas tahunan.

RKPD berisi rencana kerja dari seluruh Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan, yang didasarkan pada tema, arah kebijakan, prioritas dan sub prioritas yang telah dirumuskan mulai pada tahapan rancangan awal RKPD.

Tata cara penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam penyusunan RKPD berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, RKPD Provinsi Kalsel Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Program Strategis Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Dalam penyusunan RKPD ini mencakup analisis gambaran umum kondisi Daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah, analisis kapasitas riil keuangan Daerah, penelaahan Renja Perangkat Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP, dan Program Strategis Nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan Prioritas Pembangunan Daerah, perumusan Rencana Kerja Program dan Pendanaan.

Dalam penelaahan permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari hasil evaluasi dan pengendalian atas kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta sinergitas antar sektor dan antar wilayah serta penjangkaran aspirasi yang mengemuka sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari desa/kelurahan hingga kabupaten.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini berlandaskan pada beberapa dasar hukum seperti di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 52);

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

- Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12); dan
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3).

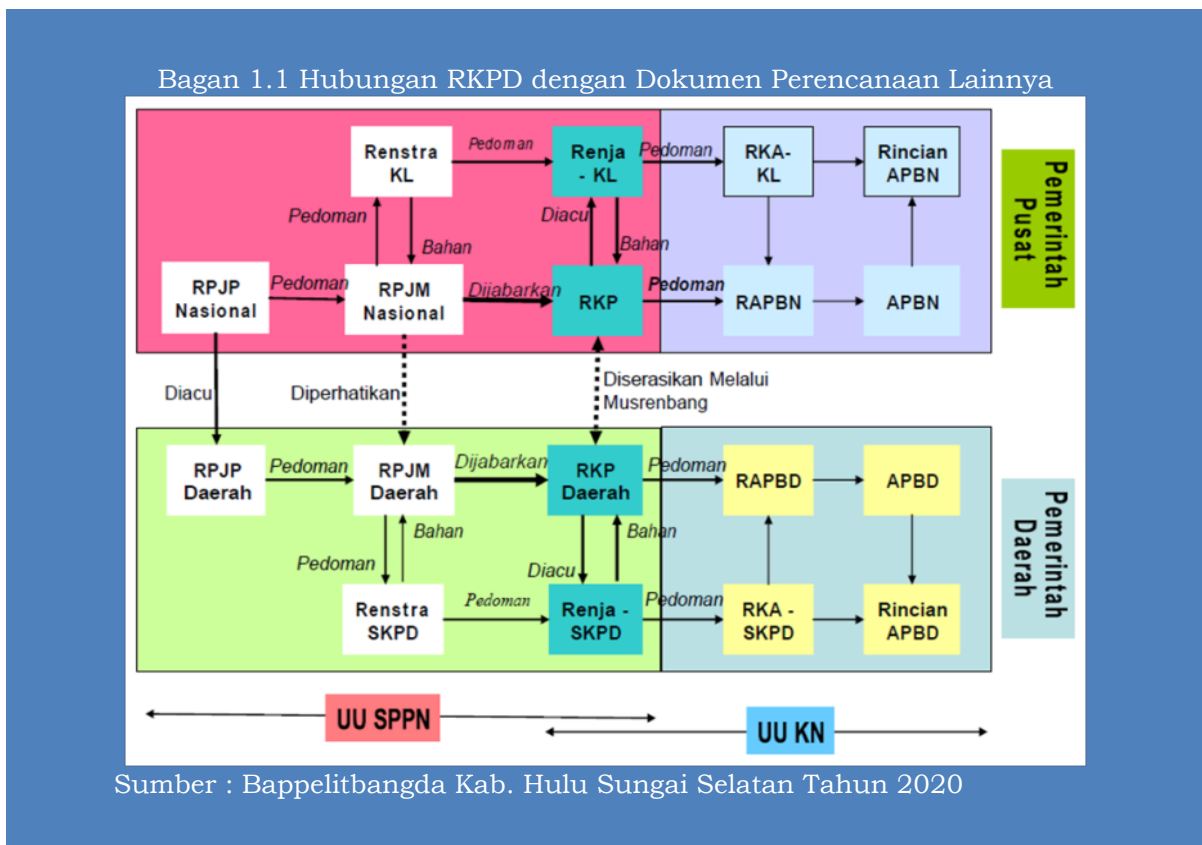
1.3 Hubungan antar Dokumen

Dokumen RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021, dalam kaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, merupakan penjabaran dari Dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Tahun 2021 adalah tahun ke-3 dalam pelaksanaan RPJMD dan termasuk periode ke-5 dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025. RKPD Tahun 2021 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah, yang akan dijabarkan menjadi rencana tahunan. Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Prov/Kab./Kota.

Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra PD dengan RKPD adalah bersifat mengikat yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L.

Mengingat adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS sampai dengan RAPBD. Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara sistematis dengan fokus pada tujuan, sasaran, tema pembangunan, prioritas, sub prioritas, program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana (pagu indikatif) sebagai instrumen pelaksanaan program dan kegiatan. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan 1.1.



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan tahunan pembangunan Daerah dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah, dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

RKPD Tahun 2021 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD juga menjadi pedoman perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dan Rancangan APBD.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika penulisan Dokumen RKPD sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini dikemukakan secara ringkas tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan RKPD dengan dokumen RPJMD dan dokumen lainnya yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD serta sistematika penulisan dokumen RKPD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran serta tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenbang.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan secara ringkas hubungan dokumen RKPD dengan RPJMD

Kabupaten serta dokumen yang relevan beserta penjelasan seperti keterkaitan dengan dokumen lain seperti: RPJMD Provinsi, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/Kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD dan sasaran penyusunan RKPD bagi Daerah

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengurutan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun yang lalu selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara umum mengenai kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bagian ini merupakan telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah. Evaluasi meliputi seluruh urusan baik wajib maupun pilihan pemerintah daerah khususnya menyangkut realisasi capaian kinerja program tahun lalu.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Bagian ini mengemukakan beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi baik yang berhubungan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah maupun program-program lain yang mendapatkan perhatian dalam rangka identifikasi permasalahan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi

daerah, sumber pendanaan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan implementasi program perekonomian untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah, isu strategis daerah sebagai dasar untuk menyusun prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2021.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menguraikan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam bab ini dikemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini mengemukakan penetapan indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Kabupaten Hulu Sungai Selatan, meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini menjadi gambaran potensi dasar yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber daya untuk pengembangan di masa depan serta kelemahan-kelemahan yang harus diatasi.

2.1 Kondisi Umum Daerah

Analisis pada aspek geografi Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam kurun waktu tertentu pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak 135 Km sebelah utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki banyak keanekaragaman hayati yang melimpah. Tak ketinggalan pula kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat yang secara turun temurun dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini merupakan potensi pengembangan daerah yang harus digali sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Seiring perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan, saat ini secara administrasi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 11 wilayah administrasi tingkat Kecamatan, 144 Desa dan 4 Kelurahan dengan pusat pemerintahan sekaligus ibukotanya yakni Kota Kandangan.

Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki ciri-ciri tertentu, yang dapat diketahui dari luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografi, topografi, klimatologi, geologi dan jenis tanah, serta hidrologi. Yang akan diuraikan pada penjelasan berikut ini.

1. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak di antara $02^{\circ}29'59''\text{LS}$ - $02^{\circ}56'10''\text{LS}$ dan $114^{\circ}51'19''\text{B}$ - $115^{\circ}36'19''\text{BT}$. Sedangkan ibukotanya yaitu Kandangan terletak $2^{\circ}47'\text{LS}$ dan $115^{\circ}40'\text{BT}$ yang dilewati oleh Sungai Amandit, anak sungai dari Sungai Barito.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari 11 kecamatan dengan batas-batas administrasi wilayah, sebagai berikut:

Sebelah utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai Utara

Sebelah timur : Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru

Sebelah selatan : Kabupaten Tapin

Sebelah barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sebesar 180.494 Ha atau 1804,94 Km². Kecamatan Loksado merupakan kecamatan terluas sebesar 338,89 Km² atau 18,78 persen dan yang paling kecil adalah luas wilayah Kecamatan Telaga Langsung yaitu 58,08 Km² atau 3,22 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tiap-tiap kecamatan terlihat pada tabel berikut ini:

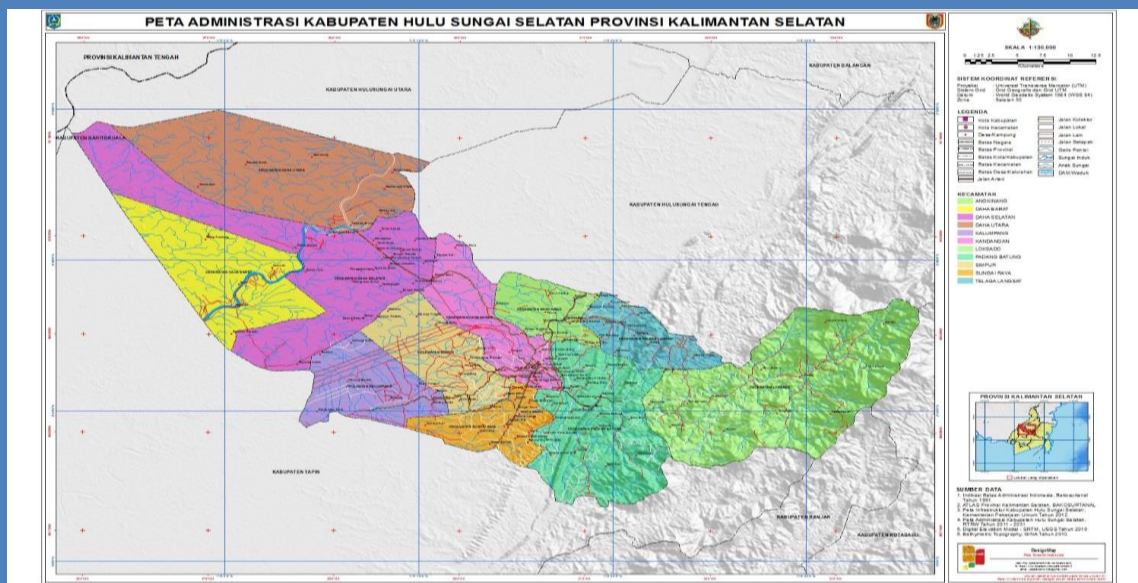
Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan & Kelurahan Kab.Hulu Sungai Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa/Kelurahan
1	Padang Batung	203,93	17
2	Loksado	338,89	11
3	Telaga Langsung	58,08	11
4	Angkinang	58,40	11
5	Kandangan	106,71	14+4
6	Sungai Raya	80,96	18
7	Simpur	82,35	11
8	Kalumpang	135,07	9
9	Daha Selatan	322,82	16
10	Daha Barat	149,62	7
11	Daha Utara	268,11	19
Jumlah		1.804,94	148

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, 2020

Berikut disajikan Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2020

2. Kondisi Topografi

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merupakan daerah yang berbukit dengan lereng terjal (antara 25 sampai lebih dari 40%) mencapai luas hampir 12% dari total keseluruhan wilayah. Daerah perbukitan tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, sebagian Sungai Raya dan yang paling luas terdapat di Kecamatan Loksado, merupakan bagian dari jalur Pegunungan Meratus yang sebagian difungsikan sebagai kawasan lindung.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng dan Ketinggian
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Uraian	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
Kelas Lereng (%)		
0-2	128.057	70,95
2-15	20.737	11,49
15-40	19.090	10,58
>40	12.610	6,99
Kelas Ketinggian (m)		
0-7 m	105.198	58,3
7-25 m	18.254	10,1
25-100 m	16.590	9,2
100-500 m	27.546	15,3
500-1.000 m	11.226	6,2
> 1.000 m	1.680	0,9

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka 2019

Wilayah Hulu Sungai Selatan juga banyak dialiri sungai seperti Sungai Amandit dan Sungai Nagara. Umumnya berpangkal pada pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makassar.

3. Kondisi Geologi

Secara geologis terdiri dari pegunungan-pegunungan yang memanjang dari arah timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah aluvial yang terkadang berawa-rawa, sehingga udaranya terasa dingin dan agak lembab. Geologi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mempunyai ketinggian 0-7 meter sebesar 58,3% dari wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terdapat beberapa daerah dataran tinggi yaitu sebesar 15%. Daerah dataran tinggi tersebut sebagian besar termasuk dalam jalur barisan pegunungan Meratus. Sesuai dengan konfigurasi medannya, wilayah sebelah barat didominasi oleh daerah genangan (rawa) atau persawahan, meliputi Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara, Daha Barat, dan sedikit wilayah Kecamatan Kalumpang dan Angkinang. Sedangkan wilayah sebelah timur terutama Kecamatan Loksado umumnya berupa hutan yang ditumbuhi berbagai jenis tanaman keras (tahunan). Rawa-rawa ini membuat pengembangan wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus dilaksanakan secara ketat sesuai peraturan kelestarian lingkungan sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada.

4. Kondisi Iklim

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan wilayah tropis memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi dengan *range* rata-rata antara 68,38% hingga 85,13% dan temperatur udara sekitar 27,09 °C hingga 29,20 °C. Selain itu, terdapat beberapa bulan yang memiliki curah hujan tinggi dan beberapa cukup rendah hingga rincian lengkap terkait kondisi iklim dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Temperatur (°C) Kelembaban Udara (%)
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019

No	Bulan	Rata-Rata Temperatur (°C)			Rata-Rata Kelembaban Udara (%)		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Januari	27,35	27,71	28,14	81,75	79,13	80,00
2	Februari	33,20	28,13	28,13	78,13	78,50	78,50
3	Maret	27,35	28,01	27,96	82,00	78,50	77,63
4	April	28,60	29,21	28,40	79,50	80,38	78,13
5	Mei	28,80	28,11	28,90	78,63	78,25	75,88
6	Juni	28,24	28,46	28,92	77,88	80,38	76,50
7	Juli	27,72	27,91	28,44	78,38	79,50	73,13
8	Agustus	27,89	29,39	28,87	77,63	75,63	70,75
9	September	28,77	28,58	29,47	74,88	76,75	69,63
10	Oktober	28,28	29,04	29,20	75,50	75,13	59,13
11	November	28,67	28,66	29,22	78,63	76,50	69,25
12	Desember	27,73	27,55	27,45	84,25	84,63	81,63

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan, data diolah

5. Penggunaan Lahan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki hutan yang cukup luas, meskipun setiap tahun mengalami penurunan karena adanya berbagai eksploitasi lahan, industrialisasi wilayah, hingga pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Luas wilayah hutan saat ini mencapai 55.382,33 Ha dengan persentase sebesar 30,68% disusul oleh Padang (Semak, Alang, Rumput) dengan luas 53.829,44 Ha atau 29,82%. Berikut luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

Tabel 2.4
Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase (%)
1	Kampung	5.161,18	2,86
2	Industri	-	-
3	Pertambangan	-	-
4	Sawah	44.294,00	24,54
5	Ladang	8.983,00	4,98
6	Kebun Campuran	1.744,25	0,97
7	Perkebunan (Kebun Karet)	10.906,94	6,04
8	Padang (Semak, Alang, Rumput)	53.829,44	29,82
9	Hutan	55.382,33	30,68
10	Rawa	192,86	0,11
11	Tanah Terbuka	-	-
12	Lain-lain	-	-
Jumlah		180.494,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan (diolah)

6. Potensi Pengembangan Daerah

Pengembangan kawasan dilakukan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu:

Tabel 2.5
Kawasan Budidaya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Kawasan Budidaya		
1	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kec. Loksado luasnya 4.545 Ha, Kec. Padang Batung luasnya 7.702 Ha, Kec. Sungai Raya luasnya 444 Ha, Kec. Telaga Langsung luasnya 399 Ha.
		Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi	Kec. Daha Barat luasnya 2.415 Ha, Kec. Daha Selatan luasnya 5.464 Ha, dan Kec. Daha Utara luasnya 10.843 Ha.
2	Kawasan Pertanian	Kawasan Peruntukan pertanian tanaman pangan	Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah luasnya 12.981 Ha, meliputi: Kec. Sungai raya, Kec. Simpur, Kec. Kandangan, Kec. Telaga Langsung, Kec. Daha Utara, Kec. Padang Batung, Kec. Kalumpang, Kec. Angkinang, Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara, Kec. Daha Barat
			Kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering/tegalan luasnya 3.797 Ha, meliputi: Kec. Padang Batung, Kec. Sungai Raya, Kec. Telaga Langsung, Kec. Loksado
		Kawasan Peruntukan Pertanian Hortikultura luasnya 3.797Ha dengan jenis komoditas	Buah-buahan berupa semangka meliputi : Kec. Telaga Langsung, Kec. Padang Batung, Kec. Daha Barat, Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara
			Sayur-sayuran meliputi : Kec. Sungai Raya, Kec. Telaga Langsung, Kec. Kandangan, Kec. Angkinang, Kec. Padang Batung, Kec. Simpur
3	Kawasan Perkebunan	Perkebunan Karet luasnya 23.839 Ha	Kec. Telaga Langsung, Kec. Padang Batung Kec. Loksado, Kec. Sungai raya, Kec. Angkinang
		Perkebunan Kelapa Sawit luasnya 48.955 Ha	Kec. Angkinang, Kec. Daha Barat, Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara, Kec. Kalumpang, Kec. Kandangan, Kec. Simpur
		Perkebunan Kayu manis	Kec. Loksado

No	Kawasan Budidaya		
		Perkebunan kelapa	Kec. Simpur, Kec. Kalumpang, Kec. Sungai raya, Kec. Padang Batung, Kec. Telaga Langsung, Kec. Kandangan, Kec. Angkinang
4	Kawasan Peternakan	Ternak sapi potong	a. Daerah sentra sapi meliputi : Kec. Sungai Raya, Kec. Simpur, dan Kec. Kalumpang b. Daerah pengembangan meliputi : Kec. Kandangan, Kec. Padang Batung, Kec. Angkinang, Kec. Telaga Langsung dan Kec. Loksado
Ternak kerbau rawa		a. Kec. Daha Barat	
Ternak kambing		b. Kec. Daha Utara	
Ternak domba		Seluruh Kecamatan	
Ternak ayam buras dan ayam ras		a. Kec. Kandangan	
Ternak itik		b. Kec. Daha Selatan	
Ternak ayam buras dan ayam ras		Seluruh Kecamatan	
Ternak itik		a. Daerah sentra meliputi Kec. Daha Utara b. Daerah pengembangan meliputi : Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Barat, Kec. Kalumpang, Kec. Simpur, dan Kec. Angkinang.	
5	Kawasan Perikanan	Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di sekitar sungai besar & danau luasnya 2.059 Ha	Kec. Daha Barat, Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara, Kec. Kandangan, Kec. Simpur, Kec. Kalumpang

No	Kawasan Budidaya		
		Kawasan peruntukan budidaya perikanan	a. Pengembangan kawasan perikanan kolam meliputi : Kec. Kandangan, Kec. Daha Selatan, dan Kec. Kalumpang. b. Pengembangan kawasan perikanan keramba meliputi : Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat.
		Kawasan pengolahan ikan	Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara, Kec. Daha Barat, Kec. Kandangan, Kec. Kalumpang
		Kawasan peruntukan perikanan minapolitan	Desa Muning Kec. Daha Selatan
6	Kawasan Pertambangan	Mineral logam	a. Emas berada di Kec. Loksado b. Mangan berada di Desa Tampak Pipi'i, Desa Bukuanin dan Desa Mawangi Kec. Padang Batung c. Besi berada di Desa Malaris, Desa Kamawakan, Desa S. Tinggiran, dan Desa S. Landuyan Kec. Loksado
		Mineral bukan logam	a. Pasir kuarsa berada di Desa Malilingin Kec. Padang Batung b. Fosfat meliputi : Desa Gn. Batu Laki dan Desa Gn. Batu Bini Kec. Padang Batung, Desa Gn. Liang Mandala dan Desa Gn. Burit Sanga Kec. Telaga Langsat c. Lempung meliputi : a) Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, Desa Madang, Desa Pandulangan di Kec. Padang Batung, b) Desa Angkinang Kec. Angkinang, c) Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya, d) Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kec. Telaga Langsat
		Batuan	a. Marmer berada di Desa Datar Kedayang, Desa Gn. Langara, dan Desa Gn. Kantawan Kec. Loksado

No	Kawasan Budidaya		
			<p>b. Granit berada di Desa Kamawakan Kec. Loksado</p> <p>c. Andesit meliputi : a) Kec. Loksado, b) Kec. Padang Batung, c) Gabro berada di Kec. Loksado</p> <p>d. Basalt meliputi : a) Desa Haratai Kec. Loksado, b) Desa Padang Batung, Desa Durian Rabung Kec. Padang Batung</p> <p>e. Tanah liat meliputi : a) Desa Karang Jawa, Desa Jambu Hulu, desa Madang, dan Desa Pandulangan Kec. Padang Batung, b) Desa Angkinang Kec. Angkinang, c) Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya, d) Desa Mandala, Desa Ambutun, Desa Taniti, dan Desa Pakuan Kec. Telaga Langsung</p> <p>f. Tanah urug berada di Desa Padang Batung dan Desa Tambak Pipi'i di Kec. Padang Batung</p> <p>g. Kerikil berpasir alami (sirtu) meliputi : a) Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Padang Batung, b) Sepanjang Sungai Amandit di Kec. Sungai Raya</p> <p>h. Batu gamping meliputi : a) Desa Gn. Batu Laki dan Desa Gn. Batu Bini, Desa Tayub, dan Desa Mandapai di Kec. Padang Batung, b) Desa Gn. Liang Mandala, Desa Gn. Burit Sanga di Kec. Telaga Langsung, c) Desa Datar Kedayang, Desa Haratai, dan Desa Tanuhi di Kec. Loksado</p>
		Batu bara	<p>a. Bitumen padat di Desa Malutu Kec. Padang Batung</p> <p>b. Desa Malutu, Desa Panglima Dambung, Desa Batu Bini, Desa Durian Rabung, Desa Muara Pipi'i, Desa Malilingin, Desa Kuangan, Desa Gn. Batubarang, Desa Gn. Pancur Binjai, Desa Pariangan, Desa Mandapai, Desa Tambak Pipi'i, Desa Tayub Kec. Padang Batung</p>

No	Kawasan Budaya		
			c. Desa Taniti di Kec. Telaga Langsat
7	Kawasan Industri	Kawasan industri kecil dan mikro meliputi :	<p>a. Industri Dodol Kandangan meliputi : Desa Kapuh Kec. Simpur, Desa Telaga Bidadari, Desa Hamalau, dan Desa Hariti Kec. Sungai Raya, Desa Gambah Luar, Desa Kandangan Barat dan Desa Kandangan Utara Kec. Kandangan</p> <p>b. Industri kerupuk berada di Bamban Utara Kecamatan Angkinang</p> <p>c. Industri ikan kering meliputi : Desa Bangkau Kec. Kandangan, Desa Bago Tanggul Kecamatan Kalumpang, Desa Muning dan Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan</p> <p>d. Industri propeler berada di Desa Penggadingan dan Desa Pekapuran Kecil Kecamatan Daha Utara</p> <p>e. Industri imitasi berada di Desa Habirau Kecamatan Daha Selatan</p> <p>f. Industri pandai besi berada di Desa Sungai Pinang dan Desa Tumbukan Banyu Kecamatan Daha Selatan</p> <p>g. Industri gerabah berada di Desa Bayanan Kecamatan Daha Selatan</p> <p>h. Industri kue kering meliputi : Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya, dan Desa Kapuh Kec. Simpur</p> <p>i. Industri anyaman bambu berada di Desa Malinau, Desa Ulang dan Desa Panggungan Kec. Loksado</p> <p>j. Industri Anyaman Purun berada di Desa Balimau dan Desa Karang Paci Kec. Kalumpang</p> <p>k. Industri Kumpang Parang berada di Desa Sarang Halang dan Desa Sungai Raya Utara Kec.</p>

No	Kawasan Budaya		
			<p>Sungai Raya</p> <p>1. Industri Gula merah meliputi : Desa Jambu Hulu, Desa Jambu Hilir Kec. Kandangan, Desa Baru Hulu, Desa Baru Tengah, Desa Asam-Asam, Desa Tamiyang, Desa Karasikan, Desa Batang Kulur Kanan, Desa Batang Kulur Kiri, Desa Bumi Berkat Kec. Sungai Raya.</p>
8	Kawasan Pariwisata	Wisata Budaya Lokal meliputi :	<p>a. Balai Adat Dayak di Kec. Loksado</p> <p>b. Rumah Adat Banjar Bumbungan Tinggi di Desa Habirau Kec. Daha Selatan</p> <p>c. Rumah Adat Banjar Gajah Manyusu di Desa Amawang Kec. Kandangan</p> <p>d. Upacara Aruh Ganal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p> <p>e. Seni Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p> <p>f. Lomba Jukung Tradisional (Perahu Naga) di Kec. Daha Selatan</p> <p>g. Olahraga Tradisional di Kabupaten Hulu Sungai Selatan</p> <p>h. Kalang Hadangan di Kec. Daha Utara dan Kec. Daha Barat</p>
		Wisata Sejarah meliputi :	<p>a. Tugu/Monumen Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan 17 Mei 1949 di Desa Ni'ih Kec. Loksado</p> <p>b. Tugu Peringatan Penyusunan Teks Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV di Kec. Telaga Langsung</p> <p>c. Tugu Garis Demarkasi di Desa Karang Jawa Kec. Padang Batung.</p> <p>d. Tugu Peringatan Markas Daerah Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Jelatang Kec.</p>

No	Kawasan Budaya		
			Padang Batung e. Gedung Juang Devisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan di Desa Hamalau Kec. Sungai Raya f. Situs Benteng Madang di Desa Madang Kec. Padang Batung g. Situs Amuk Hantarukung di Desa Hantarukung Kec. Simpur h. Makam Tumpang Talu di Kandangan Barat Kec. Kandangan i. Kubur Anam di Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya j. Makam Singakarsa di Jln. Singakarsa Kec. Kandangan k. Makam aluh Idut di Jln. Aluh Idut Kec. Kandangan l. Tugu 2 Januari (Tugu Hamayung) di Desa Hamayung Kec. Daha Utara m. Makam Ning Bulang di desa Hantarukung Kec. Simpur n. Rumah Bersejarah
		Wisata Religi meliputi :	a. Mesjid Su'ada di Desa Wasah Hilir Kec. Simpur b. Makam H. M Said di Desa Simpur Kec. Simpur c. Makam Datu H. Abbas di Desa Simpur Kec. Simpur d. Kubah Datu Durabu di Desa Kalumpang Kec. Kalumpang e. Kubah Taniran di Desa Taniran Kec. Angkinang f. Makam Keramat Datu H.M Rais di Desa Loknyiur Kec. Angkinang

No	Kawasan Budaya		
			g. Makam Datu Daha Kec. Daha Utara
			h. Makam Surgi Tuan di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara
			i. Makam Habib Ibrahim Desa Mandala Kec. Daha Utara
			j. Makam Tuan Guru H. Ali di Desa Pandansari Kec. Daha Selatan
			k. Makam Habib Lumpangi di desa Lumpangi Kec. Loksado
	Pariwisata alam		a. Wisata Alam Loksado di Kec. Loksado
			b. Air Terjun Haratai di Kec. Loksado
			c. Air Panas Tanuhi di Desa Tanuhi Kec. Loksado
			d. Gunung Kentawan di Desa Tanuhi Kec. Loksado
			e. danau Bangkau di Desa Kec. Kandangan
			f. Delta dan Dam Sungai Amandit di Desa Malutu Kec. Padang Batung
			g. Riam Anai di Desa Lok Lahung Kec. Loksado
			h. Air Terjun Kilat Api di Desa Tanuhi Kec. Loksado
			i. Air Terjun Uring di Desa Kamawakan Kec. Loksado
			j. Air Terjun Tangkaramin di Desa Malinau Kec. Loksado
			k. Air Terjun Tinggiran Hayam di Desa Kamawakan Kec. Loksado
			l. Air Panas Mandapai di Desa Batu Bini Kec. Padang Batung

No	Kawasan Budaya		
			m. Telaga Bidadari di Desa Telaga Bidadari Kec. Sungai Raya
9	Kawasan Permukiman	Kawasan Peruntukan Pemukiman luasnya 4.533 Ha	Kawasan Peruntukan permukiman perkotaan terdiri atas : Kawasan Perkotaan Kandangan di Kec. Kandangan, Kawasan Perkotaan Angkinang di Kec. Angkinang, Kawasan Perkotaan Sungai Raya di Kec. Sungai Raya, Kawasan Perkotaan Nagara di Kec. Daha Selatan dan Daha Utara, Kawasan Perkotaan Simpuri di Kec. Simpuri, Kawasan Perkotaan Loksado di Kec. Loksado, Kawasan Peruntukan permukiman perdesaan mencakup semua permukiman di luar kawasan Perkotaan di wilayah Kabupaten.
10	Kawasan Lainnya	Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi :	a. Pasar Los Batu Kec. Kandangan
		b. Pasar Nagara Kec. Daha Selatan	
		c. Pasar Hewan Kec. Angkinang	
		Kawasan Pertahanan dan Keamanan terdiri atas :	a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Kec. Kandangan
		b. Komando Rayon Militer Tersebar di wilayah Kabupaten	
		c. Kawasan Kepolisian meliputi :	
d. Kepolisian Resort berada di Kec. Sungai Raya dan Kec. Loksado			
e. Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten			

7. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sangat beragam mulai dari rawa hingga bukit dengan lereng terjal ditambah dengan adanya perubahan kondisi cuaca membuat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki titik rawan bencana. Berdasarkan data dari BPS Hulu Sungai Selatan bahwa sebagian besar atau 58,3% wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada ketinggian antara 0-7 m yang berdampak pada besarnya ancaman bencana banjir. Rincian daerah rawan bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Bencana Longsor, meliputi: Kec. Loksado di Desa Hulu Banyu, Kec. Padang Batung di desa Batu Laki, Kec. Telaga Langsung di Desa Hamak dan Hamak Utara.
- 2) Bencana Banjir, meliputi: Kec. Kandangan, meliputi Desa Jambu Hilir, Desa Baluti, Desa Sungai Kupang, Desa Sungai Paring, dan Desa Lungau; Kec. Kalumpang, meliputi Desa Kalumpang, Desa Karang Paci, Desa Balanti, dan Desa Balimau; Kec. Angkinang, meliputi Desa Telaga Sili-sili, Desa Sungai Hanyar, Desa Angkinang, Desa Angkinang selatan, dan Desa Bakarung; Kec. Sungai Raya, meliputi Desa Sungai Raya Selatan, Desa Tanah Bangkang, dan Desa Ida Manggala; Kec. Padang Batung, meliputi Desa Malutu, Desa Batu Laki, Desa Malilingin, Desa Jelatang, Desa Batu Bini, dan Desa Karang Jawa Muka; Kec. Telaga Langsung, meliputi Desa Mandala, Desa Lok Binuang, Desa Pakuan Timur, dan Desa Gumbil; Kec. Daha Selatan; Kec. Daha Utara; dan Kec. Daha Barat.

Tabel 2.6
Jumlah Bencana Alam, Korban, dan Taksiran Kerugiannya Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No	Bencana	Frekuensi Kejadian	Korban			Taksiran Kerugian (Rp)
			Kepala Keluarga	Jiwa	Meninggal	
1	Kebakaran	40	40	125	2	5.000.000.000
2	Banjir	2	5	21	-	36.000.000
3	Tanah Longsor	-	-	-	-	-
4	Angin Puyuh	87	87	225	-	2.100.000.000
5	Kekeringan	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, 2020

8. Demografi

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

A. Gambaran Umum Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Perkembangan Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat diketahui pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kecamatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
PADANG BATUNG	20.847	21.092	21.330	21.558	21.769
LOKSADO	8.839	8.968	9.094	9.219	9.340
TELAGA LANGSAT	9.619	9.750	9.882	10.013	10.140
ANGKINANG	17.718	17.905	18.090	18.271	18.442
KANDANGAN	49.737	50.293	50.840	51.364	51.847
SUNGAI RAYA	17.379	17.558	17.737	17.913	18.082
SIMPUR	14.550	14.668	14.785	14.896	15.000
KALUMPANG	6.309	6.357	6.402	6.446	6.486
DAHA SELATAN	41.939	42.498	43.050	43.592	44.106
DAHA BARAT	7.799	7.915	8.029	8.140	8.247
DAHA UTARA	32.417	32.885	33.348	33.805	34.243
Kab. Hulu Sungai Selatan	227.153	229.889	232.587	235.217	237.702

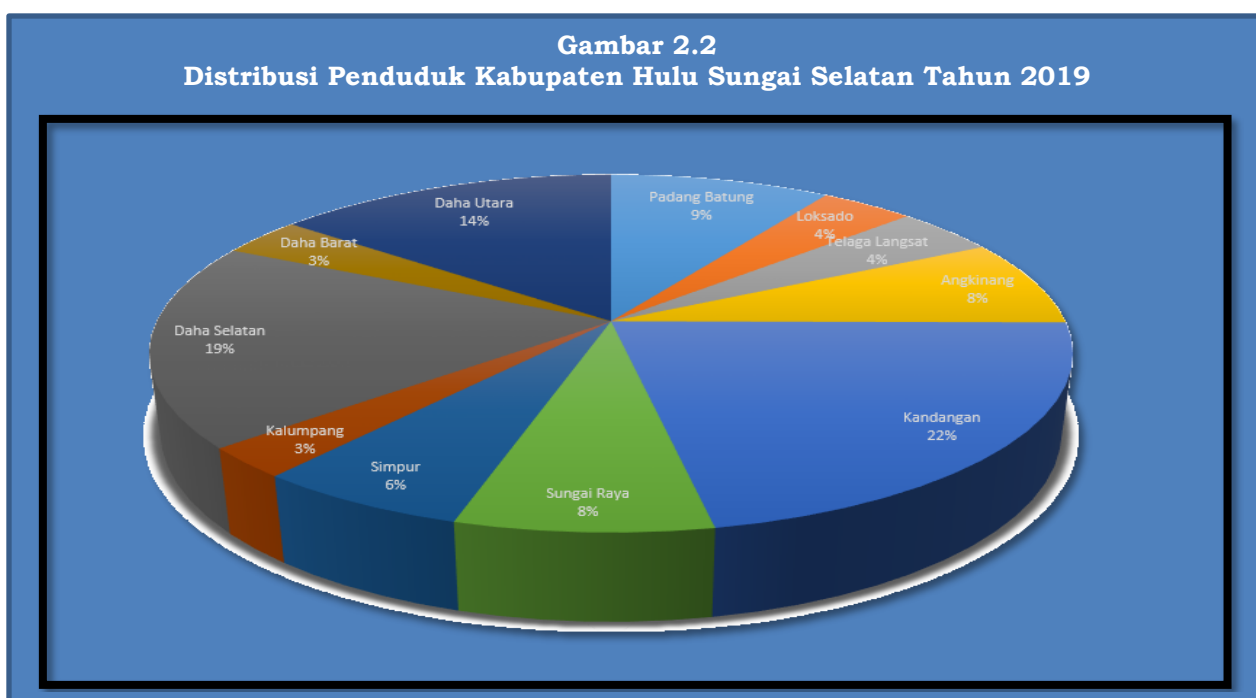
Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam Angka, 2020

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan persentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami pertumbuhan yang positif.

Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk periode 2015-2019, secara umum laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 1,13 persen dimana laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kecamatan Daha Barat (1,57%) dan disusul oleh Kecamatan Loksado (1,49%).

B. Distribusi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Ketimpangan distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terjadi di antara wilayah kecamatan. Meskipun begitu, ketimpangan distribusi penduduk tidak terlalu signifikan dan berkesan lebih merata.



Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan paling banyak berdomisili di Kecamatan Kandangan yaitu sebesar 50.293 jiwa (21,88%). Hal ini tidak bisa dipungkiri, mengingat Kecamatan Kandangan merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perkotaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, jumlah penduduk terbesar kedua terdapat di Kecamatan Daha Selatan yang memiliki jumlah penduduk mencapai 42.498 jiwa (18,49%).

C. Komposisi dan Populasi Masyarakat

Berdasarkan agama yang dianut, tahun 2018 terdapat 98,39 persen penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan beragama Islam, dan selebihnya

adalah Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya. Selain agama tersebut sebagian kecil penduduk Hulu Sungai Selatan, terutama di Kecamatan Loksado, menganut kepercayaan lainnya yaitu Kaharingan.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong hu chu	Kepercayaan Lainnya
1	Padang Batung	23.264	8	-	-	1	-	-
2	Loksado	5.65	1.221	7	433	3	-	2239
3	Telaga Langsat	11.442	-	-	-	-	-	-
4	Angkinang	20.614	2	-	-	-	-	-
5	Kandangan	53.471	139	22	12	17	-	-
6	Sungai Raya	19.511	27	-	3	-	-	-
7	Simpur	16.851	2	-	-	-	-	-
8	Kalumpang	7.262	-	-	-	-	-	-
9	Daha Selatan	45.566	9	-	1	-	-	-
10	Daha Barat	8.461	6	-	-	-	-	-
11	Daha Utara	35.771	11	-	-	-	-	-
	Hulu Sungai Selatan	247.904	1.425	29	449	21	-	2.239

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2020

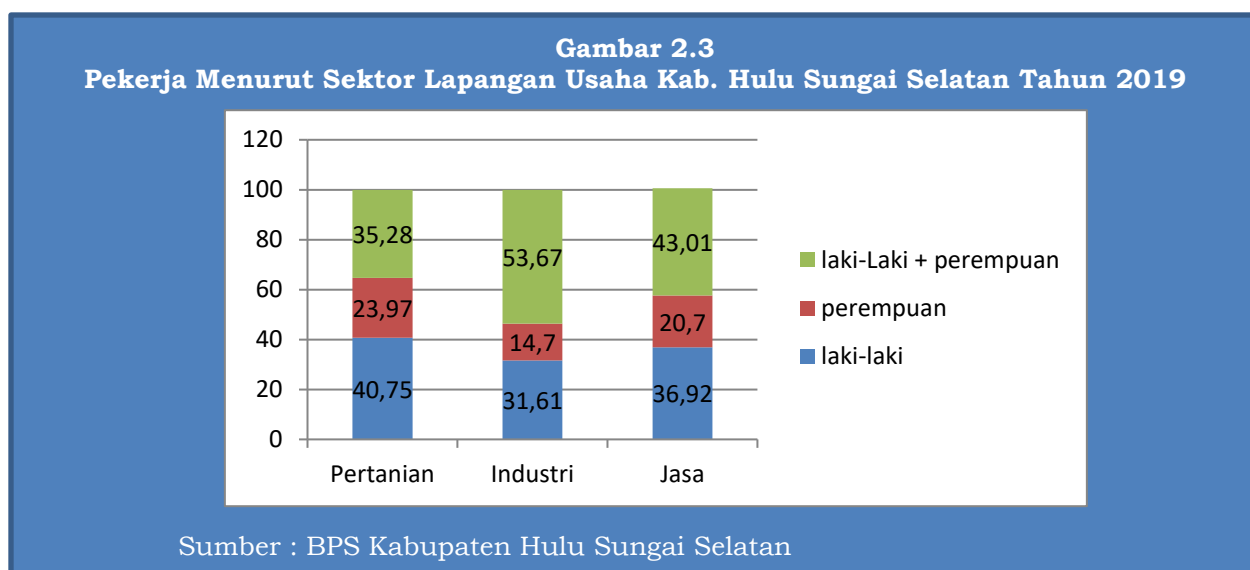
Jumlah tempat peribadatan seperti mesjid, musala, langgar dan gereja protestan mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019.

Tabel 2.9
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

No.	Kecamatan	Masjid	Langgar	Musala	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Balai
1	Padang Batung	23	47	5	-	-	-
2	Loksado	11	18	2	2	-	42
3	Telaga Langsat	10	34	4	-	-	-
4	Angkinang	10	50	7	-	-	-
5	Kandangan	20	132	8	1	-	-
6	Sungai Raya	14	88	5	-	-	-
7	Simpur	11	67	8	-	-	-
8	Kalumpang	5	30	-	-	-	-
9	Daha Selatan	18	85	-	-	-	-
10	Daha Barat	4	25	1	-	-	-
11	Daha Utara	10	86	6	-	-	-
	Hulu Sungai Selatan	136	662	46	3	-	42

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2020

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berada di daerah pedesaan. Meskipun demikian, pada tahun 2019 secara rinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan sektor lapangan usaha, maka sebagian besar yang dominan adalah jasa pada sektor perdagangan besar/eceran, rumah makan/restoran dan hotel, sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi dan jasa perusahaan, serta sektor jasa masyarakat dan lainnya. Dari keseluruhan jumlah penduduk yaitu mencapai 237.702 jiwa. Secara terperinci jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan sektor lapangan usaha, diuraikan dalam gambar berikut.



Sedangkan menurut kelompok tingkat pendidikan hingga tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok pendidikan tingkat SD/Sederajat yaitu sebesar 61,9% dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018, dapat diketahui pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kab. Hulu Sungai Selatan 2019

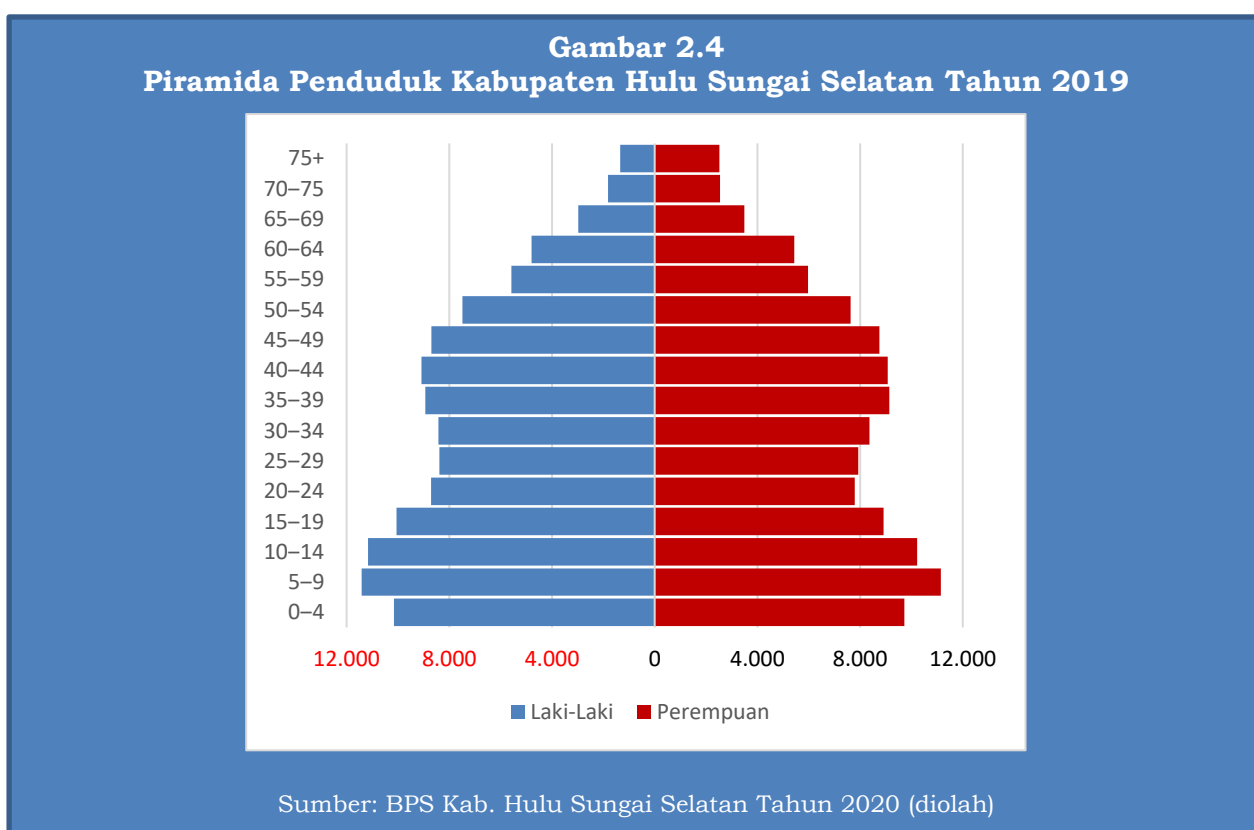
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (%)
1.	Belum / Tidak Sekolah	35,27
2.	SD / Sederajat	28,27
3.	SLTP / Sederajat	14,21
4.	SLTA / Sederajat	14,93
5.	Diploma	1,68
6.	Sarjana	5,64
Jumlah		100

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2020

D. Piramida penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun berhasil tidaknya program-program kependudukan selama ini.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, terlihat bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia produktif dimana pada usia muda paling sedikit jumlah penduduknya kemudian semakin bertambah usia semakin banyak penduduknya hingga berumur 75 ke atas.

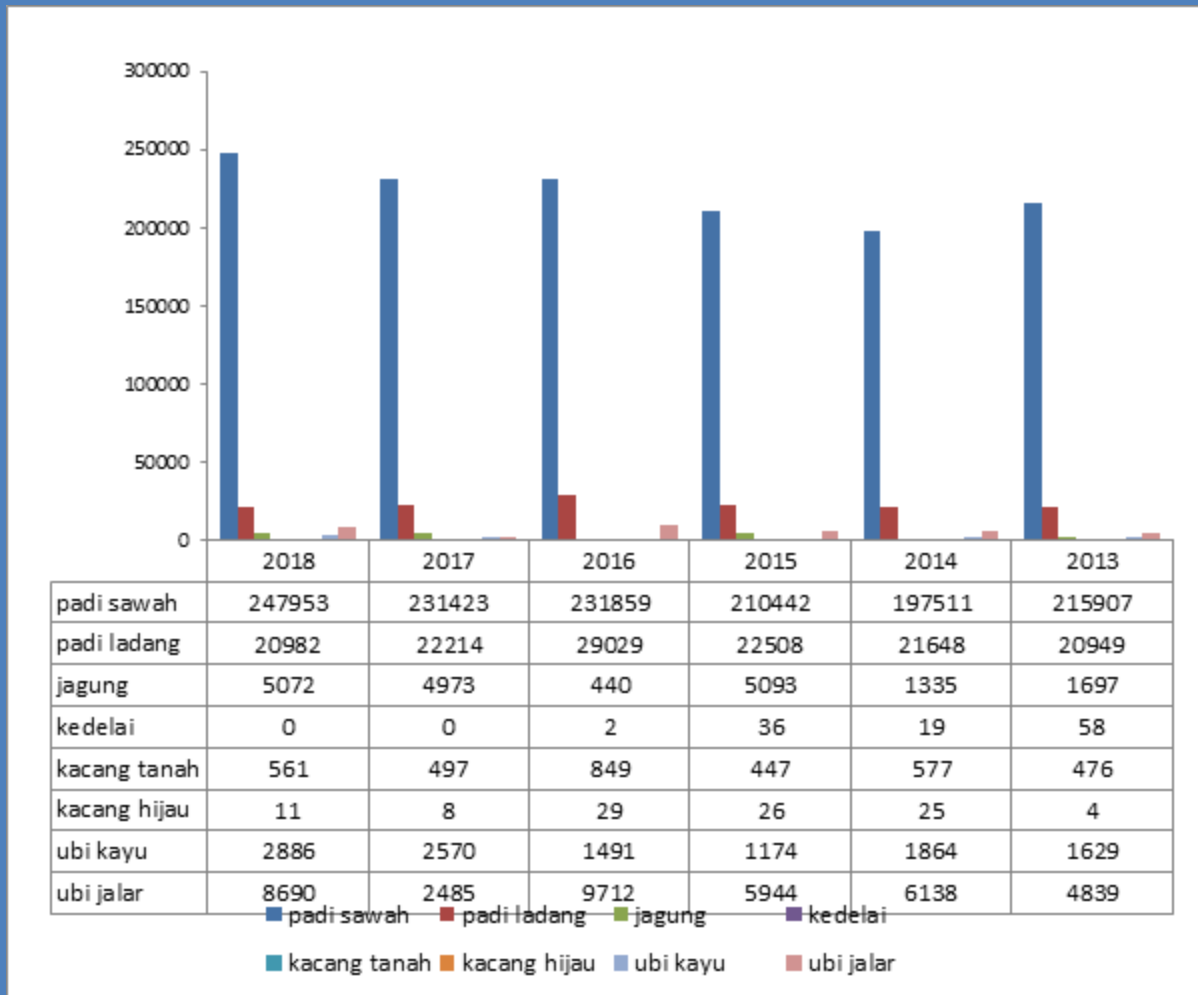


9. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah sektor pertanian dengan luas lahan sawah 52.591 Ha.

Potensi produksi pangan terutama dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur, dapat dilihat dari tabel berikut:

Gambar 2.5
Produksi Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2018



Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2019

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Kalimantan Selatan, karena secara geografis berada pada kawasan pegunungan, sungai, dan rawa. Sehingga memiliki objek wisata yang beragam dan alam yang sangat indah, seperti kawasan Pegunungan Meratus yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dengan air yang jernih, air terjun dan riam, dan sumber air panas alami. Seni budaya serta adat istiadat yang khas, beragam, dan terpelihara dengan baik. Pariwisata menjadi salah satu faktor penunjang pembangunan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam mengembangkan potensi pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan melalui konsep “*Ecotourism*” serta *Diamond Triangle* dalam konsep pengelompokan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP). Konsep *Eco-Tourism* yaitu konsep pembangunan pariwisata yang dilakukan dengan mengoptimalkan dan sekaligus melestarikan potensi alam dan budaya khas

Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkelanjutan dengan pengembangan pariwisata menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Melindungi lingkungan yang dimanfaatkan;
- b. Mengikutsertakan masyarakat secara aktif dalam kegiatan masyarakat;
- c. Menyajikan produk bermuatan pembelajaran, pendidikan dan rekreasi dari nilai-nilai karakteristik (alam dan budaya lokal);
- d. Memberi sumbangan positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah;
- e. Menekan sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkan dari rangkaian kegiatan pariwisata.

Pemanfaatan potensi SDA, SDM lokal, seni budaya dan adat khas dalam konsep pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan (masyarakat, pengusaha, BUMN/BUMD, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) secara bersinergi, terkoordinasi dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga memberikan ruang yang luas bagi desa untuk memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayahnya baik dalam pengelolaan daya tarik/atraksi wisata, peningkatan aksesibilitas, amenities dan pemanfaatan peluang usaha jasa pariwisata melalui badan usaha milik desa dan pemberdayaan kelompok sadar wisata. Pemasaran pariwisata dilakukan berdasarkan pertimbangan kemudahan aksesibilitas dan potensi jenis atraksi wisata, maka konsep Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok :



1) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) I

WPP I Merupakan kawasan alam (pegunungan, hutan, dan pertanian) yang sesuai untuk kegiatan wisata petualangan (*adventure*) dengan menikmati pemandangan alam. Di samping itu, juga terdapat kelompok dan masyarakat adat asli Dayak Pegunungan Meratus. WPP I merupakan kawasan prioritas I dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berada di Kecamatan Loksado, Kecamatan Padang Batung dan Kecamatan Telaga Langsat, dengan kawasan pengembangan utama yaitu Loksado yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS).

Di kawasan utama Kecamatan Loksado (Desa Loksado) perlu dibangun sebuah ruang terbuka yang berfungsi sebagai zona penyambutan/lokasi untuk bersantai dan istirahat bagi wisatawan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas berwisata. Sesuai dengan dokumen rencana induk dan rencana detail KSPN Loksado, maka dalam pengembangan amenitas di Kawasan Loksado diperlukan penataan terhadap bangunan-bangunan yang ada di tepi sungai dan pemulihan kembali Delta Amandit sebagai zona santai untuk wisatawan. Sinergitas antara berbagai urusan pemerintahan dalam pengembangan pariwisata di WP I berdasarkan konsep 3A, setidaknya mencakup :

- a. Pengembangan *eco-tourism*, *edu-tourism*, *ethnic-tourism* dan penyelenggaraan festival-festival dengan skala provinsi dan nasional, seperti *jungle trekking*, air terjun, air panas Tanuhi, festival Loksado, *bamboo rafting*, rumah adat/balai, dan upacara pesta adat/aruh ganal;
- b. Peningkatan jalan menuju destinasi pariwisata/obyek wisata sesuai dengan lingkup kewenangan secara berjenjang dari level pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat;
- c. Pengembangan usaha kecil dan menengah, fasilitasi jaringan permodalan dan legalitas usahanya;
- d. Pemberdayaan komunitas masyarakat adat;
- e. Pengembangan kawasan terpadu pariwisata desa;
- f. Pemanfaatan sumber daya hutan, perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi;

- g. Pengendalian pencemaran, pencegahan perusakan lingkungan hidup dan peningkatan upaya kebersihan lingkungan;
- h. Rehabilitasi dan peningkatan pelayanan di bidang perhubungan seperti penyediaan rambu-rambu dan peningkatan tipe pelayanan terminal Loksado;
- i. Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan seluler di kawasan Loksado;
- j. Pembinaan terhadap masyarakat, kelompok sadar wisata dan pelaku usaha jasa pariwisata melalui bentuk-bentuk sosialisasi, pelatihan dan kegiatan sejenisnya serta pemberian materi-materi khusus kepariwisataan pada pelajar di semua level pendidikan; dan
- k. Pengembangan kawasan yang dapat dijadikan museum rumah Adat Dayak, yang berisi kekhasan wilayah Loksado.

2) Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP) II

WPP II merupakan wilayah dengan dataran dan rawa, sebagian berada di wilayah perkotaan yang berfungsi sebagai zona penghubung. WPP II melingkupi Kecamatan Kandangan, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Angkinang, Kecamatan Simpur, dan Kecamatan Kalumpang. Pengembangan pariwisata di wilayah ini diarahkan pada pengembangan wisata religi, wisata kuliner, wisata perkotaan, dan wisata minat khusus. Ada beberapa makam ulama besar, mesjid yang bernilai sejarah, kawasan kuliner khas “Ketupat Kandangan”, beberapa wisata buatan, wahana permainan dan taman kota. Mendukung fungsinya sebagai zona penghubung, pada WPP II perlu adanya *Tourism Information Center* (TIC) dalam rangka memberikan kemudahan wisatawan terhadap akses informasi destinasi wisata dan mengarahkan pola perjalanannya sesuai paket-paket yang sudah disiapkan.

Pada wilayah ini juga perlu dikembangkan usaha jasa pariwisata, penyediaan galeri sentra industri kecil dan menengah sebagai upaya dalam pengembangan pemasaran dan pemenuhan kebutuhan wisatawan untuk berlibur dan belanja oleh-oleh/ *souvenir*.

10. Wilayah Rawan Bencana

Morfologi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekitar >65% merupakan daerah dataran, hal ini sangat riskan akan terjadi bencana banjir disebabkan daerah hulu dari Sungai Amandit yaitu daerah Loksado merupakan hutan yang kian lama akan semakin gundul akibat dari penebangan hutan yang

- Kecamatan Sungai Raya terdiri dari desa : Desa Sungai Raya Selatan, Desa Tanah Bangkang, Desa Ida Manggala;
- Kecamatan Padang Batung terdiri dari desa : Desa Malutu, Desa Batu Laki, Desa Malilingin, Desa Jelatang, Desa Batu Bini, Desa Karang Jawa Muka;
- Kecamatan Telaga Langsung terdiri dari desa : Desa Mandala, Desa Lok Binuang, Desa Pakuan Timur, Desa Gumbil; dan
- Kec. Daha Selatan, Kec. Daha Utara, dan Kec. Daha Barat.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olah raga.

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada periode saat ini, sedang PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Selama kurun waktu tahun 2015-2019 besaran PDRB ADHB menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. PDRB ADHK Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2015-2019, berturut-turut pada besaran yang relatif stabil. Berikut disajikan tabel perkembangan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2015-2019.

Tabel 2.11
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Kostan dan Berlaku
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019

Tahun	ADHB (Juta Rupiah)	ADHK (Juta Rupiah)
2015	4.782.062,67	3.740.951,26
2016	5.198.552,51	3.968.567,97
2017	5.653.719,52	4.211.489,43
2018	6.169.207,46	4.470.183,19
2019	6.604.017,90	4.707.953,66

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (diolah)

A. PDRB Menurut Lapangan Usaha

PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah seluruh lapangan usaha yang mencakup 17 (Tujuh belas) kategori lapangan usaha, yaitu : Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Berikut disajikan tabel Perkembangan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019:

Tabel 2.12
Perkembangan PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2015-2019

No	Lapangan Usaha	[Tahun Dasar 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.294.561,73	1.401.374,54	1.449.492,52	1.545.663,40	1.622.716,99
2	Pertambangan dan Penggalian	402.044,79	451.991,14	559.926,06	664.395,50	675.077,23
3	Industri Pengolahan	383.985,07	426.751,92	474.451,03	501.543,56	523.508,52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.942,11	3.722,67	4.368,11	4.945,92	5.297,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.631,94	18.244,02	19.355,75	21.176,83	22.891,79
6	Konstruksi	388.173,60	415.316,60	447.639,84	487.544,94	528.065,45
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	441.146,93	474.471,75	520.951,97	577.120,64	628.336,27
8	Transportasi dan Pergudangan	248.103,34	266.735,83	293.358,10	316.186,64	344.477,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	172.221,81	185.947,53	203.871,27	225.072,19	250.451,37
10	Informasi dan Komunikasi	202.858,04	222.272,02	246.347,89	268.646,65	297.789,58
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	96.689,51	105.833,55	114.305,99	122.934,29	129.617,73
12	Real Estat	119.691,58	126.923,99	135.761,24	145.592,08	158.101,33
13	Jasa Perusahaan	5.693,45	6.333,70	6.991,26	7.576,41	8.189,78
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	481.121,27	504.509,60	530.464,66	571.837,44	630.886,50
15	Jasa Pendidikan	349.642,80	392.334,15	428.798,53	466.085,46	509.259,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	96.996,95	108.295,28	120.835,52	133.236,00	148.720,19
17	Jasa lainnya	78.557,76	87.494,22	98.414,58	108.369,94	120.630,33
	PDRB	4.782.062,67	5.198.552,51	5.655.334,31	6.167.927,91	6.604.017,90

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (diolah)

B. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran merupakan pengeluaran atas barang dan jasa pada tingkat konsumsi akhir. Pendekatan ini merupakan penghitungan PDRB yang dilakukan dengan menghitung semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; pembentukan modal tetap domestik bruto; perubahan inventori; dan Net Ekspor (Ekspor dikurang Impor).

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (final demand) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan (UN, 1993).

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah adalah nilai seluruh jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi nilai penjualan barang/jasa (baik yang harganya signifikan dan tdk signifikan secara ekonomi) ditambah nilai barang/jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan pada RT secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi (*social transfer in kind-purchased market production*).

Secara garis besar PMTB didefinisikan sebagai pengeluaran unit produksi untuk menambah aset tetap dikurangi dengan pengurangan aset tetap bekas. Penambahan barang modal meliputi pengadaan, pembuatan, pembelian barang modal baru dari dalam negeri dan barang modal baru maupun bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal). Pengurangan barang modal meliputi penjualan barang modal (termasuk barang modal yang ditransfer atau barter kepada pihak lain).

Disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto karena menggambarkan penambahan serta pengurangan barang modal pada periode tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun serta akan mengalami penyusutan. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan pada proses produksi secara normal selama satu periode.

Inventori adalah persediaan yang dikuasai oleh unit yang menghasilkan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut, dijual, atau diberikan pada pihak lain, atau digunakan dengan cara lain. Merupakan persediaan yang berasal

dari pihak lain, yang akan digunakan sebagai input antara atau dijual kembali tanpa mengalami proses lebih lanjut.

Secara umum, konsep ekspor-impor luar negeri yang digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB Penggunaan mengacu pada *System of National Accounts* (SNA) 1993. Dalam SNA 1993, transaksi ekspor-impor barang luar negeri dalam komponen PDRB Penggunaan Provinsi merupakan salah satu bentuk transaksi internasional antara pelaku ekonomi yang merupakan residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Transaksi ekspor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (baik berupa penjualan, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari residen suatu wilayah Provinsi terhadap pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*). Sebaliknya, impor barang didefinisikan sebagai transaksi perpindahan kepemilikan ekonomi (mencakup pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dari pelaku ekonomi luar negeri (*non-resident*) terhadap residen suatu wilayah Provinsi.

Sebagaimana PDRB menurut sektoral, PDRB menurut pengeluaran juga dapat dipergunakan untuk melakukan analisis ekonomi makro dalam lingkup regional.

Beberapa indikator ekonomi makro yang dapat dianalisis dari PDRB menurut pengeluaran di antaranya adalah pertumbuhan PDRB dari sisi permintaan, struktur dan peranan PDRB menurut pengeluaran, yang meliputi antara lain : peranan permintaan domestik konsumsi (konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba dan konsumsi pemerintah); Peranan pembentukan modal tetap bruto dan perubahan stok; dan neraca perdagangan daerah yang meliputi ekspor dan impor, baik antar daerah maupun dengan luar negeri.

Secara sepintas, peran domestik Hulu Sungai Selatan cukup bagus dalam hal mendorong kinerja ekonomi pada tingkat regional, meski demikian ketergantungan terhadap suplai barang dan jasa dari luar daerah juga cukup besar sehingga ketergantungan terhadap daerah lain cukup tinggi. Jika kondisi ini tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menjual barang dan jasa dari Hulu Sungai Selatan ke luar daerah, maka akan menimbulkan pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan ekonomi regional. Berikut dapat diketahui perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019:

Tabel 2.13
Perkembangan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kab. Hulu Sungai Selatan
Tahun 2015-2019

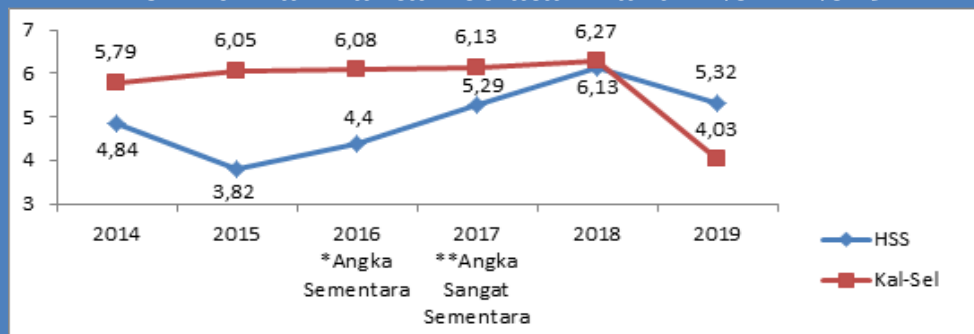
No	Komponen	[Tahun Dasar 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.350.995,77	3.611.406,46	3.922.270,74	4.272.184,43	4.628.240,30
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	79.041,20	87.272,98	97.089,63	109.109,11	122.041,26
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.060.470,59	1.141.702,03	1.181.251,18	1.256.057,36	1.357.967,08
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.461.690,78	1.560.097,48	1.673.900,19	1.831.659,64	2.010.517,22
5	Perubahan Inventori	5.820,00	(54.826,68)	17.713,91	20.355,41	22.838,56
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	(1.175.955,66)	(1.147.099,77)	(1.236.891,35)	(1.321.438,04)	(1.537.586,52)
	PDRB	4.782.062,67	5.198.552,51	5.655.334,31	6.167.927,91	6.604.017,90

Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (diolah)

C. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah nominal, tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih besar, seperti tahun ke tahun (YoY), atau dekade ke dekade. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019:

Gambar 2.8
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Kalsel 2020 (diolah)

D. Inflasi

Laju inflasi adalah kenaikan atau penurunan inflasi dari periode ke periode atau dari tahun ke tahun, sedangkan inflasi adalah suatu keadaan

dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung naik. Kecenderungan tingkat inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu inflasi Banjarmasin.

Berkaitan dengan mekanisme pasar, inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Pada tahun 2014 mengalami inflasi sebesar 7,16%, inflasi tersebut menurun menjadi 5,03% pada tahun 2015, dan turun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 menjadi 3,68%. Pada tahun 2017 meningkat kembali tetapi hanya 0,14% saja dari 3,68% menjadi 3,82% pada tahun tersebut. dan pada tahun 2018 menurun menjadi 2,63%, kemudian tahun 2019 menjadi 4,15%.

Tabel 2.14
Inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019

Kota Inflasi	Inflasi (Umum) Tahun (Persen)					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tanjung	8,80	6,69	2,18	2,40	2,60	2,15
Banjarmasin	7,16	5,03	3,68	3,82	2,63	4,15
Kalimantan Selatan	-	6,69	2,18	3,82	2,63	4,01

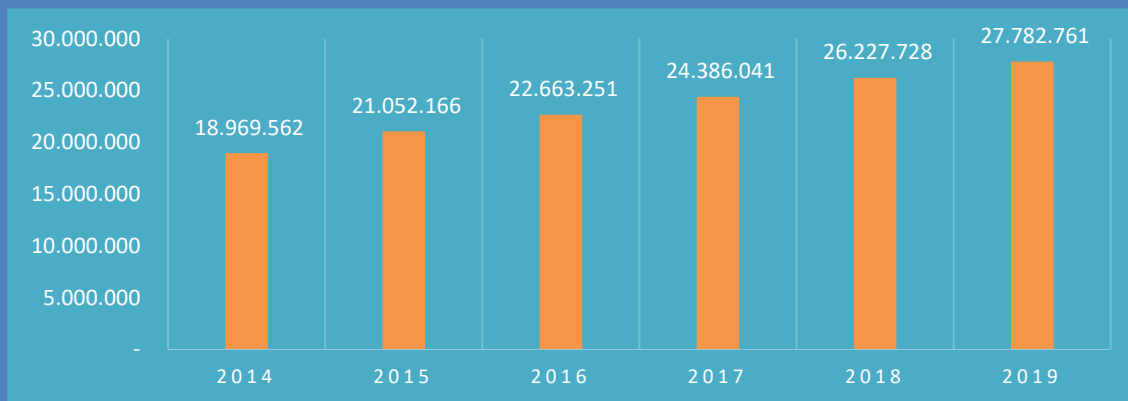
Sumber : BPS Kalsel Tahun 2020 (diolah)

E. PDRB Per kapita

PDRB Per kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu mengalami kenaikan yang relatif signifikan setiap tahunnya. Nilai PDRB Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Per kapita Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2014 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan.

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Pada tahun 2014 sebesar Rp 18,969 juta, meningkat pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015 menjadi Rp 21,052 juta, pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi Rp 22,663 juta, terus meningkat menjadi Rp 24,386 juta pada tahun 2017, meningkat pada tahun 2018 meningkat menjadi 26,227 juta dan tahun 2019 menjadi 27,783 juta rupiah. Berikut disajikan tabel perkembangan PDRB Per kapita Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014-2019:

Gambar 2.9
PDRB Per Kapita Berdasarkan ADHB
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (diolah)

Kenaikan PDRB per kapita setiap tahunnya juga berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang juga tiap tahunnya meningkat, pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 5,79% yang juga berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 6,05%, di tahun 2016 juga mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar menjadi sebesar 6,08%, di tahun 2017 ,meningkat lagi menjadi 6,13% dan tahun 2018 naik kembali menjadi sebesar 6,27% namun mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2019 menjadi 5,32%.

Secara nominal PDRB Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebesar 6,60 triliun, mengalami kenaikan 437 milyar dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 6,17 triliun. Naiknya PDRB ini dipengaruhi oleh naiknya produksi pada seluruh kategori lapangan usaha, dan adanya inflasi.

dan dari PDRB ADHK pada tahun 2018 sebesar 4,47 triliun dan pada tahun 2019 naik menjadi 4,71 triliun ini dipengaruhi oleh naiknya produksi pada semua lapangan usaha dan tidak dipengaruhi inflasi.

Struktur perekonomian Hulu Sungai Selatan dipengaruhi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi.

Kategori lapangan usaha yang menjadi unggulan utama hanya tumbuh rata-rata 1,66 persen pada tahun 2019 sedangkan pada tahun 2018 pertumbuhan adalah rata-rata 2,75 persen hal ini menandakan adanya perlambatan pertumbuhan.

F. Indeks Gini (Gini Rasio)

Peningkatan PDRB Per kapita serta Pertumbuhan ekonomi yang positif tidak menjamin adanya sebuah pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu indikator peningkatan pembangunan suatu daerah selain melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi perlu dilihat pula tingkat pemerataannya yang dapat dilihat melalui indeks gini.

Indeks gini (gini rasio) merupakan salah satu ukuran pemerataan ekonomi atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang nilai indeksnya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,334. Angka ini turun sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,340. Sementara jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 (0,344), tercatat penurunan yang lebih besar, sebesar 0,01 poin.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,353, turun sebesar 0,004 poin dibandingkan Gini Ratio September 2018 yang sebesar 0,357. Dibandingkan dengan Gini Ratio setahun sebelumnya, tercatat penurunan yang lebih besar (0,012 poin) yaitu pada posisi 0,365 pada Maret 2018.

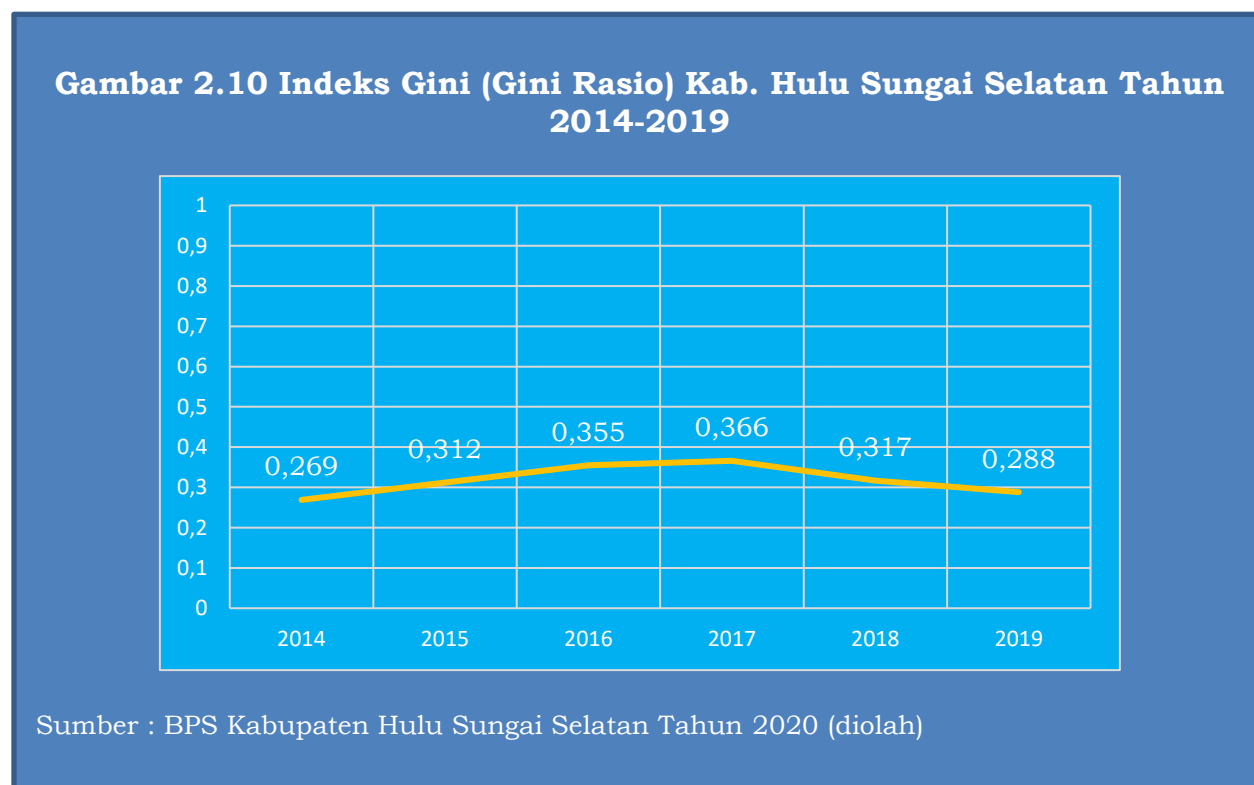
Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,282, atau naik sebesar 0,003 poin dibanding angka September 2018, tetapi turun sebesar 0,003 poin jika dibandingkan Gini Ratio Maret 2018 yang tercatat sebesar 0,285.

Pada Maret 2019, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 20,25 persen. Artinya pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

Dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 19,08 persen, sedangkan perdesaan mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu

sebesar 22,54 persen. Artinya, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan di Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

Pada Gambar di bawah ini adalah capaian indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2019.



Data series Indeks Gini dari tahun 2014 hingga tahun 2019 menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks gini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sempat mengalami kenaikan sebesar 0.043 pada tahun 2015 dari 0.312 dan pada tahun 2016 menjadi 0.355. Kenaikan indeks gini tersebut berhasil ditekan kembali sehingga pada tahun 2017 besar nilai indeks gini kembali turun menjadi 0.336, kemudian pada tahun 2018 indeks gini menurun menjadi 0,317 dan tahun 2019 menjadi 0,288. Hal ini menandakan penurunan yang positif karena semakin mendekati pemerataan.

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kesejahteraan sosial harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara, dan bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran

kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level ini berkisar antara 65,49 (Kabupaten Hulu Sungai Utara) hingga 79,22 (Kota Banjarbaru). Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, Umur Harapan Hidup saat lahir berkisar antara 63,58 tahun (Kabupaten Hulu Sungai Utara) hingga 71,87 tahun (Kota Banjarbaru). Sementara pada dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah berkisar antara 11,86 tahun (Kabupaten Tapin) hingga 14,80 tahun (Kota Banjarbaru), serta Rata-rata Lama Sekolah berkisar antara 7,27 tahun (Kabupaten Balangan) hingga 10,94 tahun (Kota Banjarbaru). Pengeluaran per kapita di tingkat kabupaten/kota berkisar antara 9,772 juta rupiah per tahun (Kabupaten Hulu Sungai Utara) hingga 14,547 juta rupiah per tahun (Kota Banjarmasin).

Kemajuan pembangunan manusia juga dapat dilihat dari perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Dalam periode tahun 2010–2019, ada empat kabupaten yang mengalami perubahan status. Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2012 naik kelas menjadi berstatus “sedang”, setelah sebelumnya berada pada status “rendah”. Sementara kabupaten Tabalong pada tahun 2016 berubah status dari “sedang” menjadi “tinggi”. Tahun 2018, Kabupaten Tanah Bumbu menyusul Kabupaten Tabalong sebagai daerah dengan status IPM “tinggi”. Terakhir tahun 2019, Kabupaten Tapin berhak menyandang Indeks IPM “tinggi”. Secara keseluruhan hingga tahun 2019 ada lima daerah yang telah mencapai status “tinggi”, yakni Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tapin. Sementara sisanya, 8 (delapan) kabupaten lain berstatus “sedang”.

Peningkatan IPM di tingkat provinsi juga tercermin pada level kabupaten/kota. Selama periode 2018 hingga 2019, seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan IPM. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Kotabaru (tumbuh 0,92 persen), Kabupaten Banjar (0,91 persen), dan Kabupaten Tabalong (0,90 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Banjar lebih didorong oleh dimensi pendidikan,

sementara di Kabupaten Tabalong didorong oleh dimensi ekonomi. Berikut disajikan data perkembangan IPM Kalsel dan Kab/Kota tahun 2019.

Tabel 2.15
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, 2018-2019

Provinsi/Kab/Kota	UHH (Tahun)		HLS (Tahun)		RLS (Tahun)		Pengeluaran per Kapita (Rp 000)		IPM		Pertumbuhan (%) 2018-2019
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Tanah Laut	69,08	69,31	11,95	11,96	7,38	7,64	11 209	11 318	68,49	69,04	0,80
Kota Baru	68,89	69,10	11,83	11,92	7,19	7,42	11 579	11 731	68,32	68,95	0,92
Banjar	66,66	66,97	11,99	12,28	7,29	7,34	12 571	12 681	68,32	68,94	0,91
Barito Kuala	65,59	65,88	12,37	12,38	7,32	7,33	9 780	9 952	65,91	66,24	0,50
Tapin	69,98	70,23	11,85	11,86	7,54	7,75	11 847	12 088	69,53	70,13	0,86
Hulu Sungai Selatan	65,59	65,82	12,07	12,10	7,72	7,74	12 535	12 835	68,41	68,80	0,57
Hulu Sungai Tengah	65,54	65,82	12,18	12,19	7,80	7,99	12 138	12 257	68,32	68,80	0,70
Hulu Sungai Utara	63,24	63,58	12,83	12,88	7,36	7,37	9 567	9 772	65,06	65,49	0,66
Tabalong	70,12	70,33	12,53	12,59	8,57	8,78	11 227	11 476	71,14	71,78	0,90
Tanah Bumbu	69,74	70,08	12,33	12,36	7,70	7,71	11 710	12 025	70,05	70,50	0,64
Balangan	67,37	67,59	12,36	12,37	7,04	7,27	11 442	11 557	67,88	68,39	0,75
Kota Banjarmasin	70,75	70,98	13,91	13,92	9,93	9,94	14 256	14 547	76,83	77,16	0,43
Kota Banjar Baru	71,67	71,87	14,79	14,80	10,93	10,94	13 590	13 949	78,83	79,22	0,49
Kalimantan Selatan	68,23	68,49	12,50	12,52	8,00	8,20	12 062	12 253	70,17	70,72	0,78

Keterangan:
 UHH : Umur Harapan Hidup Saat Lahir
 HLS : Harapan Lama Sekolah
 RLS : Rata-rata Lama Sekolah

Sumber : BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (diolah)

Selanjutnya pada Indeks Pembangunan manusia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari Tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu pertumbuhan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus diperhatikan lebih intensif lagi karena jika dilihat dari tren pertumbuhannya.

Sedangkan jika dilihat dari dimensi pembentuknya, pada dimensi kesehatan yaitu Angka harapan hidup (AHH) di Hulu Sungai Selatan fluktuatif setiap tahunnya. AHH tersebut juga masih berada di bawah AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi Ekonomi yaitu pada angka pengeluaran per kapita di Hulu Sungai Selatan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 juga lebih rendah dibandingkan angka pengeluaran per kapita Provinsi Kalimantan Selatan. Pada dimensi pendidikan, seluruh komponen penyusunnya yang meliputi Rata-rata Harapan Lama Sekolah, dan Rata-rata Lama Sekolah dari

tahun 2015 hingga tahun 2019 memiliki tren naik setiap tahunnya. Namun walaupun memiliki tren naik setiap tahunnya, nilai pada kedua indeks tersebut masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut disajikan data perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019 :

Tabel 2.16
Perkembangan IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019

Komponen Pembentuk IPM	Tahun					Dimensi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Angka Harapan Hidup	64,14	65,38	65,39	65,59	65,89	Kesehatan
Rata-Rata Harapan Lama Sekolah	11,83	12,02	12,05	12,07	12,10	Pendidikan
Rata-Rata Lama Sekolah	7,67	7,68	7,71	7,72	7,74	
Pengeluaran Perkapita	11,161	11,623	11,890	12,535	12,835	Ekonomi

Sumber : Kab. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2020

H. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Penduduk yang bekerja merupakan orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diartikan sebagai persentase dari penduduk yang mencari kerja (menganggur) terhadap jumlah angkatan kerja. Secara umum, kebijakan pemerintah terkait angkatan kerja memberi dampak positif pada penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan karena meliputi dimensi ekonomi dan sosial yang luas. Detail ketercapaian seluruh indikator ketenagakerjaan dari tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Realisasi Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja pertahun	Kasus	6	8	2	3	4
2	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	Persen	69,65	0	71,38	72,15	71,49
3	Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	482	564	709	905	905
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,84	-	2,02	2,43	2,56

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan data capaian tersebut, kondisi partisipasi masyarakat dalam mengisi kesempatan kerja masih belum optimal sehingga memerlukan upaya pengentasan pengangguran yang tepat. Kondisi ini dapat dilihat dari dua indikator yang menjadi tolok ukur pembangunan yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka. Realisasi capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 sebesar 65,27%, tahun 2015 sebesar 69,65 , tahun 2017 sebesar 71,38% dan pada tahun 2018 sebesar 72,15% dan pada tahun 2019 mencapai 71,49%.

Kondisi ini serupa dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang pada tahun 2014 sebesar 2,64%, kemudian naik 2,84% di tahun 2015, dan turun lagi pada tahun 2017 menjadi 2.02%, kemudian naik menjadi 2,43 pada Tahun 2018 dan pada tahun 2019 sebesar 2,56%.

Artinya kondisi partisipasi kerja di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih berada pada kondisi cukup ideal dengan melihat peluang kerja yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk lokal secara baik. Kenaikan ini terjadi karena pergeseran dari sektor pertanian ke sektor jasa serta perkembangan bidang pariwisata di Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pembangunan seperti pelatihan bahasa asing, internet marketing, *job fair* untuk mendukung penyiapan tenaga kerja di sektor jasa.

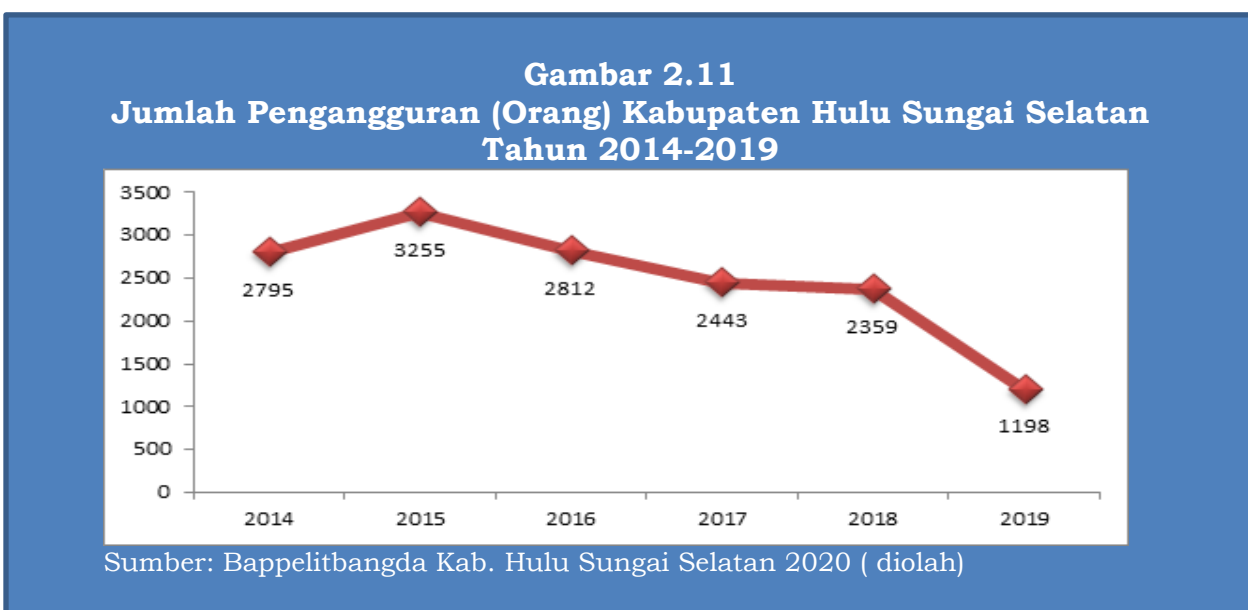
Pada indikator pencari kerja yang ditempatkan perkembangan setiap tahun cukup fluktuatif, tahun 2014 sebesar 80 orang, meningkat tahun 2015

sebesar 482 orang, tahun 2016 sebesar 564 orang, tahun 2017 sebesar 709 orang dan tahun 2018 sebesar 905 orang dan 2019 sebesar 905.

Urusan ketenagakerjaan juga memberikan gambaran terkait hubungan pekerja dan pengusaha. Hal ini menjadi penting dikarenakan dapat menunjukkan tingkat kenyamanan pekerja yang dapat diukur melalui indikator angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun. Capaian indikator tersebut pada tahun 2014 sebesar 6 kasus, tahun 2015 tetap sebesar 6 kasus, tahun 2016 sebesar 8 kasus, pada tahun 2017 sebesar 2 kasus, dan pada tahun 2018 sebesar 3 kasus dan tahun 2019 sebanyak 4 kasus.

Artinya angka ini masih menunjukkan rendahnya potensi sengketa pekerja dengan pengusaha. Perihal yang menjadi penyebab persengketaan pekerja dan pengusaha adalah masalah pengupahan dan adanya hak-hak pekerja lainnya yang belum terpenuhi.

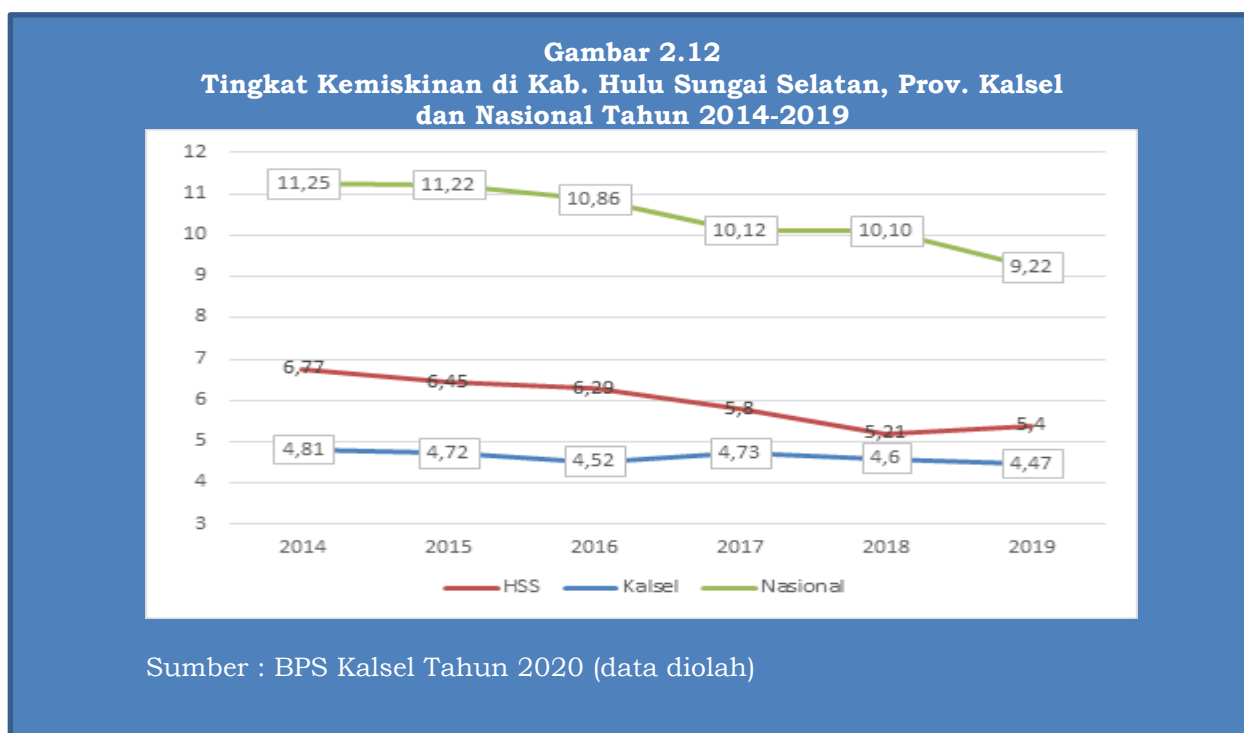
Namun dengan melihat angka capaian terdapat permasalahan internal yaitu adanya satuan ukuran antara target dan realisasi tidak sama sehingga menghasilkan angka yang besar. Oleh karena itu, upaya tindak lanjut ke depan adalah meningkatkan pemberian sosialisasi terhadap perusahaan atas hak-hak pekerja secara berkesinambungan. Ketercapaian indikator sengketa memang masih tergolong kurang ideal karena lebih disebabkan hubungan internal pekerja dan pengusaha.



I. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan untuk beberapa daerah dan lingkup pemerintah menjadi sebuah hal yang memiliki pandangan negatif dalam pencapaian pembangunan suatu daerah. Kemiskinan menjadi beban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban oleh segenap pemerintah daerah di Indonesia beserta semua aspek yang mempengaruhinya. Persoalan kemiskinan merupakan fenomena global, karenanya diperlukan peran dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan

Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tren penurunan tingkat kemiskinan yang baik di setiap tahunnya. Seperti tersaji dalam gambar di bawah ini.



Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong cukup rentan mengingat angka persentase kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan hanya 4,47 % pada tahun 2019.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggunakan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga (*Family Based-Policy*), rumah tangga miskin, Strategi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin menurut individu (sebagai anggota keluarga dalam rumah tangga miskin). dan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, yang bertujuan

membiasakan para rumah tangga miskin untuk berkelompok, belajar mengelola kegiatan secara bersama, memupuk rasa solidaritas sosial dan meningkatkan peran aktif kelompok rumah tangga miskin dalam satu satuan wilayah terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) untuk berperan dalam meningkatkan akses bagi anggota masyarakat miskin kepada pelayanan sosial maupun sarana prasarana sosial dasar.

Penanggulangan kemiskinan berbasis individu terpilih sebagai pemicu pencapaian peningkatan pendapatan bagi kelompok rumah tangga miskin produktif. Strategi ini ditujukan untuk memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok rumah tangga miskin yang ada di antara para anggotanya yang produktif dan mempunyai usaha mikro dan kecil. Sehingga mereka dapat meningkatkan akses permodalan, teknologi dan pasar, yang diharapkan terjadi peningkatan pendapatan yang lebih besar lagi. Strategi ini menyediakan bantuan modal atau kredit mikro kepada kelompok rumah tangga miskin yang berada dalam satu satuan wilayah terkecil seperti RT atau RW.

Selain itu implementasi pembangunan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok miskin, pembangunan inklusif, penguatan kelembagaan dan reorientasi kebijakan, menjadi pilar utama strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun hasil dari berbagai inovasi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial tersebut telah menunjukkan sisi manfaat pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada tabel berikut dapat diketahui perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 2.18
Perkembangan Tingkat Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tahun 2015-2019

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,45	6,29	5,8	5,21	5,33
2	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Persen	0,76	0,62	0,83	0,71	0,72
3	Indeks Keparahan Kemiskinan	Persen	0,15	0,10	0,15	0,18	0,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berikut tabel jumlah orang miskin per kecamatan di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019 :

Tabel 2.19
Jumlah Orang Miskin Per Kecamatan Di Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019

NO	KECAMATAN	Tahun		
		2017	2018	2019
1	ANGKINANG	5.556	5.649	5654
2	DAHA BARAT	2.040	2.221	2208
3	DAHA SELATAN	13.975	14.250	14011
4	DAHA UTARA	9.513	9.582	9744
5	KALUMPANG	3.216	3.265	3175
6	KANDANGAN	11.133	11.325	10914
7	LOKSADO	2.599	2.838	2862
8	PADANG BATUNG	5.153	5.238	5423
9	SIMPUR	5.999	6.075	6160
10	SUNGGAI RAYA	4.419	4.478	4462
11	TELAGA LANGSAT	3.475	3.584	3731
	TOTAL	67.078	68.505	68.344

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan (diolah)

J. Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan meliputi jumlah grup kesenian, jumlah gedung, Perkembangan Seni dan Budaya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.20
Perkembangan Seni Budaya dan Olahraga
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

No	Indikator	2014	2016	2017	2018	
1	Kebudayaan					
	1.1	Jumlah grup kesenian	92	115	135	137
	1.2	Jumlah gedung	5	5	5	5
2	Pemuda dan Olahraga					
	2.1	Jumlah klub olahraga	90	102	102	102
	2.2	Jumlah gedung olahraga	12	12	12	12

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2019

1. Olahraga

❖ Fasilitas Olahraga

- Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Aluh Idut
- Stadion 2 Desember
- Kolam Renang
- Lapangan Tenis Tumpang Talu
- Lapangan Tenis Antaludin
- Lapangan Basket Amandit
- Dinding Panjat

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai bidang utama pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, penataan ruang dan perhubungan, dan sebagainya yang merupakan pelayanan wajib oleh pemerintah daerah dalam pembangunan. Sedangkan kondisi pelayanan pilihan dapat diketahui dari beberapa bidang yakni pertanian, pariwisata, industri, perdagangan, dan sebagainya yang menyangkut pelayanan pilihan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan Program Prioritas dan Pagu indikatif Program, maka selanjutnya perlu menetapkan indikator kinerja daerah. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah, yang meliputi aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat

dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Hulu Sungai Selatan diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah Kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik.

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan memang sudah menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan di beberapa sektor.

**Tabel 2.21 Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019**

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
URUSAN WAJIB								
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	6.439 ----- x 100 % 8,189	78.62 %	100 %	
		2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan PAUD ----- x 100 % Jumlah Pendidik PAUD	434 ----- x 100 % 958	45,302 %	100 %	
		3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	100 ----- x 100 % 297	33,67 %	100 %	
		4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis ----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas	178,047 ----- x 100 % 181,786	97.94 %	100 %	
		5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	21.208 ----- x 100 % 24,913	85.12 %	100 %	
		6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	9852 ----- x 100 %	80,95 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
			15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	----- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan	12,169			
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	22 ----- x 100 % 17,998	0.12 %	0 %	
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan Jenjang SMP/MTs	74 ----- x 100 % 9,852	0,75 %	0 %	
		9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D- IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan SD ----- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Sekolah Dasar	961 ----- x 100 % 1,531	62.76 %	100 %	
		10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama yang memiliki Ijazah D IV atau sarjana (S1), dan sertifikat Profesi guru Pendidikan Menengah Pertama ----- x 100 % Jumlah Pendidik Jenjang Menengah Pertama	280 ----- x 100 % 332	84.33 %	100 %	
		11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah Satuan Pendidikan SD dan SMP	279 ----- x 100 % 280	99.6 %	100 %	
		12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya	3210 -----x 100% 3210	100 %	100 %	
		13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	3.035 ----- x 100% 3,035	100 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs ----- x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	3,185 ----- x 100% 3,098	102,80%	100 %	
		15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan	36 ----- x 100% 27,85	0.129 %	0 %	
2	Kesehatan	16	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100 % Jumlah Penduduk di Kabupaten	399 ----- x 100 % 234,936	0,16 %		
		17	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100 % Jumlah RS di Kabupaten	3 ----x 100 % 4	75 %	100 %	
		18	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan ----- x 100 % Jumlah Penduduk Kabupaten	1644 ----- x 100% 234,936	144.58 %	100 %	
		19	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100 % Jumlah ibu hamil di Kabupaten	3450 ----- x 100 % 4438	77,73 %	100 %	
		20	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan ----- x 100 % Jumlah ibu bersalin di Kabupaten	3674 ----- x 100% 3766	97,5 %	100 %	
		21	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten	3647 ----- x 100 % 3739	97,5 %	100 %	
		22	Persentase pelayanan	Jumlah balita yang mendapatkan layanan	13155	65,2 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
			kesehatan balita sesuai standar	kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah balita di Kabupaten	----- x 100 % 20175			
		23	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten	9204 ----- x 100 % 9595	95,92 %	100 %	
		24	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten	99628 ----- x 100 % 163856	60,80 %	100 %	
		25	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kabupaten	17470 ----- x 100 % 33160	52,68 %	100 %	
		26	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten	32975 ----- x 100 % 64084	51,45 %	100 %	
		27	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita DM di Kabupaten	3830 ----- x 100 % 3349	114,36 %	100 %	
		28	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten	471 ----- x 100 % 332	141,86 %	100 %	
		29	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah penderita TBC di Kabupaten	2367 ----- x 100 % 3,11	76,10 %	100 %	
		30	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100 % Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di	3.932 ----- x 100 % 3,434	114,50 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
				Kabupaten				
		31	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI ----- x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	123 ----- x 100 % 148	83,11 %	100 %	
		32	Persentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	Jumlah balita gizi buruk/ <i>stunting</i> mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk/ <i>stunting</i> yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	748 ----- x 100 % 748	100 %	100 %	
		33	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	260 ----- x 100 % 260	100 %	100 %	
		34	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan ----- x 100.000 Jumlah Ibu Melahirkan	3 ----- x 100.000 3739	80.23 % per 100.000 KH	100 % 100.000 KH	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	35	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (baik dan sedang) ----- x 100 % Panjang seluruh jalan Kabupaten di daerah tersebut	550.27 ----- x 100 % 859,36	64.03 %	100 %	
		36	Persentase Panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi	Panjang jalan Kabupaten yang direhabilitasi/direkonstruksi ----- x 100% Panjang Jalan Kabupaten yang seharusnya direhabilitasi/direkonstruksi	64.89 ----- x 100% 134,23	48.35 %	100 %	Jalan yang di rehabilitasi ----- - X 100 % total panjang kondisi rusak ringan
		37	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha) ----- x 100 %	70.465,16 Ha ----- x 100 %	80 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
			banjir di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten (ha)	880,800 Ha			
		38	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten (m) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten (m)	0	0	0	Kab. HSS tdk memiliki daerah Laut dan Pantai
		39	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten. ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga di seluruh Kabupaten tersebut.	40.511 ----- x 100 % 47,852	84.66 %	100 %	
		40	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A	4.410 ----- x 100 % 47,852	9.216 %	100 %	
		41	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis / analis ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis / analis di wilayah Kabupaten	96 ----- x 100 % 168	57.14 %	100 %	
		42	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi ----- x 100 % Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0 ----- x 100 % 129	0 %	0 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		43	Rumah Tangga Bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	64,279 ----- x 100 % 67,642	95.02 %	100 %	PU :39.188 Kec. : 25.091 Total : 64.279
		44	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	40,511 ----- x 100 % 47,852	84.66 %	100 %	
		45	Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh ----- x 100 % Luas Wilayah	0 ----- X 100 % 1.804,94	0 %	0 %	Bahwa sudah tdk ada lagi kawasan kumuh di Kab. HSS
		46	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Luas ruang terbuka hijau ----- x 100 % Luas wilayah	1.061,66 ----- x 100 % 1.804,94	58.82 %	70 %	
		47	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100 % luas daerah irigasi kewenangan kabupaten	9.837 ----- x 100 % 15,856	62.039 %	100 %	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2019 ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	137 ----- x 100 % 137	100 %	100 %	
		49	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni ----- x 100 % Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria	3 ----- x100 % 3	100 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
				penerima pelayanan Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Rumah Layak Huni				
		50	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	0	0	0	Bahwa Kab. HSS untuk luas kawasan kumuh di bawah 10h sesuai SK Kumuh Bupati No 386 tahun 2014 (sudah tidak kumuh lagi)
		51	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh ----- x 100 % Jumlah total unit rumah Kabupaten	7,136 ----- x 100 % 67,642	10.55 %	15 %	
		52	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100 % Jumlah unit rumah kabupaten	60.506 ----- x 100 % 67,642	89.45 %	100 %	
		53	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.	60,506 ----- x 100 % 67,642	89.45 %	100 %	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	54	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100 % Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	36 ----- x 100 % 36	100 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		55	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	12	100 %	100 %	1. Perda Kab. HSS No. 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok 2. Perda Kab. HSS No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame 3. Perda Kab. HSS No. 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum 4. Perda Kab. HSS No. 9 Tahun 2016 tentang Ketentuan Kegiatan dan Larangan pada Bulan Ramadhan 5. Perda Kab. HSS No. 11 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) 6. Perda Kab. HSS No. 2 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 7. Perda Kab. HSS No. 2 Tahun 2015

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
					-----x 100% 12			tentang Pengelolaan dan Walet. 8. Perda Kab. HSS No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Retribusi Jasa Usaha Umum 9. Perda Kab. HSS No. 8 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. 10. Perda Kab. HSS No 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha 11. Perda Kab. HSS No. 15 Tahun 2007 tentang Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. 12. Perda Kab. HSS No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
		56	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	264.195 orang	264.195 orang	264.195 orang	
		57	Jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan & kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	264.195 orang	264.195 orang	264.195 orang	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		58	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	377	377	100 %	
		59	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten	$\frac{38}{38} \times 100\%$	100 %	100 %	
				dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah $\frac{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten}} \times 100\%$				
		60	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	$15 / 15 \times 100\%$	100 %	100 %	
		61	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS $\frac{\text{Jumlah Personil Satpol PP}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP}} \times 100\%$	$\frac{1}{67} \times 100\%$	1.49 %	1.49 %	
6	Sosial	62	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$	$\frac{4.524}{4,524} \times 100\%$	100 %	100 %	
		63	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{263}{263} \times 100\%$	100 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		64	Rasio rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar ----- x 100% Jumlah Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	1 ----- x100 % 4,524	0.022 %	0.022 %	
		65	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng seharusnya dapat di reunifikasi dengan keluarga	4.524 ----- x 100% 4,524	100 %	100 %	
		66	Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	Jumlah pekerja sosial profesional dan atau Tenaga Kerja Sosial dan atau relawan sosial yang ada ----- x 100 % Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dibina	256 ----- x 100 % 4,524	5.65 %	5.65 %	
7	Tenaga Kerja	67	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	6 ----- x 100 % 6	100 %	100 %	
		68	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja keseluruhan	125 ----- x 100% 162	77.16 %	100 %	
		69	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja	12,474 -----x 100% 13,672	91.23 %	100 %	Angka PDRB Tahun 2018
		70	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		92 %	100 %	Data dikoordinasikan

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
			yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	----- x 100 % Jumlah Perusahaan	23 ----- x 100 % 25			dengan prov. Kalsel
		71	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100 % Jumlah pencaker yang terdaftar	1.126 ----- x 100 % 1,198	93.98 %	100 %	
		72	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial ----- x 100 % Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial	5 ----- x 100 % 6	83.33 %	100 %	1
		73	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah Instruktur Bersertifikat Kompetensi ----- x 100 % Jumlah Instruktur	79 ----- x 100 % 85	92.94 %	100 %	
		74	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan ----- x 100 % Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja	3 -----x 100 % 3	100 %	100 %	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD ----- x 100 % Jumlah seluruh belanja langsung APBD	38.637.666 ----- x 100 % 773.961.416.921	4,99 %	4,99 %	
		76	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten yang didampingi ----- x 100 % Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	10 ----- x 100% 72,362	0.01 %	0.01 %	
		77	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan ----- x 100.000	6	0.005 %	0.005 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
			(per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah penduduk perempuan	----- x 100 % 117,079			
		78	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang terlayani ----- x 100 % Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	6 ----- x 100 % 6	100 %	100 %	
		79	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan	25,146 ----- x 100 % 43,703	57.53 %	100 %	
9	Pangan	80	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan ----- x 100 % Jumlah kebutuhan pangan	169,708 ----- x 100 % 54,127	313.5 %	100 %	Surplus
		81	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan		ada	ada	ada	15 Lumbung yang berfungsi
10	Pertanahan	82	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi ----- x 100 % seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi	174.007 ----- x 100 % 174,007	100 %	100 %	Merupakan tanah aset Pemda
		83	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100 % Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	10.632 ----- x 100 % 46,008	23 %	100 %	Pengadaan tanah yang diterbitkan penetapan lokasi adalah 10.632 meter persegi sedangkan jumlah kebutuhan dan pengadaan adalah 46.008 meter persegi
		84	Tersedianya lokasi pembangunan dalam	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	4	100 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
			rangka penanaman modal.	----- x 100 % Luas izin lokasi yang diterbitkan	----- x 100 % 4			
		85	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah luas Tanah Obyek Landreform (TOL); ----- x 100 % Jumlah penerima tanah obyek landreform	1236,44 ----- x 100 % 4000	56 %.	100 %	Rata-rata penerima mendapatkan bidang tanah seluas 31% atau 3100 meter persegi
		86	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ----- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah	3.631.550,88 ----- x 100 % 4.763.201,12	76.24 %.	100 %	
		87	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100 % Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	8 ----- x 100 % 8	100 %	100 %	
		88	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100 % jumlah pengaduan sengketa tanah Garapan	0	0 %	0 %	Bahwa di Kab. HSS tdk ada sengketa
11	Lingkungan Hidup	89	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten		Ada	ada	ada	
		90	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani ----- x 100 % Total vol timbunan sampah Kabupaten	25.026,59 ----- x 100 % 33,967	73.68 %	100 %	
		91	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten ----- x 100 % Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	20 ----- x 100 %	68.97 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
			Daerah Kabupaten		29			
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	92	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 18 Tahun yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun}} \times 100 \%$	$\frac{67,174}{72,362} \times 100\%$	92.83 %	100 %	
		93	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk 17 tahun ke atas}} \times 100\%$	$\frac{163,564}{170,756} \times 100 \%$	95.78 %	100 %	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)}} \times 100 \%$	$\frac{27}{39} \times 100 \%$	69.23 %	100 %	
		95	Persentase peningkatan status desa maju	$\frac{\text{Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa maju per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun}}{\text{Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)}} \times 100\%$	$\frac{5}{99} \times 100 \%$	5.05 %	5.05 %	
		96	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}} \times 100 \%$	$\frac{144}{144} \times 100\%$	100 %	100 %	
		97	Posyandu	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Aktif}}{\text{Total Posyandu}} \times 100 \%$	$\frac{297}{297} \times 100 \%$	100 %	100 %	
14	Pengendalian Penduduk dan	98	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka Kelahiran per 1000	5x470	2,35	2,35	<u>Ada 2350 kelahiran per 1000</u>

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
				<p>IK2 (Angkutan Sungai, danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersial - Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersial untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, danau dan Penyeberangan : Wilayah yang tingkat pelayanan</p>				
				<p>angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50) Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70) Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi 				

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
				rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5				
		103	Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	V/C Ratio di Jalan Kabupaten	$1.500 : 859.36 = 1.74$	20.88	20.88	
16	Komunikasi dan Informatika	104	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100 % Jumlah PD	15 ---- x 100 % 38	39.47 %	100 %	
		105	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100 % Jumlah Layanan Publik	78 ----- x 100% 114	68,42 %	100 %	
		106	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten ----- x 100 % Jumlah penduduk	192.557 ----- x 100 % 234,936	81,96 %	100 %	
		107	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2 ---- x 100 % 2	100 %	100 %	
		108	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi Kompetensi ----- x 100 % Jumlah ASN Pengelola TIK yang seharusnya tersertifikasi Kompetensi	3 ---- x 100 % 3	100 %	100 %	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	109	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	125 ---- x 100 % 162	77.16 %	100 %	
		110	Meningkatnya Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	3,956	81.29 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
			yang menjadi wirausaha	----- x 100 % Jumlah usaha mikro keseluruhan	----- x 100 % 4,866			
		111	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usa ----- x 100 % Jumlah usaha kecil keseluruhan	5.613 ----- x 100 % 4,868	115.3 %	100 %	
		112	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	135 ----- x 100% 172	78.48 %	100 %	
18	Penanaman Modal	113	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten ----- x 100 % Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten	580 M ----- x 100 % 1,01 T	173.96 %	100 %	
19	Kepemudaan dan Olahraga	114	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten ----- x 100 % Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	35 orang ----- x 100 % 67.384 orang	0.05 %	15 %	
		115	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kabupaten ----- x 100 % jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten	1.584 orang ----- x 100 % 67.387 orang	2,35 %	15 %	
		116	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	11 Medali	11 medali		
		117	Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah Pelatih Olah Raga yang Memiliki Kompetensi di satuan Pendidikan ----- x 100 % jumlah Pelatih Olah Raga yang seharusnya Memiliki	11 ----- x 100%	26,19 %	100%	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
				Kompetensi	42			
20	Statistik	118	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100 % Jumlah PD	38 ----- x 100 % 38	100 %	100 %	
		119	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100 % Jumlah PD	59 ----- x 100 % 59	100 %	100 %	
21	Persandian	120	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100 % Jumlah area penilaian	274 ----- x 100 % 8	34.25 %	100 %	
22	Kebudayaan	121	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan 22 ----- x 100 % Jumlah cagar budaya yang ter data 17	22 ----- x 100 % 39	56.41 %	100 %	
		122	Penyelenggaraan festival seni & budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8	8	8	
23	Perpustakaan	123	Nilai Budaya Baca	Nilai budaya baca		50.4 %	100 %	
		124	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	$x = a'+b'/a+b \times 100\%$ x = persentase naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan a' = naskah kuno yang dikelola dan dilestarikan (eks) b' = koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan (eks) a = koleksi naskah kuno yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks) b = koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (eks)	0+47 ----- x 100 % 0+47	100 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		125	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ----- x 100 % Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	17.055 ----- x 100 % 30,128	58,61 %	100 %	
24	Kearsipan	126	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	1. $T = (a + i + s + j)/4$ T= tingkat ketersediaan arsip a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip i = persentase arsip in aktif yg telah dibuatkan daftar arsip s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	$T = (100 + 100 + 100+0)/4$ $T = 75$	75	150	
		127	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan	$T = (m + b + g + a + c + i)$ $T = (0 + 0 + 1.063 + 0 + 89 + 0)/6$	192	192	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
				dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	T = 192			
URUSAN PILIHAN								
25	Kelautan dan Perikanan	128	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten (sumber data: one data KKP)	15.088,5 ----- x 100 % 14,37	105 %	100 %	
		129	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional ----- x 100 % Jumlah Tempat Pelelangan Ikan	0	0	0 %	Kab. HSS belum memiliki Tempat Pelelangan Ikan dari Dinas Perikanan
26	Pariwisata	130	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1	698 ----- x 100 % 688	101,45 %	100 %	
		131	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) ----- x 100 % Jumlah wisatawan tahun n-1	338.169 -----x 100 % 283,259	119,38 %	100 %	
		132	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual ----- x 100 %	10,688 -----x 100 %	347,92 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
				Jumlah kamar yang tersedia	3,072			
		133	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- x 100 % Jumlah total PDRB	161.701,44 -----x 100% 4.470.183,19	3,61 %	3,61 %	
		134	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata ----- x 100 % Jumlah total PAD	565.906.000 ----- x 100 % 5.671.876,1	4,55 %	4,55 %	
27	Pertanian	135	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun ----- x 100 % Luas Panen	267,17 ----- x 100 % 54,819	487.387 %	487.387 %	
		136	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- x 100 % Jumlah total PDRB	1.546.864,49 ----- x 100 % 6.169.207,46	25,07 %	46,7 %	
		137	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) ----- x 100 % Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	1 ----- x 100 % 1	100 %	100 %	
28	Perdagangan	139	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ----- x 100 % Jumlah total PDRB	9,35 ----- x 100 % 9,35	100 %	100 %	
		140	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100 % Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten	3.409 ----- x 100 % 3,445	98.95 %	100 %	
		141	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi Pupuk ----- x 100 % RDKK	3.753.85 ----- x 100 % 17,028	26.58 %	100 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		142	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100 % jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten	3.107 ----- x 100 % 4,019	77.30 %	100 %	
29	Perindustrian	143	Pertambahan jumlah industri Kecil di Kabupaten	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) ----- x 100 % Jumlah industri besar tahun n-1	77 ----- x 100 % 77	100 %	100 %	
		144	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Jumlah Jenis Industri Prioritas Kabupaten ----- x 100 % Jumlah Jenis Industri Prioritas Nasional	6 ----- x 100 % 8	75 %	100 %	
		145	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	1 -----x 100 % 1	100 %	100 %	
		146	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	0	0	0	Dengan surat pernyataan bukan kewenangan Kab/Kota untuk Industri kecil menengah
		147	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100 % Jumlah izin yang dikeluarkan	0	0	0	Dengan surat pernyataan bukan kewenangan Kab/Kota untuk Industri kecil menengah
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	4	4	4	
		2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD ----- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	131 ----- x 100 % 131	100 %	100 %	
		3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan ----- x 100 % Jumlah APBD	367.169.731.629 ----- x 100 % 1.571.078.437.131	18.55 %	18.55 %	
		4	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- x 100 % Jumlah PDRB non migas	146.339.734.986 -----x 100 % 3.848.089.100.000	3.80 %	3.80 %	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures ----- X 100% jumlah belanja APBD	447.016.365.735- 200.423.705.000 -----x 100 % 1.571.078.437.131.	15.70 %	15.70 %	
		6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	ada	ada	ada	Level 3
		7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	ada	ada		Level 3
		8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n ----- x 100 % jumlah kontrak keseluruhan tahun n	1 ----- x 100 % 105	0.95 %	0.95 %	- Paket Nilai Kontrak : Rp. 29.514.513.000 (Belanja Pembangunan Gedung Rawat inap 3 Lantai) - 105 Paket Pekerjaan Konstruksi

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- x 100 % Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	129 ----- x 100% 655	19.69 %	100 %	- 129 paket standar - 655 pengadaan langsung
		10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan ----- x 100 % Total belanja langsung	269.726.012.465 ----- x 100 % 699.777.553.961	38.54 %	100%	
		11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (di luar guru dan tenaga kesehatan) ----- x 100 % Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	187 ----- x 100 % 1,947	9.6 %	9.6 %	
		12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100 % Seluruh jumlah pegawai non Fungsional PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	150 ----- x 100 % 1,760	8.52 %	8.52 %	
		13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi ----- x 100 % Total belanja APBD dikurangi satu	1.405.174.024.055 -----x 100 % 1.571.078.437.131	89.44 %	100 %	
		14	Assets management	1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);	1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	1. 100% 2. 100 % 3. 100% 4. 100%	1. 100% 2. 100% 3. 100% 4. 100%	
		15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA ----- x 100 % Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya	187.236.234.872,38 -----x 100 % 1.380.930.128.215	13.56 %	13.56 %	

NO	URUSAN	NO.	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CARA PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA Tahun 2019	Target	KETERANGAN
		16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di <i>website</i> Pemda ----- x 100 % Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di <i>website</i> Pemda	1.186.780.000,00 ----- x 100 % 901.619.788,00	131.62 %	131.62 %	
		17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di <i>website</i> Pemda ----- x 100 % total jumlah dokumen yang telah dirinci	840 ----- x 100 % 840	100 %	100 %	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								
		1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	ada	5	5	
		2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	ada	1	1	

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan 2020 (diolah)

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran umum tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan menyebutkan bahwa salah satu prioritas pembangunan Kalimantan Selatan adalah “Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi & Sosial Budaya”.

Begitu juga dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menitik beratkan pada pengembangan sektor agrobisnis melalui urusan pertanian. Urusan Pertanian ini bertujuan untuk meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian.

Secara umum struktur ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbentuk dan di dominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Peran sektor pertanian terhadap seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 47,68%. Hal ini dikarenakan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berada di daerah pedesaan.

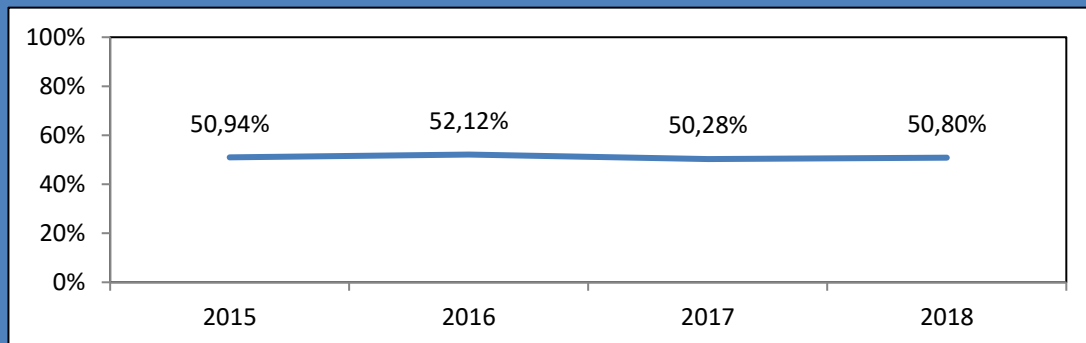
Mata pencaharian didominasi oleh bidang pertanian dan perkebunan, yakni mencapai 16,95% dari keseluruhan jumlah penduduk yang dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian. Sehingga peran pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki dua peran sekaligus tantangan yakni mendukung pemenuhan pangan bagi penduduk Hulu Sungai Selatan serta memberikan lapangan kerja bagi rumah tangga tani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sebagai sektor yang menjadi tumpuan bagi ketahanan pangan dan mata pencaharian sebagian rakyat, maka pembangunan pertanian merupakan generator bagi pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Potensi pertanian secara umum dapat ditinjau dari potensi sumber daya produksi dan potensi pasar. Potensi produksi pangan terutama dapat dilihat dari cukup besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur. Berdasarkan pemanfaatan lahan yang digunakan oleh petani, mulai dari kawasan selatan ke

arah utara yang melebar ke arah barat merupakan daerah potensi tanaman bahan makanan.

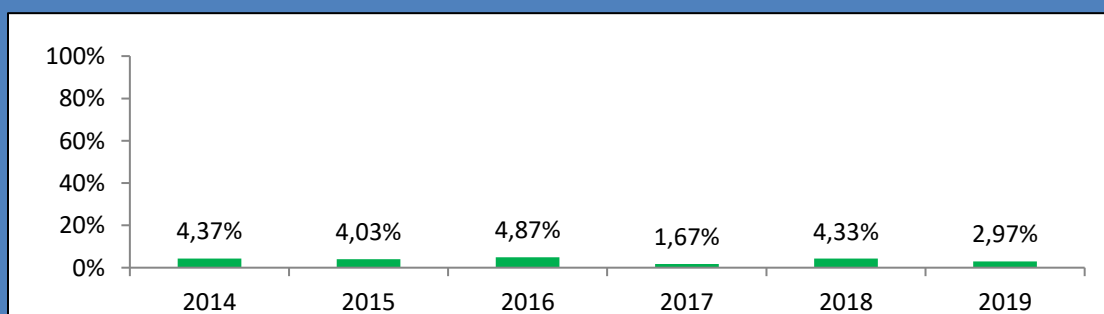
Gambar 2.13
Peningkatan Capaian Indikator Produktifitas padi
Kabupaten Hulu Sungai selatan



Sumber : Dinas Pertanian Kab. Hulu Sungai Selatan

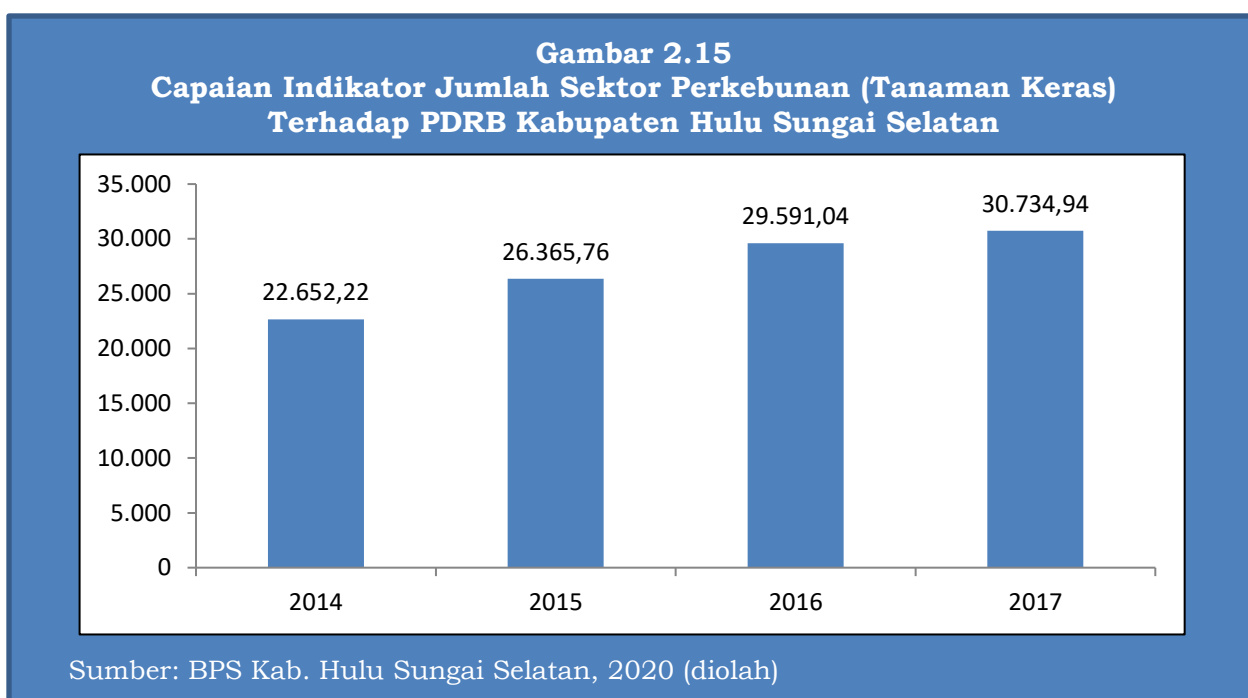
Realisasi di tahun 2015-2018 mengalami peningkatan tidak signifikan, hal ini dikarenakan besarnya jumlah lahan sawah produktif yang subur saat ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh kondisi tanah yang kekurangan organik, dan hama penyakit. Selain itu, tidak signifikannya kenaikan realisasi ini juga dikarenakan oleh kondisi alam yang tidak menentu, terbatasnya aspek permodalan, serta sistem tebas dan ijin pada lumbung. Dengan demikian upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna meningkatkan produktivitas padi atau bahan pangan utama lainnya secara signifikan dengan cara peningkatan intensifikasi berkelanjutan yang ditekankan pada pemulihan lahan serta sarana dan prasarana produksi.

Gambar 2.14
Indikator Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan
Terhadap PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: BPS Kab. Hulu Sungai Selatan, 2020 (diolah)

Kondisi yang fluktuatif demikian disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan rendahnya nilai tukar pertanian dibandingkan dengan nilai tukar non agraris. Sehingga upaya yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja urusan pertanian pada periode berikutnya adalah dengan mengimplementasikan regulasi secara konsisten serta meningkatkan nilai tambah produk pertanian terutama pangan.

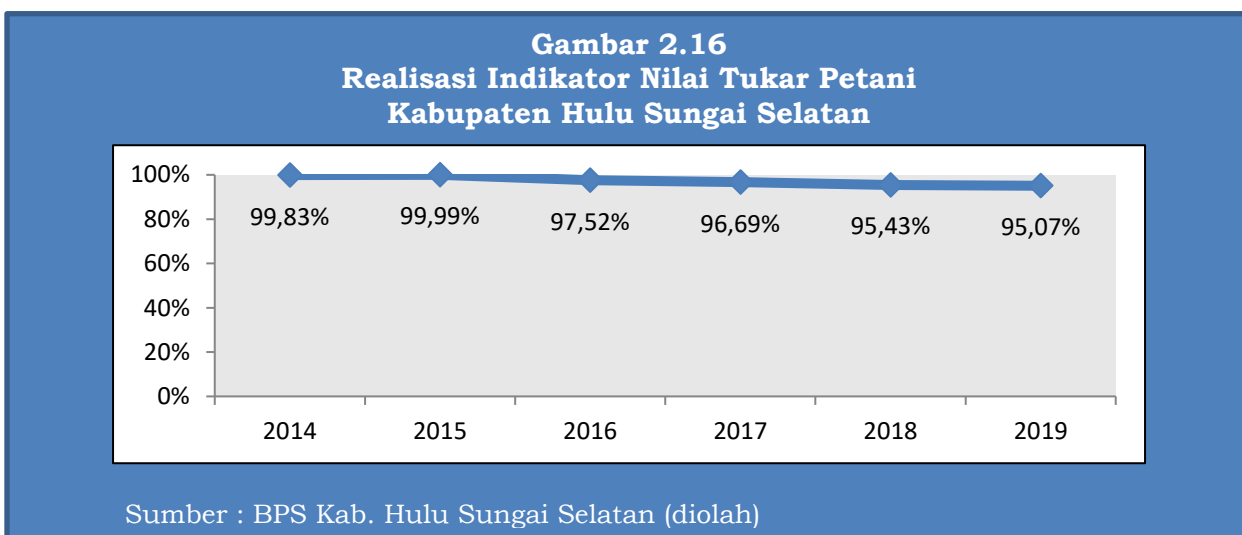


Kondisi yang sama juga terjadi pada capaian indikator jumlah sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB di tahun 2014 dari 22.652.2, di tahun 2015 menjadi 26.365.76, namun pada tahun 2016 kembali meningkat hingga mencapai 29.591.04 dan tahun 2017 tercapai sebesar 30.734.94. Tidak stabilnya kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB dikarenakan komoditas perkebunan masih didominasi dengan tanaman tua yang cenderung kurang produktif. Untuk itu, upaya yang perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut yakni dengan memfasilitasi kelompok perkebunan melalui sarana dan pembibitan, serta diversifikasi komoditas dan peremajaan tanaman. Hal ini guna menghadapi tantangan persaingan harga komoditas di pasar global yang cenderung fluktuatif.

Para pemuda masih banyak yang enggan terjun sebagai tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga tidak menutup kemungkinan kelangkaan atau menurunnya tenaga kerja sektor pertanian terjadi. Di sisi lain, kenaikan kontribusi produksi kelompok petani yang tidak signifikan terhadap PDRB juga dikarenakan menurunnya produktivitas tanah dan komoditas. Guna menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka perlu perbaikan manajemen

kelembagaan kelompok tani serta meningkatkan produktivitas lahan dan komoditas.

Meskipun demikian capaian ini masih tergolong kecil, sebab partisipasi kelompok tani masih rendah dan terbatasnya tenaga penyuluh. Sehingga peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi petani sangat diperlukan sebagai upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator nilai tukar (*term of trade*) dari produk pertanian terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani maupun biaya produksi dan pembentukan barang modal.



Pada indikator nilai tukar petani menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2014 yaitu 99,83%, menjadi 99,99% pada tahun 2015, mencapai 97,52% pada tahun 2016 dan tahun 2017 capaian sebesar 96,69% dan terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan 2019 menjadi 95,07%.

Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh petani yakni mahal nya harga sarana produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberikan subsidi atau insentif bagi petani.

Dapat disimpulkan secara umum, indikator kinerja urusan pertanian telah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pembangunan pengairan ditujukan untuk menunjang produksi pertanian, khususnya untuk meningkatkan produksi pangan.

Sebagai upaya agar daya saing daerah dapat meningkat dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian dapat terwujud maka upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan di antaranya sebagai berikut:

- a. Peningkatan intensifikasi secara berkelanjutan serta penekanan pada sarana dan prasarana produksi padi atau bahan utama pangan lokal;
- b. Upaya secara konsisten terhadap upaya mempertahankan ketahanan pangan daerah melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan pemberian subsidi dan insentif bagi petani;
- c. Fasilitasi kelompok pertanian/perkebunan melalui sarana dan pembibitan, diversifikasi komoditas dan peremajaan tanaman;
- d. Perbaiki manajemen dan kelembagaan kelompok tani, meningkatkan produktivitas lahan dan komoditas; dan
- e. Peningkatan pembinaan dan pelatihan bagi petani.

Kemampuan ekonomi daerah menggambarkan kapasitas ekonomi daerah memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiplier effect* bagi peningkatan daya saing daerah.

2. Ekonomi Kreatif

Keberadaan ekonomi kreatif yang diprediksi mampu memicu daya saing daerah. Hingga saat ini, pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi masih menjadi persoalan klasik yang memerlukan solusi. ekonomi kreatif merupakan ide/gagasan yang diharapkan memberi nilai tambah ekonomi.

Ekonomi kreatif merupakan alternatif solusi permasalahan perekonomian. Namun dalam penyelenggaraannya sering kali menemui kendala. Pemerintah maupun pemerintahan daerah telah membangun komitmen, membenahi regulasi, dan mengaktualisasikan ekonomi kreatif, sehingga keberadaan ekonomi kreatif dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah dan bahkan nasional.

Bentuk-bentuk ekonomi kreatif selalu tampil dengan nilai tambah yang khas, menciptakan " pasar " nya sendiri, dan berhasil menyerap tenaga kerja serta pemasukan ekonomis.

Dengan sejumlah keunikannya, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kota kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif dapat dilakukan seiring dengan pengembangan wisata.

Kota-kota wisata di Indonesia, sebenarnya telah memiliki ruang kreatif termasuk dalam hal ini KSPN Loksado. Atraksi wisata dapat menjadi sumber ide-ide kreatif yang tidak akan pernah habis untuk dikembangkan. Proses kreativitas seperti pembuatan souvenir dapat menjadi atraksi wisata tersendiri yang memberikan nilai tambah.

Sementara di sisi lain, pasar yang menyerap produk ekonomi kreatif telah tersedia, yaitu melalui turis atau wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata.

Globalisasi dan perdagangan global merupakan suatu hal yang tidak terelakkan dari kemajuan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat telah mengaburkan batas-batas wilayah karena satu wilayah dapat terhubung dengan wilayah lainnya dalam satu waktu yang sama.

Pentingnya informasi era ini kemudian menimbulkan ekonomi informasi, yaitu kegiatan ekonomi yang berbasis pada penyediaan informasi. Setelah hampir sebagian besar wilayah di dunia terhubung pada era ekonomi informasi, tantangan globalisasi menjadi semakin nyata. Dalam konteks globalisasi, daya saing merupakan kunci utama untuk bisa sukses dan bertahan.

Daya saing ini muncul tidak hanya dalam bentuk produk dalam jumlah banyak namun juga berkualitas. Kualitas produk tersebut dapat diperoleh melalui pencitraan ataupun menciptakan produk-produk inovatif yang berbeda dari wilayah lainnya. Berikut disajikan tabel pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020:

Tabel 2.22**Pelaku Ekonomi Kreatif Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020**

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
1	M. Ihsan	Jln. Haryono Mt. No.125 RT.10, Kandangan Kota Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Developer Aplikasi
2	Angga Irwinsyah	Jln. Teratai Perumnas Hamalau Permai Gang Kastela No.84 RT.002 RW.001 Kec. Sungai Raya, Kab. HSS Kode Pos 71271 Provinsi Kalimantan Selatan	Fotografi & Video
3	Muhammad Mushawwir	Jln. Kolonel Sugiono No.1, Kel. Kandangan Barat Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	desain grafis, foto dan video
4	Didi Rokhyadi	Jln. Mesjid Darul Khalik No.40 Kec. Kandangan, Kab. HSS Kode Pos 71214 Provinsi Kalimantan Selatan	Desain Grafis/Komunikasi Visual
5	Achmad Muhammad Rifky Maulana	Jln. Kemuning Perumnas Kalian Asri No. 89 RT/RW. 008/004 Kandangan Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Film, Animasi dan Video, Design Grafis + <i>Product Treatment</i>
6	M. Indra Wibawa	Jln. Murni No.37 RT.003 RW.002 Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS Prov. Kalimantan Selatan Kode Pos 71271	Fotografi
7	Muhammad Anis	Simanisstudio, Simpang Tiga Gor Aluh Idut Parincahan Kandangan Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Fotografi
8	Muhammad Alfianur Huda	Jln. Kap. F. Tendean No.33 RT.003 LK.II Jambu Hilir, Kandangan Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Film, Animasi dan Video
9	Abdiansyah	Desa Kapuh RT.002 RW.001 Kec. Simpung Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Radio
10	Cardana Triangguli Adha	Jln. KRI. P. Rempang No. 14 Sawotratap - Gedangan, Sudoarjo	Arsitektur
11	Wahyu Abdi Maulana	Jln. Melati No. 33 RT.001 RW.001 Kandangan Utara Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Arsitektur
12	M. Atailah	Jln. H. R. Sukadani Tabihi Kec. Padang Batung Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Musik
13	Jazuli	Desa Banua Hanyar RT. 009 Jambu Hilir Kandangan Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Musik
14	Muhammad Ferry Fauzan, S.Pd	Jln. Brigiend H. Hasan Baseri RT.002 RK.001 Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
15	Ade Akbar Muttaqin	Kandangan Hulu 2 Kandangan Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Musik

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
16	Muhammad Wira Taqwa	Jln. Bukhari Desa Tibung Raya Kec. Kandangan Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Musik
17	Hayatun Nafisa, S.Pd	Jln. Brigjend H. Hasan Baseri RT.002 RK.001 Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
18	Rahmat Saleh, S.Pd	Sungai Raya RT.003 RW.002 Desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Musik
19	Herni Erawati, S.Pd	Jln. H. M. Yusi RT.001 RW.001 Kec. Kandangan Utara Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
20	Anita Fitriana Sari, S.Pd	Jln. Brigjend H. Hasan Basery No.39 RT.002 RW.001 Desa Jembatan Merah Kec. Kab. Padang Batung Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
21	Hendra Wahyuni	Jln. Brigjend H. Hasan Baseri RT.002 RK.001 Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
22	Della Rieka Silvina	Gambah Dalam Perumnas Griya Citra Jasmine No.22 Kandangan Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
23	M.Zakaria	Desa Ida Manggala Kec. Sungai Raya No. 21 RT/RW. 001/001 Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
24	Muhammad As'ad	Jln. Singakarsa RT.001/RW.001 Kandangan Barat Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Musik
25	Aqila Nor Ramadhana	Jln. Brigjen H. Hasan Baseri RT.002 RW.001 Jembatan Merah Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Jasa Konsultan
26	Farah Aghnet, S.Pd	Karang Jawa Muka RT.001 RW.001 Kec. Padang Batung Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
27	M. Riduan	Jln. Brigjend H. Hasan Basery No.39 RT.002 RW.001 Desa Jembatan Merah Kec. Padang Batung Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Seni Pertunjukan
28	Abdurrahman Farisi	Jln. Singakarsa / Perumahan Kalian Asri Kandangan Barat Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	<i>Videography Cinematic</i>
29	Muhammad Harie Burrahim	Jln. A.Yani Tumpang Talu No.120 Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	Musik
30	Damang	Jln. Singakarsa/Pandai Tengah Kandangan Kab. HSS Provinsi Kalimantan Selatan	<i>Photography</i>
31	WARUNG SEAFOOD "DIANA"	Jl. Budi Bakti, RT.002 RW.001, Desa Tibung Raya, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
32	KATERING "IDAWATI"	Desa Sarang Halang RT.002 RW.001 Kec. Sungai Raya - Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
33	"KULINER TRAVEL"	Jl. Al Falah Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan - Kab. Hulu Sungai Selatan	Kuliner
34	MOBILE CULINARY "DAPUR PANGLIMA"	Jl. Pemuda Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan - Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
35	WARUNG MAKAN "LUTPI"	Jl. Toba RT.03 RW.02 Desa Wasah Hulu Kec. Simpur - Kab. Hulu Sungai Selatan	Kuliner
36	DEPOT "REZEKI"	Jl. Panglima Batur, RT.017 LK.008, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
37	CAFE STAR APG "AYAM PENYET GALU"	Jl. Jend. Sudirman, RT.003 RW.001, Desa Hamalau, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
38	"JAMAH" CATERING	Jl. Kertak Hanyar, RT.003 RW.002, Desa Tumbukan Banyu, Kec. Daha Selatan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
39	WARUNG MAKAN "MASFUFAH"	Jl. Al Falah, RT.003 RW.001, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
40	WARUNG MAKAN 'NOOR REZEKI'	Jl. Lingkungan Mesjid Al-Hidayah, RT.003 RW.002, Desa Kapuh, Kec. Simpur, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
41	"DAPUR PANGLIMA"	Jl. Rahmah Bahran Kel. Kandangan Barat, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
42	CAFE "NATASYA"	Jl. Jend. A. Yani Km.2, RT.006, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
43	CATERING "AL-ZAHRA"	Jl. Pantai Raya, RT.004/RW.002, Desa Sungai Raya Selatan, Kec. Sungai Raya, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
44	"ARSA KATERING"	Jl. Komp. Pondok Kelapa, RT.007 RW003, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
45	DEPOT "BAKMI SATRIA"	Jl. A. Yani, RT.018/RW.009, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
46	CAFE NANDA	Jl. H. M. Yusi, RT.01/RW.01, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
47	CAFE NGIDAM	Jl. Rahmah Bahrn RT.01/RW.01, Kel. Kandangan Barat, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
48	DEPOT MAYDA	Jl. Pahlawan RT.019/RW.003, Kel. Kandangan Utara, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
49	WARUNG "MAMA FUJI"	Jl. A. Yani Km. 3,7 RT.002/RW.001, Desa Gambah Luar, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
50	CHICKEN PLANET	Jl. Al-Falah, RT.001/RW.001, Kel. Kandangan Kota, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
51	ROYAL GALAXY CAFE	Jl. H. M. Yusi RT.004 RW.002 Desa Gambah Luar Muka, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
52	CATERING HIKMAH	Jl. Ganda RT.08/RW.04 Desa Baluti, Kec. Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
53	Warung Ketupat Mama Husna	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
54	Warung Ketupat Mama Rini	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
55	Warung Ketupat Mama Ading	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
56	Warung Ketupat Aulia	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
57	Warung Ketupat Rezky	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
58	Warung Ketupat Mama Rayyan	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
59	Warung Ketupat Kaganangan	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
60	Warung Ketupat Mayang Marias	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
61	Warung Ketupat Sederhana	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
62	Warung Ketupat Citra	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
63	Warung Ketupat Aisyah	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
64	Warung Ketupat Mama Latifah	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
65	Warung Ketupat H.Amat	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
66	Warung Ketupat Hj.Irus	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
67	Warung Ketupat Mama Fatimah	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
68	Warung Ketupat Aina	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
69	Warung Ketupat Hamalau	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
70	Warung Ketupat Azkia	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
71	Warung Ketupat Inayah	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
72	Warung Ketupat Alisya	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
73	Warung Ketupat Hj.Erna	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
74	Warung Ketupat Hj. Sur'ah	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
75	Warung Ketupat Muara Ambarai	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
76	Warung Ketupat Noryani	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
77	Warung Ketupat Mama Khalid	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
78	Warung Ketupat Rahma	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
79	RM. Hj Hani	Jl. A.Yani Simpang 5 (depan SAMSAT) Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
80	Soto Banjar Hj. Idah	Jl. A.Yani Simpang 5 Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
81	RM. Adya	Jl. A.Yani Simpang 5 Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
82	Warung Makan Sinyo	Jl. A.Yani Simpang 5 Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
83	Seafood Samira	JL. A. Yani Km 2 Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
84	Seafood Suwarjo	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
85	Essence Café	Jl. A. Yani Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
86	Sate Ayam dan Itik Jainuri	Padang Panjang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
87	Warung Mama ITAI	Jl. A. Yani Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
88	Nasgor Podomoro	Jl. A. Yani Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
89	Seafood Sumberdadi	Jl. A. Yani Simpang lima Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
90	Rumah Makan Goyang Rasa	Jl. A.Yani Simpang 5 Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
91	Wong Solo	Jl. A.Yani Simpang 5 (depan SAMSAT) Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
92	Warung Makan Mama Helma	Jl. A.Yani Simpang 5 Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
93	Warung Makan Ayam Penyet Azizah	Jl.A.Yani Tumpang Talu Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
94	Warung Makan Ayam Penyet Surabaya	Jl.A.Yani Tumpang Talu Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
95	Warung Ketupat Aulia	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
96	Warung Makan Alisa	Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
97	Warung Makan Isnaniah	Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
98	Rumah Makan Bin Ali	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
99	Warung Makan H.Emin	Jl.A.Yani Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
100	Seafood (Mimin)	Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
101	Warung Makan (Hamsiah)	Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
102	Warung Makan (Inud)	Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
103	Warung Makan (Titi)	Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
104	Warung Makan (Amrul)	Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
105	Rumah Makan Monalisa	Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
106	Warung Pilkada	Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
107	Warung Makan Mama Nida	Jl.A.Yani Gambah Luar Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
108	Warung Makan Mama Puji	Jl.A.Yani Bakarung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
109	Warung Makan Putera Minang	Jl.A.Yani Bakarung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
110	Warung Makan Gambah Luar	Jl.A.Yani Bakarung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
111	Warung Makan Nayla	Jl.A.Yani Bakarung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
112	Rumah Makan Mama Ipah	Jl.A.Yani Bakarung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
113	Bakso Adil	Jl.Jend Sudirman - Lap Kompi C Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
114	Warung Makan Sate Kambing Barokah	Jl.Jend Sudirman Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
115	Rumah Makan Takana Juo	Jl.Jend Sudirman Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
116	Warung Sate Mama Asna	Amawang Kiri Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
117	Warung Makan Bu Sri	Jl. Musyawarah Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
118	Warung Makan Mama Ayu	Jl. Musyawarah Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
119	Warung Makan Pecel Ibu Endang	Jl. Musyawarah Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
120	Kedai MSR	Jl. Musyawarah Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
121	Medium Café	Jl. Musyawarah Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
122	Warung Makan Annisa	Jl.Musyawah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
123	Warung Makan Lia	Durian Sumur Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
124	RM. Ranah Minang	Jl. Panglima Batur Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
125	RM. Rezeki 1	Jl. Panglima Batur Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
126	RM. Kalijo	Jl. H. M. Rusli Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
127	Warung Makan Mama Ifan	Jl. Brigjend Katamso Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
128	Warung Makan Hj. Ayung	Jl. Panglima Batur Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
129	RM. Abadi 5	Jl. Aluh Idut Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
130	Warung Soto (Lilik)	Jl. Aluh Idut Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
131	Warung Makan Hj. Iyan	Jl. Aluh Idut Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
132	Bubur Ayam Bandung	Jl. Aluh Idut Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
133	Warung Makan Udin	Jl. Aluh Idut Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
134	Warung Tenda Biru	Jl. Aluh Idut Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
135	Bakso SIS	Jl. Aluh Idut Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
136	Bakso Timbul	Simp 3 Aluh Idut Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
137	RM. Abadi 2	Jl. Brigjend H. Hasan Basry Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
138	Warung Makan Simp 4 Bilui	Jl. Al Falah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
139	RM. Rezeki 2	Jl. Al Falah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
140	RM Kandangan Fried Chicken	Jl. Al Falah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
141	RM. Noor Rezeki	Jl. Al Falah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
142	RM. Abadi 3	Karang Jawa Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
143	RM. Nurul (itik panggang)	Jl. Brigjend HM. Yusi Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
144	RM. Candana	Jl. Brigjend HM. Yusi Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
145	RM. Hj. Sanah	Jl. Brigjend HM. Yusi Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
146	RM Pondok Tepi Sawah	Jl. Brigjend HM. Yusi Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
147	RM W2	Jl. Brigjend HM. Yusi Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
148	RM Xjo	Jl. Merdeka Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
149	Warung Makan Maida	Jl. Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
150	Warung Makan Mama Upik	Jl. Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
151	Depot Sarah (Ayam Penyet)	Jl. Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
152	Depot Ma'e Bersaudara	Jl. Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
153	Rocket Chicken	Jl. Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
154	Depot Anis	Jl. Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
155	Warung Makan Kiki	Jl. Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
156	Bubur Ayam Bandung 04	Jl. Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
157	RM Minang Raya	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
158	Warung Makan Pa Udin	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
159	Warung Makan Kalasan Ulfa	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
160	Pondok Kuliner	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
161	Warung Makan Lamongan Jaya	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
162	Depot Atma	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
163	RM. Borobudur	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
164	RM Sate Kambing Bundaran	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
165	AYAM PENYET BUNDA	JL A YANI Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
166	Warung Makan Fadil	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
167	Warung Makan Andi	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
168	Warung Makan Ma'i	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
169	Warung Ketupat Hamalau	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
170	Warung Ketupat Azkia	Jl.Jend Sudirman Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
171	Warung Ketupat Isna	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
172	Warung Ketupat H. Sur'ah	Desa Karasikan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
173	Bakso Salam	JL. A Yani Gambah Luar Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
174	Warung Sawah	JL. H. M.Yusi Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
175	RM Padang	JL. A Yani Gambah Luar Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
176	Bakso	JL. A Yani Gambah Luar Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
177	Bakso (Fian)	Pahlawan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
178	Seafood (CITA RASA)	Pahlawan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
179	Seafood (Edy)	Pahlawan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
180	Mie Ayam PA MAN	Jl. Panglima Batur Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
181	Bakso Setan	Jl. Panglima Batur Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
182	WR Nasi Kuning Agus	Jl. Pemuda Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
183	Warung Makan (Masliani)	Tumpang Talu Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
184	Warung Makan (Rizal)	Tumpang Talu Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
185	Seafood (Nirraji)	Tumpang Talu Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
186	Bakso (Mursyid)	Jl. Brigjend Katamso Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
187	Rumah Makan Putra Minang	Jl. Melati Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
188	Soto Lamongan Mas ALDO	Jl. Melati Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
189	Nasi Kuning KOPINDAG	Jl. Nusa Indah Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
190	Seafood CAK WAHYU	Jl. S Parman Dursum Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
191	Seafood Hoki Lamongan	Jl. Merah Joansyah Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
192	Sate Abadi dpn Loksado	Jl. Letjend Soeprato Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
193	Rumah Makan H. Ikur	Jl. Merdeka Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
194	Sate Abadi dpn Loksado	Jl. Merdeka Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
195	Bakso Mi Rasa	Jl. Al Falah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
196	Warung Makan Mama Lana	Jl. Al Falah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
197	Warung Makan SAHABAT	Jl. Al Falah Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
198	Seafood Pelangi	Karang Jawa Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
199	Seafood HOKI	Simp 4 Muara Banta Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
200	Rumah Makan jodoh	Jl. H. Hasan Basry Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
201	Masakan Padang	Loklua Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
202	Warung Makan (Sanusi)	Loklua Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
203	Warung Soto (Udin)	Loklua Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
204	Warung Makan (Norliana)	Loklua Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
205	Warung Makan ANI	Padang Panjang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
206	Warung Makan (Jubaidah)	Padang Panjang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
207	Bakso (JAZULI)	Padang Panjang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
208	Bakso (M. SALEH)	Padang Panjang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
209	Bakso (SUKINO)	Simpang 4 Yonif Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
210	Warung Makan (MAHARANI)	Simpang 4 Yonif Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
211	Seafood (SAMPURI)	Simpang 4 Yonif Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
212	Warung Makan (SASI)	Lap. Yonif Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
213	Bakso (Adil)	Lap. Yonif Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
214	Depot Barokah (FIRMANTO)	Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
215	Warung ARTOMORO	Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
216	Warung Makan (H. Surya Darma)	Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
217	Seafood (Kalista)	Amawang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
218	Seafood Putri Izza	Tibung Raya SMA 1 Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
219	Warung Makan (NorLatifah)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
220	Warung Makan (Ritni)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
221	Warung Makan (A. Karim)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
222	Warung Soto (Umar)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
223	Warung Ketupat Siti Aminah	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
224	Warung Makan (Hj. Jubaidah)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
225	Seafood (Inkan)	Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
226	Warung Makan (Teja)	Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
227	Warung Makan (Maryati)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
228	Warung Makan (H. Sahran)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
229	Seafood (Asbudi)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
230	Kedai Etnik	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
231	Warung Makan (H. Hudaini)	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
232	Warung Makan Adam	Jl. Jend Sudirman Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
233	Warung Ketupat Mama Khalid	Jl. Jend Sudirman Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
234	Bakso Surabaya	Loklua Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
235	Sate Ayan dan itik (Abd. Syukur)	Padang Panjang Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
236	Ayam Panggang Orang Nagara	Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
237	Depot Nanda	Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
238	Ayam Penyet	Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
239	Warung Makan Mama Aulia	Tibung Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
240	Warung Makan Jawa Blitar	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
241	Seafood Ivan	Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
242	Warung Makan Mama Nita	Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
243	Warung Makan Depan Toko Jahit	Parincahan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
244	Warung Makan Soto	Simpang Lima Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
245	Warung Makan Bandung (ABG)	Simpang Lima Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
246	Warung Makan Ayam Penyet Az Zahra	Gambah Luar Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
247	Warung Makan Risma	Gambah Luar Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
248	Bakso Erwan	Bakarung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
249	Seafood Jono	Gambah Luar Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
250	Warung Mie Level	Dekat Mesjid Istiqamah Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
251	Warung Makan Hj. Jannah	Sungai Kudung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

NO.	NAMA	ALAMAT	SUB SEKTOR EKRAF
252	Seafood Lamongan	Sungai Kudung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
253	Bakso ADR	Sungai Kudung Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
254	Seafood Anugerah	Durian Sumur Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
255	Ayam Geprek	Hamalau Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
256	Kantin Setda	Setda HSS Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner
257	Warung Makan Padang Asura	Jln. Jend. Sudirman RT. 005 RW.002 Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kal Sel	Kuliner

Sumber : Disporapar Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (diolah)

3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.

Pada indikator perhubungan, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Tahun 2013 -2014 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 0,005 dan sebesar 0,004 di tahun 2015-2017. Nilai rasio panjang jalan tersebut menunjukkan bahwa panjang jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih mampu menampung jumlah kendaraan/ arus barang dan jasa disektor perekonomian.

Secara ekonomi hal tersebut menunjukkan ketersediaan infrastruktur jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih baik dan mampu menampung

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan untuk indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/terminal per tahun, tahun 2013 sebanyak 3.520 orang, tahun 2014 sebanyak 3.320 orang, tahun 2015 sebanyak 3.633 orang, dan tahun 2016 sebanyak 2.794 orang. dan pada tahun 2017 sebanyak 3.208 orang. Peningkatan jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi dan distribusi barang dan jasa yang semakin tumbuh. Pada indikator tata ruang, ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong baik. Perkembangan luas wilayah produktif dapat diketahui dari tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Luas Wilayah Produktif Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018

No.	Jenis Pengguna Lahan	Satuan	Luas Wilayah Produktif					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Sawah	Ha	33.452,3	44.294,00	44.294,00	44.294,00	44.294,00	44.294,00
2	Ladang	Ha	11.369,41	8.983,00	8.983,00	8.983,00	8.983,00	8.983,00
3	Kebun Campuran	Ha	1.744,25	1.744,25	1.744,25	1.744,25	1.744,25	1.744,25
4	Kebun Karet	Ha	15.838,03	10.906,94	10.906,94	10.906,94	10.906,94	10.906,94
5	Hutan	Ha	49.859,62	55.382,33	55.382,33	55.382,33	55.382,33	55.382,33
Jumlah		Ha	112.263,61	121.310,52	121.310,52	121.310,52	121.310,52	121.310,52

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Tabel 2.24
Luas Wilayah Perkotaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019

No.	Kawasan Perkotaan	Satuan	Luas Wilayah Perkotaan					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kandangan	Ha	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138	2.138
2	Loksado	Ha	-	-	926,00	926,00	926,00	926,00
3	Daha Selatan	Ha	-	-	-	3.923,40	3.923,40	3.923,40
4	Sungai Raya	Ha	-	-	-	1.960,12	1.960,12	1.960,12
Jumlah		Ha	2.138	2.138	3.064,00	8.947,2	8.947,2	8.947,2

Sumber : Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Fasilitas wilayah dan infrastruktur yang telah terbangun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Realisasi Indikator Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Perhubungan								
	1.1	Panjang jalan	KM	980,140	989,93	989,94	998,73	859,36	880,56
	1.2	Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan Umum	Orang	108.000	120.825	108.010	95.725	80.150	303.519
	1.3	Jumlah orang/barang Melalui dermaga/bandara/ Terminal per tahun	Orang	3.320	3.633	2.794	3.208	3.150	2.975
2.	Penataan Ruang								
	2.1	Ketaatan terhadap RTRW	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	2.2	Luas wilayah produktif	Ha	112.2634	121.311	121.311	121.311	121.311	121.311
	2.3	Luas wilayah industri	Ha	-	-	-	-	-	-
	2.4	Luas wilayah kebanjiran	Ha	-	-	-	-	-	-
	2.5	Luas wilayah kekeringan	Ha	-	-	-	-	-	-
	2.6	Luas wilayah perkotaan	Ha	2.138	2.138	3.064	8.947,52	8.947,52	8.947,52
3.	Bank, Asuransi dan Perhotelan								
	3.1	Jenis dan jumlah bank dan Cabang	Bank	2	3	4	6	6	6
	3.2	Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	Perusahaan	7	7	6	6	6	6
	3.3	Jenis, kelas dan jumlah restoran	Restoran	114	116	105	212	225	276
	3.4	Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel	Hotel	14	13	13	19	20	20
4.	Lingkungan Hidup								
	4.1	Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	Rumah Tangga	14.812	15.382	16.276	16.906	17.154	17.675
5.	Jaringan Listrik								
	5.1	Jumlah Pelanggan Listrik	Rumah Tangga	51.976	53.964	56.698	61.971	65.663	53.960

Sumber: Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2014-2019

Indikator fasilitas wilayah dan infrastruktur pada bidang perhubungan, penataan ruang, perbankan, perusahaan, restoran, penginapan dan hotel, pelanggan listrik dan PDAM mengalami tren peningkatan dari tahun 2014-

2019. Hal ini mencerminkan terjadinya pertumbuhan pembangunan yang positif yang menandai kemajuan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

4. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi.

Dalam kaitan tersebut peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah daerah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak.

Salah satu indikator yang berpengaruh adalah masalah keamanan suatu daerah, keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup fluktuatif, tahun 2013 sebesar 395 kasus, tahun 2014 sebanyak 290 kasus, tahun 2015 sebesar 148 kasus, tahun 2016 sebanyak 214 kasus, dan tahun 2017 sebanyak 232 kasus. Selain angka kriminalitas, kejadian demonstrasi juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Tahun 2011-2012 terjadi sebanyak 4 kegiatan demonstrasi, tahun 2013 meningkat menjadi sebanyak 7 kegiatan demonstrasi, dan tahun 2014 sebanyak 5 kegiatan demonstrasi.

Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya, oleh karena itu penting bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan penurunan angka kriminalitas.

Selain itu kegiatan demonstrasi yang dilakukan masyarakat merupakan salah satu cerminan demokrasi di daerah, namun yang perlu ditekan adalah kegiatan demonstrasi yang mengarah pada aksi anarkisme, brutalisme, maupun rasisme, yang mempunyai potensi kerusuhan massa. Maka perlu adanya sebuah sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Cerminan iklim investasi yang baik dapat dilihat dari angka pendapatan daerah melalui pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah,

realisasi pajak daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan tren yang positif meningkat dari tahun ke tahun.

Pendapatan pajak daerah berasal dari 11 macam pajak daerah, yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah, pada tahun 2014 sebesar 8,891 milyar rupiah, tahun 2015 sebesar 10,042 milyar rupiah, tahun 2016 sebesar 10,804 milyar rupiah, dan tahun 2017 sebesar 11,313 milyar rupiah kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 12.600 milyar selanjutnya meningkat menjadi 14.412 milyar pada tahun 2019.

Pendapatan pajak daerah berasal dari 11 macam pajak daerah, yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk penerimaan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 sebesar 9,542 milyar rupiah, tahun 2015 sebanyak 7,538 milyar rupiah, tahun 2016 sebesar 8,250 milyar rupiah, dan tahun 2017 sebesar 9,799 milyar rupiah dan meningkat drastis pada tahun 2018 sebesar 12.025 milyar dan kembali meningkat pada tahun 2019 sebesar 15.116 milyar.

Hal ini membuktikan bahwa iklim investasi di Hulu Sungai Selatan berkembang dengan cukup baik, dari tahun ke tahun telah memberikan sumbangan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan daerah baik dari pajak maupun retribusi daerah. Tentunya harus didukung dengan memperkuat peraturan daerah terkait dengan jaminan berinvestasi, sejauh ini perda yang mendukung iklim usaha di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ada 1 Perda yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.26
Perkembangan Faktor Yang Mempengaruhi Iklim berinvestasi
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019

No.	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.	Angka kriminalitas	290	148	214	232	254	271
2.	Pajak Daerah (milyar Rp)	8,891	10,042	10,804	11,313	12.600	14.412
3	Retribusi Daerah (milyar Rp)	9,542	7,538	8,250	9,799	12.025	15.116
4	Macam Pajak Daerah	10	10	10	10	11	11
5	Macam Retribusi Daerah	21	31	31	33	30	33
6	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1	1	1	1	1	1

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan 2020 (diolah)

Persentase penyelesaian izin lokasi dapat dilihat pada tabel di bawah. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa peningkatan sangat signifikan terjadi pada tahun 2012. Persentase Penyelesaian izin lokasi pada tahun 2014 sampai dengan 2016 telah mencapai 100%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase capaian menjadi sebesar 75% dan 2019 mengalami kenaikan 100 %.

Tabel 2.27
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019

No.	Tahun	Persentase
1	2015	100
2	2016	100
3	2017	75
4	2018	100
5	2019	100

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan (diolah)

Indikator perizinan juga berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah, dengan memberikan kemudahan dalam perizinan usaha akan meningkatkan

minat pelaku usaha untuk melakukan investasi dan pengembangan usaha. Pada tabel berikut dapat diketahui jenis perijinan dan jumlah yang diterbitkan dari tahun 2016-2019.

Tabel 2.28
Jumlah Perijinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 - 2019

No	Jenis Perizinan	Jumlah			
		2016	2017	2018	2019
1	SIUP	213	208	274	282
2	TDP	208	203	284	282
3	HO (Izin Gangguan)	299	220	-	-
4	Domisili	262	211	-	-
5	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	43	51	89	41

Sumber : Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2020

5. Fokus Sumber Daya Manusia

Keunggulan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci terciptanya daya saing tinggi daerah sehingga perhatian terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi suatu hal yang tidak dapat terelakkan lagi.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 50,38. Menurun ditahun 2014 menjadi 50,21. Tahun 2015 menurun menjadi 50,06 dan pada tahun 2016 menurun lagi menjadi 49,87 dan 2017 mengalami penurunan menjadi 49,67 dan tahun 2018 sebesar 49,50 dan tahun 2019 menjadi 49,34.

Sedangkan untuk peningkatan kualitas SDM yaitu indeks pembangunan manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar

65,49. Tahun 2014 sebesar 62,25. Tahun 2015 sebesar 67,52 dan 2016 sebesar 67,8 dan pada tahun 2017 sebesar 67,8. dan tahun 2018 sebesar 68,41 , kemudian tahun 2019 kembali naik menjadi 68,80.

Hal ini mencerminkan bahwa meskipun angka ketergantungan di Kabupaten Hulu Sungai cukup tinggi, namun pembangunan SDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang cukup positif, sehingga daya saing daerah juga ikut meningkat.

Tabel 2.29
Perkembangan Rasio Ketergantungan
dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2019

No	Indikator	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Ketenagakerjaan						
1.1	Rasio ketergantungan	50,21	50,06	49,87	49,67	49,50	49,34
1.2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (IPM)	62,25	66,31	67,52	67,8	68,41	68,80

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan (diolah)

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Dengan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD triwulan IV Tahun 2019 secara total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program yaitu untuk kinerja 94,95% (sangat tinggi) dan keuangan 76,69% (tinggi), hal terjadi karena masing-masing Perangkat Daerah melaksanakan program dan kegiatan fokus pada pencapaian indikator kinerja utama (IKU) RKPD dan Renja Perangkat Daerah serta penerapan Perjanjian Kinerja dari Perangkat Daerah pada tiap jenjang organisasinya. Selanjutnya untuk Tabel Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 dan Triwulan I Tahun 2020 dapat lihat pada Lampiran RKPD, dan Tabel Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 Sampai Dengan Tahun 2019 dapat lihat pada Lampiran RKPD.

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

I. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk menganalisis permasalahan Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah pada tahun 2021 dirumuskan dengan melihat kembali prioritas Pembangunan dan Sasaran Pembangunan RKPD Tahun yang lalu, yaitu :

A. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Perspektif pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 didasarkan pada kondisi objektif saat penyusunan perencanaan pembangunan dibuat dan masa lalu dan diprediksi ke depan.

Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator pembangunan yang bersifat makro. Berdasarkan tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” maka prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Pelayanan Dasar;
2. Peningkatan Produktivitas Sosial dan Ekonomi;
3. Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup;
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; dan
5. Peningkatan Kualitas Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Berdasarkan dengan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut di atas dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 di atas, maka ditetapkan target pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengacu pada target RKPD Provinsi Kalimantan Selatan terhadap Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	Indikator Makro	Target Tahun 2019
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,41
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,07 %
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,23 %
4	Tingkat Kemiskinan	5,14 %
5	Indeks Gini	0,318
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,08
7	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	1,05 %

Sumber : RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

Analisis permasalahan pembangunan menurut pencapaian indikator kinerja makro daerah menjadi masalah pokok perencanaan pembangunan yang akan menjadi sasaran pembangunan daerah. Untuk itu perlu diketahui sasaran pembangunan adalah hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Hingga akhir tahun 2019, berbagai isu-isu dan permasalahan pembangunan terjadi baik yang skala nasional, provinsi maupun di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Isu penanganan stunting merupakan salah satu *trending topic* sepanjang tahun 2019, pada awal triwulan I tahun 2020

terjadi pandemi COVID 19 yang melanda banyak negara termasuk Indonesia. Permasalahan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Tabel 2.30
Capaian dan Target Indikator Makro RKPD
Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,41	68,80
a	Harapan Lama Sekolah	12,70 Tahun	12,10 Tahun
b	Rata-Rata Lama Sekolah	8,0 Tahun	7,74 Tahun
c	Angka Harapan Hidup	66,05	65,89 Tahun
d	Pengeluaran Perkapita	Rp.13.335.000	Rp.12.835.000
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,23 Persen	5,32 Persen
3.	Indeks Gini	0,318	0,288
4.	Tingkat Kemiskinan	5,14 Persen	5,33 Persen
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,07 Persen	2,56 Persen
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,08	55,96

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (diolah)

Dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa pada indikator kinerja makro pembangunan daerah masih terjadi kesenjangan atau gap antara target dan capaian, kecuali untuk indikator kualitas lingkungan hidup dan indeks gini yang telah melampaui target.

Selanjutnya diperlukan suatu perumusan permasalahan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam memahami pencapaian Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan RPJMD ke dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan evaluasi RPJMD yang menggunakan beberapa metode sesuai peraturan dan kaidah empiris yang berlaku.

Pengukuran pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memakai metode pengukuran yang juga dipakai untuk evaluasi RPJMN (Nasional) dan Evaluasi RPJMD Prov. Kalsel. Metode ini menggambarkan perbandingan antara realisasi dan target RPJMD dengan dibantu beberapa parameter berupa interval nilai capaian, kriteria penilaian capaian dan warna kriteria capaian, untuk memudahkan interpretasi realisasi Sasaran RPJMD seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.32
Skala Nilai Peringkat Kinerja Capaian RPJMD Tahun 2019

No	Interval Nilai Capaian Kinerja (%)	Kriteria Penilaian	Warna Kriteria	Keterangan
1	91% ≤ 100%	Sangat Baik/Tinggi		Biru
2	76% ≤ 90%	Baik/Tinggi		Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang		Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah		Jingga
5	≤ 50%	Sangat Rendah		Merah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang. Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi atau masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan dalam beberapa tahun sebelumnya.

Dalam penerapan rencana pembangunan daerah, akan timbul permasalahan karena adanya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target sasaran pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD atau RPJPD). Adanya kesenjangan ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus identifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan sumber daya (potensi daerah) yang belum dimanfaatkan secara optimal, kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan serta tantangan dari luar daerah yang tidak diantisipasi.

Dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021, perlu diidentifikasi terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan yang disusun dapat meminimalkan atau menyelesaikan masalah tersebut dengan tepat. Dengan teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Rumusan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan Daerah akan menjadi program prioritas pemerintah daerah pada tahun berikutnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan Konkuren merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi ke depan. Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator pembangunan yang bersifat makro. Perspektif Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lima tahun ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun disajikan sebagai berikut :

Tabel 2.33
Pencapaian Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Tahun 2019

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Data Kondisi awal Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPMD Tahun 2019 (%)			SKPD
						Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kriteria Kinerja		
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	68,41	69,41	68,80	98,56	%	Sangat Tinggi	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1).	Harapan lama sekolah	Thn	12,07	12,70	12,10	95,04	%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
		2).	Rata-rata lama sekolah	Thn	7,72	8,00	7,74	96,50	%	Sangat Tinggi	
		3).	Persentase PAUD formal terakreditasi A	%	1,25	2,50	1,25	50	%	Sangat Rendah	
		4).	Persentase satuan pendidikan terakreditasi A	%	4,76	6,59	6,88	100	%	Sangat Tinggi	
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	5).	Angka Harapan Hidup/Umur Harapan Hidup	Nilai	65,59	66,05	68,80	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
		6).	Persentase wanita pernah kawin usia (15-49) tahun menurut usia kawin pertama; usia ≤ 20 tahun	%	75,81	73,02	72,90	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		7).	Tingkat kesehatan Rumah Sakit (RS)	Predikat	BB	AA	AA	100	%	Sangat Tinggi	RSUD Brigjend H. Hasan Basry
		8).	Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi paripurna	%	4,35	4,35	4,35	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
3	Tercukupinya ketersediaan pangan yang beragam dan aman	9).	PPH Ketersediaan	Skor	83,19	84,61	83,95	99,22	%	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan
4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	10).	Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	%	52,00	57,00	57,00	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUTR, Dispera KPLH
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	11).	Persentase angka PMKS yang mandiri	%	54,97	56,58	61,40	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Data Kondisi awal Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RPKD Tahun 2019 (%)			SKPD
						Target	Realisasi	Persentase Capaian		Kriteria Kinerja	
II	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan	2.	Tingkat kemiskinan	%	5,80	5,14	5,33	96,30	%	Sangat Tinggi	
6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	12).	Tingkat kemiskinan	%	5,80	5,14	5,21	96,30	%	Sangat Tinggi	
		13).	Indeks Gini	Indeks	0,317	0,318	0,288	110,4	%	Sangat Tinggi	
		3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,13	6,23	5,32	85,39	%	Tinggi	
7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	14).	Tingkat pengangguran terbuka	%	2,43	2,07	2,56	76,32	%	Tinggi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	15).	Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	%	5,27	4,47	3,97	88,81	%	Tinggi	
		16).	Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	5,41	5,38	4,96	92,19	%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan
		17).	Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,06	3,27	2,97	90,82	%	Tinggi	Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Disnakerkop UKP
		18).	Persentase koperasi sehat	%	1,18	2,35	2,35	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19).	Peningkatan retribusi dan pajak daerah	Milyar Rupiah	21,10	24,84	29,93	100	%	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah
10	Meningkatnya investasi PMDN	20).	Persentase peningkatan Penanaman Modal	%	3,00	4,80	9,08	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	21).	Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of money</i>)	Rp	3.223.750.000	4.224.480.000	4.758.098.000	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Data Kondisi awal Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 (%)			SKPD	
					Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kriteria Kinerja			
III	Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	4.	Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	%	67,49	49,64	67,49	100	%	Sangat Tinggi	
12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	22).	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan \geq 40 Km/jam	%	74,50	62,45	64,03	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		23).	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	%	85,00	62,68	55,85	89,10	%	Tinggi	
		24).	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	%	14,00	24,00	23,80	99,17	%	Sangat Tinggi	
		25).	Persentase kecukupan RTH Publik	%	24,83	24,84	24,84	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		26).	Persentase perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas	%	40,66	53,05	50,85	95,85	%	Sangat Tinggi	
IV	Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan	5.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,62	0,64	0,65	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	27).	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,62	0,64	0,65	100	%	Sangat Tinggi	
		6.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	90,27	89,21	98,82	%	Sangat Tinggi	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	28).	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,96	90,27	89,21	98,82	%	Sangat Tinggi	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Data Kondisi awal Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RPKD Tahun 2019 (%)			SKPD
						Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kriteria Kinerja		
		29).	Persentase desa/kelurahan layak anak	%	0,68	2,03	2,03	100	%	Sangat Tinggi	
		7.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,94	55,08	55,96	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	30).	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	54,94	55,08	55,96	100	%	Sangat Tinggi	
V	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	8.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62,93	68,00	64,66	98,70	%	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah
16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	31).	Predikat AKIP	Predikat	BB	BB	BB	100	%	Sangat Tinggi	
		32).	Kategori nilai kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Predikat	B	A	B	88,02	%	Tinggi	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	33).	Kualitas aspek perencanaan	Nilai	56,81	60,29	56,81	94,23	%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		34).	Opini WTP BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	%	Sangat Tinggi	Badan Keuangan Daerah
		35).	Indeks profesionalisme ASN	Indeks	49,04	69,77	58,00	83,13	%	Tinggi	Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan
18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36).	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	%	7,89	13,16	21,05	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Data Kondisi awal Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2019		Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2019 (%)			SKPD
						Target	Realisasi	Persentase Capaian	Kriteria Kinerja		
		37).	Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	%	0,60	8,33	9,03	100	%	Sangat Tinggi	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
19	Meningkatnya kehidupan sosial keagamaan	38).	Persentase peningkatan penerimaan zakat	%	7,00	8,00	7,50	93,75	%	Sangat Tinggi	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Realisasi pencapaian target Sasaran RKPD Tahun 2019 secara keseluruhan dapat dikategorikan dengan capaian kinerja yang sangat tinggi. Pernyataan ini dibuktikan dengan persentase rata-rata capaian indikator sasaran RPJMD dan indikator sasaran RKPD yang mencapai nilai 94,62%.

Kriteria pencapaian kinerja yang berarti sangat baik ini dievaluasi dari hasil realisasi setiap indikator sasaran RPJMD dan RKPD yang diperoleh hingga akhir Triwulan IV 2019. Rincian realisasi dan capaian RKPD 2019 adalah sebagai berikut :

Berdasar hasil evaluasi pada akhir triwulan IV Tahun 2019 ini, dengan nilai capaian seluruhnya 94,62% dapat disimpulkan bahwa Sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahun 2019 dinyatakan tercapai dengan kinerja sangat baik (tinggi) sebagaimana terlihat dari persentase capaian indikator sasaran yang ditunjukkan pada tabel di atas.

Indikator sasaran RPJMD yang pencapaiannya masih sangat rendah akan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah di Tahun 2019 untuk diperbaiki kinerjanya. Satu indikator sasaran RPJMD yang kriteria kinerja sangat rendah yang berada di bidang Pendidikan adalah : Persentase PAUD Formal Terakreditasi A.

Pemerintah Daerah akan mengambil langkah dan rencana tindak yang lebih inovatif pada program dan kegiatan bidang Pendidikan untuk meningkatkan jumlah Pendidikan Anak Usia Dini yang Terakreditasi A. Tentunya program dan kegiatan yang nanti dilaksanakan membutuhkan

dukungan dan sinergi semua pihak terkait agar bisa mencapai target yang diharapkan.

1. Kesejahteraan Masyarakat

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2013 menunjukkan angka 5.68 persen dan naik menjadi 5.79 persen pada tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 menjadi 6.05 persen. Kontribusi PDRB kategori pertambangan batu bara yang besar sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kondisi perekonomian yang mulai menanjak naik sejak tahun 2016 pada angka 6.05 persen dan berlanjut ke Tahun 2017 menjadi 6.13 persen, 2018 sebesar 6,14 persen dan tahun 2019 menjadi 5,32 persen, terjadi perlambatan pertumbuhan karena pengaruh beberapa sektor yang mengalami tekanan karena adanya pengaruh global ekonomi. Sehingga masih tetap membutuhkan dorongan yang besar untuk terus bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini dibutuhkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang kuat dan inklusif, dimana dapat memberikan pengaruh yang luas bagi seluruh masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki Hulu Sungai Selatan.

- b. Persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Hulu Sungai Selatan berada pada tahun 2013 berada pada angka 6,67 persen, jauh di atas provinsi yang berada di angka 4,73 persen, meningkat menjadi 6,77 persen pada tahun 2014, pada tahun 2015 menurun menjadi 6,45 persen, penurunan kembali terjadi pada tahun 2016 menjadi 6.29 persen, dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 5.8 persen, tahun 2018 menjadi 5,21 persen tahun 2019 menjadi 5,4 persen. Walau demikian, terdapat sisi positif dari upaya pemerintah bersama seluruh *stakeholder* untuk penanggulangan masalah kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Hulu Sungai Selatan pada periode 2014 sampai 2017.

- c. Angka kriminalitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sebesar 395 kasus, cenderung mengalami fluktuatif pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2014 dan 2015 angka kriminalitas menjadi 290 kasus dan 148 kasus dan pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 214 kasus dan 232 kasus dan Tahun 2019 menjadi 271.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebab banyaknya kasus kriminalitas yang belum tertangani bisa berakibat pada perkembangan psikologis masyarakat dan mengurangi rasa nyaman dan aman kehidupan masyarakat. Sedangkan masih tingginya angka kriminalitas perlu dikurangi dengan perbaikan masalah-masalah sosial ekonomi, pengurangan pengangguran, pendidikan moral maupun yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah karena tingkat pendidikan mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Permasalahan bidang Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Sederajat realisasi tahun 2019 sebesar 81,43 % masih belum mencapai target yaitu sebesar 89,17%. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat tahun 2019 sebesar 74,68% dan target sebesar 79,45%. Kesenjangan antara target dan capaian bidang pendidikan menggambarkan masih adanya penduduk usia jenjang pendidikan SMP sederajat yang belum diserap pada jenjang pendidikan tersebut.

3. Bidang Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi pada bidang kesehatan yaitu:

- a. Sektor kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 2 (dua) tahun terakhir menggambarkan permasalahan kesehatan ibu dan anak menjadi masalah penting. Kematian ibu dan bayi semakin meningkat dari 2 tahun terakhir. Persalinan yang ditangani tenaga kesehatan mencapai target namun kematian ibu dan bayi masih tinggi yang mencerminkan masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan.

Untuk itu diperlukan upaya kesehatan yang bersifat reformatif dan akseleratif yang ditujukan untuk peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan terutama dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB), perbaikan gizi masyarakat, peningkatan umur harapan hidup, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pemberdayaan masyarakat.

4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan, irigasi. Permasalahan utama pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu:

- a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan untuk jalan Kabupaten yang jalan kabupaten sepanjang 859,36 Km. Adapun jalan beraspal sepanjang 545,04 Km, jalan kerikil sepanjang 125,58 Km, jalan tanah 108,50 Km, jalan beton 80,24 Km. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 401,79 Km, dalam kondisi sedang sepanjang 148,48 Km, dalam kondisi rusak sepanjang 174,86 Km dan kondisi rusak berat sepanjang 134,23 Km.
- b. Realisasi pencapaian SPM air minum dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik masih belum mencapai 100%, cakupan SPAM pada tahun 2018 sebesar 74,65% dan 2019 sebesar 84,66%. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik tahun 2019 sebesar 9,216%.
- c. Realisasi capaian kinerja dari rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten, pada tahun 2019 sebesar 80 % masih di bawah target 100%.
- d. Realisasi capaian indikator kinerja rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2019 sebesar 62,039%.

5. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman mempunyai target pencapaian 100% untuk SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, dan Fasilitasi penyediaan rumah

yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

Penanganan sampah masih belum optimal, hal ini terlihat dari Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk masih sangat rendah, yaitu pada kisaran 1,17. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena jika tidak segera dilakukan tindakan maka penumpukan timbunan sampah akan terus terjadi sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan gangguan lingkungan dan ekologi.

Realisasi capaian kinerja dari rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah pada tahun 2019 sebesar 58,82%. dan indikator kinerja Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) pada tahun 2019 sebesar 84,45%.

6. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu,

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana:
 - 1) penyusunan kajian risiko bencana
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten.
 - 3) 2) Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - 1) penyusunan rencana penanggulangan bencana
 - 2) pembuatan rencana kontingensi;
 - 3) pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - 4) gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;

- 5) pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 6) penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana

- 1) respons cepat kejadian luar biasa penyakit /*wabah zoonosis* prioritas;
- 2) respons cepat darurat bencana;
- 3) aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- 4) pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Satuan Polisi Pamong Praja :

- 1) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum; dan
- 2) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Realisasi dari target SPM masih belum mencapai 100%.

7. Bidang Sosial

Permasalahan utama bidang sosial tidak terlepas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Permasalahan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu meningkatnya Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dikarenakan tidak lolos verifikasi dan validasi data ataupun pindah domisili. Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dikarenakan tidak lolos verifikasi dan validasi data, meninggal atau pindah domisili. Capaian kurang dari 100% pada indikator Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti dikarenakan sebagian gepeng tidak mengalami perubahan perilaku setelah ditertibkan dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengemis lagi, atau ada yang kembali lagi setelah dipulangkan ke daerah asalnya.

8. Bidang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja Permasalahan pada bidang tenaga kerja meliputi:

- a. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar 71,38, tahun 2018 meningkat menjadi 72,15% dan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 71,49. Namun peningkatan ini dirasakan masih belum optimal karena indikator kinerja pada persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tahun 2019 hanya mencapai 77,16%, indikator kinerja pada persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) pada tahun 2019 sebesar 92%, realisasi capaian indikator kinerja pada tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar 91,23%, realisasi indikator kinerja pada persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten tahun 2019 sebesar 93,98%. Realisasi capaian indikator kinerja pada Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial 83,33%.
- b. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2017 sebesar 2,02% dan tahun 2018 menjadi 2,43% dan tahun 2019 menjadi 2,56%, dari data dapat diketahui adanya tren peningkatan pada indikator tingkat pengangguran terbuka pada penduduk usia produktif.

9. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Beberapa hal yang menjadi permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2015 sebesar 88,36, pada tahun 2016 sebesar 89,08, pada tahun 2017 sebesar 89,07 (Data BPS pada 03 Desember 2019).

- b. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014 sebesar 60,41% kemudian tahun 2015 menjadi 60,38% dan tahun 2017 menjadi 61,10%. (Data BPS pada 07 Desember 2019)
- c. Realisasi capaian indikator kinerja partisipasi angkatan kerja perempuan pada tahun 2019 sebesar 57,5 %, masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja perempuan tahun 2019.
- d. Terkait status kota layak anak, Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014 menyandang sebagai status kota layak anak Rintisan, artinya Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih harus berkomitmen menuju kota layak anak dan pada tahun 2017-2019 masih berstatus pratama selama 3 (tiga) tahun.

10. Bidang Pangan

Permasalahan bidang pangan adalah masih perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal yang memenuhi kebutuhan gizi penduduk setempat dengan mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) didukung oleh cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kualitas dan kemampuan daya beli (*affordability*).

11. Bidang Pertanahan

Selain jumlah luas lahan yang bersertifikat pada tahun 2019 sebesar 76,24%, penyelesaian kasus tanah negara juga harus diselesaikan dengan baik. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum. Realisasi capaian indikator kinerja tahun 2019 pada persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, sebesar 23%. dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan pada tahun 2019 sudah mencapai 100% namun hal ini masih perlu upaya untuk mempertahankan capaian realisasi. Capaian realisasi indikator kinerja pada indikator tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sebesar 56% rata-rata penerima menerima sebidang tanah seluas 3100 m² (31%).

12. Bidang Lingkungan Hidup

Beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yaitu:

- a. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami tren peningkatan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang fluktuatif dari tahun 2015 yang mencapai sebesar 58.86, turun menjadi 56.02 pada tahun 2015 Pada tahun 2016 IKLH kembali turun walaupun tidak begitu signifikan sebesar 54.05 karena masih belum mampu melebihi IKLH tahun 2014, dan pada tahun 2017 naik menjadi 54.55, tahun 2019 sebesar 55,96. Sumbangan pencemaran udara dari NO₂ dan SO₂ yang meningkat menyebabkan penurunan IKLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten pada tahun 2019 sebesar 73,68% dan realisasi capaian indikator kinerja ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 68,97%. Dari data tersebut dapat diketahui pengelolaan sampah dan ketaatan penanggung jawab usaha masih rendah terhadap izin lingkungan.

13. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama pada bidang ini dari realisasi capaian indikator kinerja pada persentase penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai akta kelahiran pada tahun 2019 mencapai 92,83% dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik 95,78%. Masih terdapat gap antara target 100% dan realisasi capaiannya.

14. Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama yang dihadapi adalah realisasi indikator kinerja pada indikator TFR (Angka Kelahiran Total) tahun 2019 sebesar 2,35, Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) pada tahun 2019 sebesar 100%, Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) pada tahun 2019 sebesar 76,67%, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) pada tahun 2019 sebesar 15%.

15. Bidang Perhubungan

Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan transportasi publik, hal ini terlihat dari terjadinya Penurunan jumlah AKBD, angkutan perbatasan dan

angkutan desa menjadi permasalahan utama di bidang perhubungan. Realisasi capaian kinerja rasio konektivitas kabupaten pada tahun 2019 untuk aspek penyeberangan yaitu jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten yaitu sebesar 0,625 dan realisasi indikator kinerja pada kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota tahun 2019 rasio sebesar 20,88.

16. Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama adalah realisasi dari target indikator kinerja pada persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo baru mencapai 39,47%, indikator kinerja untuk persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tahun 2019 sebesar 68,42%, realisasi indikator kinerja pada persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten tahun 2019 sebesar 81,95%. dan indikator kinerja pada peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government tahun 2019 sebesar 100%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa implementasi e-government sudah ada regulasi yang mengaturnya.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang SPBE dapat mempercepat peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam melaksanakan SPBE. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Yakni penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK yang merupakan sebuah layanan pemerintah agar supaya dapat mendorong dan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Serta adanya integrasi aplikasi sebagai penerapan tata kelola fasilitas pemerintahan yang baik dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan

pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi.

Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membangun portal dan aplikasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan publik. Di masa mendatang pelayanan SPBE oleh Diskominfo akan lebih ditingkatkan baik dalam kualitas maupun dalam kuantitasnya, hal ini untuk menjawab kebutuhan Daerah maupun Perangkat Daerah. Portal website yang telah dibangun oleh Dinas Kominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.34			
Portal Website Pemkab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020			
No.	Portal	Alamat Website	Nama SKPD
1	Portal web Pemkab HSS	www.hulusungaiselatankab.go.id	Diskominfo
2	Web Bappelitbangda	www.bappelitbangda.hulusungaiselatankab.go.id	Bappelitbangda
3	Web Bakeuda	www.bakeuda.hulusungaiselatankab.go.id	Bakeuda
4	Web Sekretariat DPRD	www.setwan.hulusungaiselatankab.go.id	Setwan
5	Web Diskominfo	www.diskominfo.hulusungaiselatankab.go.id	Diskominfo
6	Web BKD & Diklat	www.bkddiklat.hulusungaiselatankab.go.id	BKD & Diklat
7	Web RSUD Hasan Basry	www.rsudhasanbsary.hulusungaiselatankab.go.id	RSUD Hasan Basry
8	Web Dinkes	www.dinkes.hulusungaiselatankab.go.id	Dinkes
9	Web Dinas PMPTSP	www.dpmpstsp.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas PMPTSP
10	Web Dinas PPKBPPPA	www.dppkbpppa.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas PPKBPPPA
11	Web Dinas Pendidikan	www.disdik.hulusungaiselatankab.go.id	Dinas Pendidikan
12	Web PPID	www.ppid.hulusungaiselatankab.go.id	Diskominfo

Sumber : Diskominfo Kab. Hulu Sungai Selatan, 2020 (diolah)

17. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan bidang KUKM adalah walaupun ada peningkatan Koperasi yang berkualitas tahun 2019 sebesar 77,16% namun masih berada di bawah target 100%, indikator kinerja koperasi aktif pada tahun 2019 sebesar 78,48% dan indikator kinerja pada meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha masih sebesar 81,29% tahun 2019.

18. Bidang Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi di Kabupaten pada tahun 2019 sebesar 173,96% namun hal ini belum ditandai dengan peningkatan yang signifikan pada peningkatan PDRB Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019.

19. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada tahun 2019 masih rendah yaitu 0,05% kemudian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2019 sebesar 2,35%, Peningkatan prestasi olahraga atas perolehan medali pada tahun 2019 sebanyak 11 medali, persentase jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan pendidikan pada tahun 2019 sebesar 26,19%.

20. Bidang Persandian

Permasalahan persandian pada realisasi capaian indikator kinerja pada tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2019 sebesar 34,25%. Hal ini masih perlu ditingkatkan pada tahun mendatang.

21. Bidang Kebudayaan

Realisasi indikator kinerja pada indikator kinerja terlestarikannya Cagar Budaya pada tahun 2019 sebesar 56,41% dan penyelenggaraan festival seni & budaya sebanyak 8 event. Pada urusan kebudayaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan erat kaitannya dengan kepariwisataan sebagai daya tarik wisata. Sehingga bidang ini perlu berbenah dan mengoptimalkan capaian indikatornya.

22. Bidang Perpustakaan

Permasalahan utama dari urusan ini terdapat pada realisasi capaian indikator kinerja nilai budaya baca yang pada tahun 2019 sebesar 50,4%, dan realisasi capaian indikator kinerja pada persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan sudah mencapai 100% sehingga tetap diperlukan kinerja untuk lebih memantapkan capaiannya. Indikator kinerja pada koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun 2019 sebesar 58,81%.

23. Bidang Kearsipan

Permasalahan utama pada kearsipan yaitu pada indikator tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps 40 dan 59 UU 43/2009) pada tahun 2019 sebesar 75%.

24. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama di bidang kelautan dan perikanan, antara lain menurunnya produktivitas kolam, produksi budidaya minapadi (budidaya ikan di sawah) dan produktivitas minapadi. Hal ini terjadi karena budidaya minapadi sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Kondisi ini mengakibatkan budidaya minapadi agak sulit untuk berkembang. Sementara dari realisasi indikator kinerja jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten pada tahun 2019 sebesar 105%. Untuk ke depannya akan lebih ditingkatkan lagi.

25. Bidang Pariwisata

Permasalahan utama bidang pariwisata adalah kontribusi sektor pariwisata hingga saat ini belum khusus menjadi kategori lapangan usaha PDRB. Selain itu, jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini karena obyek wisata alam dan obyek wisata buatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum dikelola secara profesional, terutama sarana dan prasarana, kualitas sumber daya pemandu wisata dan informasi kepariwisataan juga masih belum memadai sehingga belum bisa meningkatkan jumlah pengunjung dan belum dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

26. Bidang Pertanian

Permasalahan di bidang pertanian antara lain:

- a. Luas areal padi dari tahun 2012 sampai 2019 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian, apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luas areal padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian
- c. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2016 sebesar 4,83%, tahun 2017 sebesar 1,67%, tahun 2018 sebesar 4,33% dan tahun 2019 sebesar 2,97%. Tren pertumbuhan fluktuatif dan cenderung menurun untuk tahun 2019.
- e. Nilai Tukar Petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masing-masing memiliki perkembangan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun terakhir menunjukkan peningkatan dari realisasi tahun 2014

yaitu 99,83%, menjadi 99,99% pada tahun 2015, mencapai 97,52% pada tahun 2016 dan tahun 2017 capaian sebesar 96,69% dan terus mengalami penurunan dari tahun sampai dengan 2019 menjadi 95,07%. Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh petani yakni mahalannya harga sarana produksi pertanian dan fluktuatifnya harga komoditas pertanian. Sehingga upaya tindak lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memberikan subsidi atau insentif bagi petani.

27. Bidang Perdagangan

Permasalahan utama bidang perdagangan adalah belum optimalnya angka kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Pada awal periode tahun 2015 mencapai 4,76%, tahun 2016 sebesar 4,60%, tahun 2017 sebesar 5,25%, tahun 2018 sebesar 4,84% dan tahun 2019 sebesar 4,96%. Peningkatan pelayanan guna mendorong kegiatan sektor perdagangan sangat diperlukan, salah satunya adalah kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan. Realisasi indikator kinerja persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) pada tahun 2019 sebesar 98,95%, indikator kinerja pada persentase kinerja realisasi pupuk sebesar 26,58% pada tahun 2019. Pada indikator Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2019 sebesar 77,33%.

28. Bidang Perindustrian

Permasalahan utama perindustrian terletak pada indikator kinerja Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP pada tahun 2019 sebesar 75%, sementara untuk indikator kinerja Pertambahan jumlah industri Kecil di Kabupaten mencapai 100%, Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait pada tahun 2019 sebesar 100%.

II. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Saat ini pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi New Normal atau fase kehidupan baru setelah pandemi virus corona menghantam seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai skenario telah dirancang, termasuk menyiapkan protokol pencegahan di berbagai sektor industri yang nantinya akan diizinkan kembali beroperasi.

Istilah *New Normal* mengacu pada perubahan perilaku manusia setelah wabah virus corona dengan menerapkan protokol pandemi covid-19. WHO memberikan beberapa indikator yang diminta untuk dapat dipatuhi oleh semua negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan normalnya dengan COVID-19 sampai vaksin ditemukan.

Ketika *New Normal* masyarakat memang dituntut untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, salah satunya menerapkan protokol pencegahan penularan virus di setiap kegiatan yang melibatkan orang banyak. Pemerintah juga telah menyiapkan pedoman bekerja di era *new normal*. Pedoman tersebut tertuang dalam beberapa produk kebijakan antara lain adalah :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Bar

Setidaknya ada beberapa APD (alat pelindung diri) dan peraturan yang mesti dipatuhi, baik perusahaan maupun pegawai, ketika *Work From Office* (WFO) kembali dilakukan, antara lain :

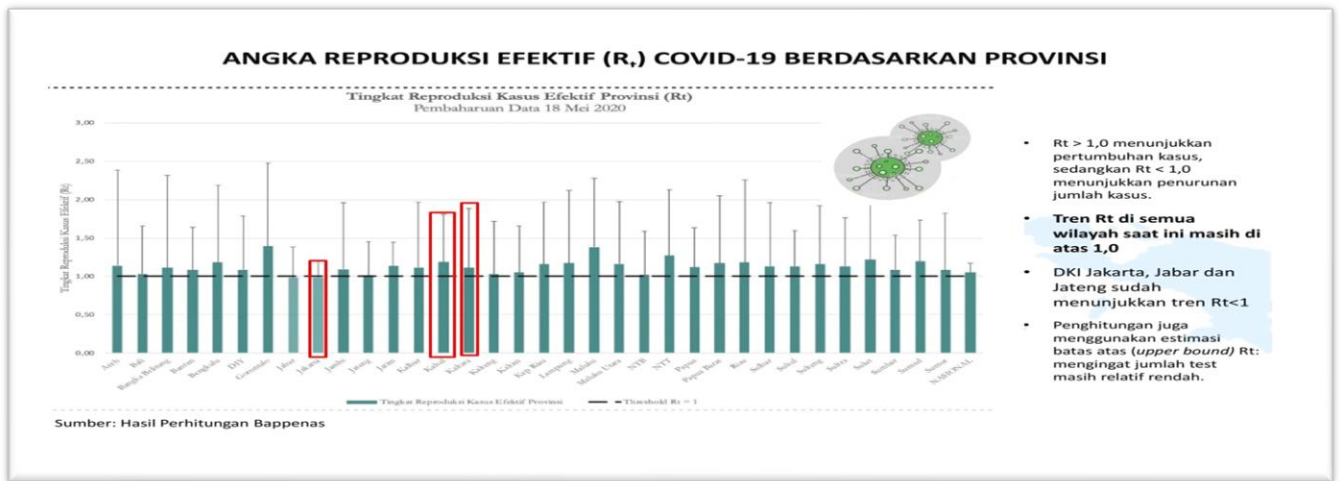
- a. Dalam peraturan Kemenkes dan BPOM, setiap pekerja diwajibkan menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah dan selama di tempat kerja,

- b. Pekerja wajib menjaga jarak sosial minimal satu meter baik di perjalanan maupun di tempat kerja,
- c. Pekerja diimbau membawa atau perusahaan menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen sebagai upaya pencegahan tambahan, terutama di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang *meeting*, pintu lift, dan lain-lain,
- d. Pekerja wajib mencuci tangan sesering mungkin memakai sabun dan air mengalir selama 20 detik, terutama saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi,
- e. Wajib menjaga kebersihan di area bekerja dan melakukan disinfektan secara berkala,
- f. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersamaan seperti alat salat, makan, dan lain-lain,
- g. Menerapkan etiket batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut menggunakan tisu saat melakukannya,
- h. Terakhir, para pekerja harus menerapkan pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja.

Jadi, dapat disimpulkan, yang terpenting dalam menjalani fase kehidupan baru atau new normal adalah senantiasa menerapkan protokol pencegahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni dengan menggunakan masker, rutin mencuci tangan, menjaga jarak sosial, dan protokol pencegahan lainnya.

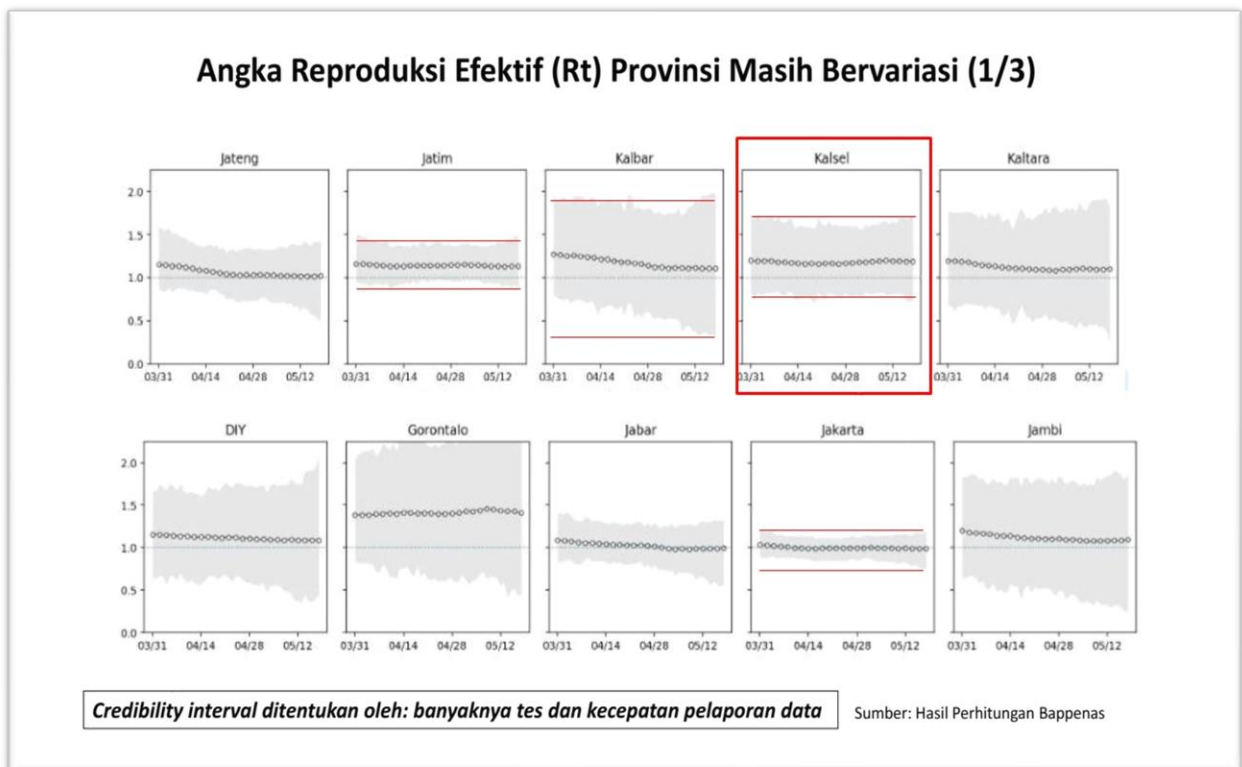
Adapun kondisi covid-19 di Kalimantan Selatan masih terlihat tinggi hal ini sesuai dengan data yang disampaikan Bappenas RI bahwa angka reproduksi efektif covid-19 (R_t) di Kalimantan Selatan masih di atas 1.

R_t merujuk pada angka reproduksi efektif covid-19 di setiap wilayah atau negara sebagai gambaran tentang kondisi epidemi terkini lewat estimasi jumlah rata-rata penularan yang terjadi per satu kasus infeksi. Angka R_t dapat berubah dari waktu ke waktu dan dapat digunakan untuk mengukur laju penularan virus secara *real time*.

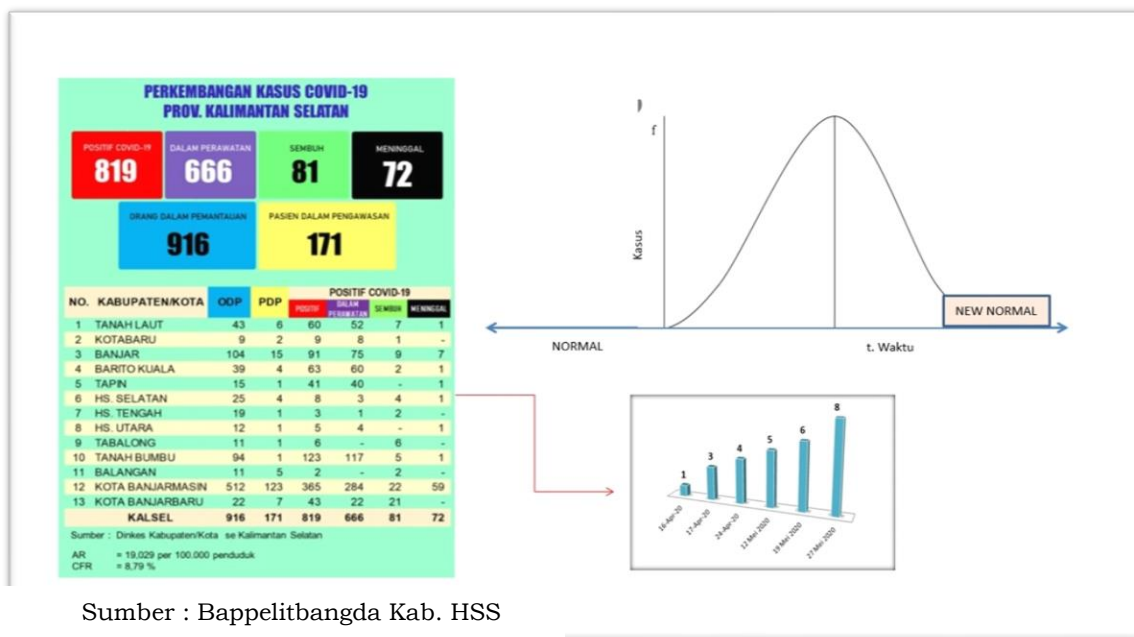


Nilai R_t idealnya di bawah 1. Apabila R_t di suatu wilayah masih di atas 1, itu artinya virus masih berpotensi menyebar ke beberapa orang dan menyebabkan lebih banyak paparan penyakit. Sebagai contoh, $R_t = 2$ berarti satu pasien yang terinfeksi bisa menulari rata-rata dua pasien lainnya.

Masih di atas 1 angka R_t Kalimantan Selatan juga sejalan dengan tren terus bertambahnya kasus positif dari hari ke hari serta menandakan bahwa Kalimantan Selatan masih belum pada puncak pandemi covid-19. Hal ini terlihat juga dari ketebalan penyebaran covid di Kalimantan Selatan dan grafik kasus positif di Kabupaten Hulu Sungai selatan secara khusus.



Kebijakan *New Normal* ini idealnya diterapkan ketika sebuah wilayah sudah memasuki masa penurunan yang dalam pada kasus positif covid-19 walaupun belum menyentuh garis normal/garis horizontal, dalam artian virus ini masih ada namun sudah dapat dikendalikan penyebarannya. Hal ini dapat diilustrasikan dalam gambar kurva di bawah ini.



Adapun kondisi Hulu Sungai Selatan sesuai hasil evaluasi Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam konteks pemetaan kondisi epidemiologi masuk dalam kategori Daerah Penularan Sedang / Zona Kuning.

Penilaian terhadap kemampuan Daerah dalam penanganan kesehatan masyarakat terkait infeksi Covid-19, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikategorikan sebagai Daerah Yang Mempunyai Respons Sedang

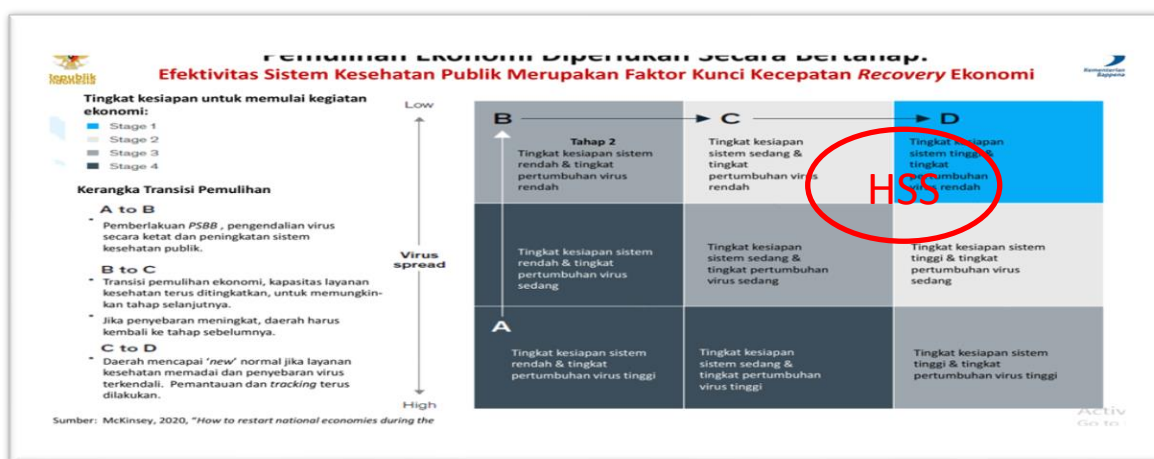
dan untuk penilaian terhadap kemampuan Daerah dalam penelusuran riwayat kontak dekat orang yang terinfeksi Covid-19, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikategorikan sebagai Daerah Berkemampuan Sedang

NO.	SUB INDIKATOR	HASIL GRAFIK	NILAI	KRITERIA
1	Jumlah Penderita Positif	Meningkat	25	Daerah Penularan Sedang / Zona Kuning
2	Jumlah ODP/PDP	Mendatar	20	
3	Jumlah Kematian Dimakamkan dengan Protokol Covid-19	Mendatar	20	
4	Penularan langsung Covid-19 pada petugas Kesehatan	Mendatar	20	
TOTAL NILAI			85	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. HSS

Kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini koheren dengan proses pemulihan ekonomi secara bertahap, yang mana sangat menekankan pada efektivitas sistem kesehatan publik. Sebagaimana yang tergambar dalam gambar di bawah ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dimasukkan dalam tahapan transisi dari C ke D. Dimana tingkat kesiapan sistem kesehatan kategori sedang dan tingkat pertumbuhan virus rendah.

Dalam tahapan ini pemerintah perlu terus memperkuat sistem kesehatan dalam rangka memberikan layanan yang optimal, serta seraya mengendalikan penyebaran virus dengan terus melakukan pemantauan dan *tracking*.



New Normal Artinya kita harus berdampingan dengan covid-19 sampai ditemukan vaksin yang efektif, kita harus hidup berdamaian dengan covid-19 untuk beberapa waktu ke depan, WHO menyatakan bahwa kita harus hidup berdampingan dengan Covid-19. Karena ada potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat. Berdampingan bukan berarti menyerah, tapi menyesuaikan diri.

Kebijakan Pemerintah Pusat ini terlihat dari beberapa kebijakan yang mengarah pada pemulihan ekonomi, hidup yang produktif namun tetap aman dari covid-19.

Mau tidak mau Kabupaten Hulu Sungai Selatan (dengan kondisi saat ini zona kuning) harus memiliki langkah yang tepat dan cepat dalam merespons kebijakan *new normal* dalam beberapa waktu ke depan.

Hal yang ditakutkan ketika kebijakan new normal ini dilaksanakan dalam waktu dekat ini, dengan peningkatan aktivitas masyarakat akibat kebijakan itu bisa berpotensi menambah jumlah kasus virus corona secara masif. Walaupun penerapannya secara bertahap dan gradual namun perlu banyak langkah yang harus disiapkan.

Apalagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan daerah transit dan jalur Nasional antar Provinsi akan menampung dan dilalui semakin banyak orang ketika *new normal* dijalankan. Hal ini tentu membuka peluang besar penyebaran covid-19 di Hulu Sungai Selatan

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu terus ditingkatkan dalam menghadapi *new normal* ini, antara lain :

1. Peningkatan Kemampuan Daerah Dalam Penanganan Kesehatan Masyarakat Terinfeksi Covid-19 (Pelindung komunitas masyarakat, Alat Pelindung Petugas Medis, Sarana dan Peralatan Medis dan perlengkapan pasca wafat)
2. Peningkatan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Penelusuran Kontak dekat Masyarakat Dengan OPD dan PDP serta Orang yang Dimakamkan dengan Protokol Covid-19.
3. Setiap sektor kehidupan masyarakat, terutama yang mengumpulkan banyak/kerumunan orang dituntut untuk memiliki protokol kesehatan masing-masing, misal protokol kesehatan di sekolah, protokol kesehatan di pasar, protokol kesehatan di minimarket, protokol kesehatan di masjid/musala/langgar, protokol kesehatan di restoran/warung makan, protokol kesehatan di kantor, protokol kesehatan di angkutan umum, dll.

Dalam pelaksanaan protokol kesehatan ini dapat dijadikan pedoman adalah :

- a) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07 /MENKES /328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
- b) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
- c) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tata Normal Baru
4. Mengoptimalkan sosialisasi protokol kesehatan di setiap sektor pada masyarakat luas.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah upaya Pemerintah untuk meningkatkan kemandirian pemerintahan Daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek penting, Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Sebelum meninjau kebijakan ekonomi daerah maka perlu memperhatikan kebijakan ekonomi pemerintah tahun 2021.

Pemerintah dan DPR sepakat mengubah usulan asumsi dasar makro ekonomi dalam menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2021. Berikut kesimpulan yang disepakati antara Komisi XI DPR bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Kepala BPS :

1. Menyepakati asumsi dasar makro ekonomi tahun 2021, yaitu:
 - Pertumbuhan Ekonomi 4,5-5,5%
 - Tingkat Inflasi 2,0-4,0% (3% plus minus 1%)
 - Nilai Tukar Rupiah 13.700-14.900

- SBN 10 tahun 6,29-8,29%
2. Target Pembangunan
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,7-9.1%
 - Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7%
 - Rasio Gini 0,377 - 0,379
 3. Indikator Pembangunan
 - Indeks Pembangunan Manusia 72,78 - 72, 95
 - NTP dan NTN (nilai tukar petani dan nelayan) 102 - 104
 4. Dengan proyeksi asumsi makro RAPBN 2021 sebagai acuan APBN 2021 maka pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:
 - a. Melanjutkan penanganan bidang kesehatan;
 - b. akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan penguatan reformasi di bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, belanja negara, transfer ke daerah dan dana desa, dan ketahanan bencana dengan memprioritaskan percepatan pemulihan industri manufaktur, peristiwa, dan investasi serta pemanfaatan teknologi informasi;
 - c. memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran dan produktif dengan fokus pada sektor UMKM, korporasi, dan BUMN yang memiliki peran strategis bagi masyarakat;
 - d. meningkatkan prioritas pembangunan di bidang pertanian (ketahanan pangan), industri manufaktur, pariwisata, dan infrastruktur ICT;
 - e. menjaga daya beli masyarakat;
 - f. meningkatkan efektivitas perlindungan sosial;
 - g. memperkuat kebijakan dalam pengendalian impor khususnya pangan;
 - h. meningkatkan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN);
 - i. memperkuat sinergi kebijakan sektor dan fiskal dalam meningkatkan produktivitas sektoral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat industri nasional; dan
 - j. pengendalian defisit dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, ruang fiskal dan risiko APBN di masa yang akan datang.

Dengan fokus pada pemulihan ekonomi dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang, maka reformasi diarahkan pada bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), serta belanja negara, pada bidang kesehatan reformasi diarahkan untuk mendukung percepatan pemulihan akibat Covid-19. Termasuk di dalamnya meningkatkan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, peningkatan layanan kesehatan termasuk *health security*, serta reformasi jaminan kesehatan nasional (JKN) untuk mewujudkan *universal health coverage*.

A. Kebijakan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Selaras dengan pemerintah pusat masih dalam rangka pemulihan dampak dari pandemi Covid-19. Dengan tetap memberikan perhatian pada sektor pendidikan dan kesehatan, pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial dan ketahanan bencana.

Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha lain yang terkait. Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dalam rangka mengantisipasi adanya dampak pandemi Covid-9 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Sektor Kesehatan;
2. Perluasan Program Perlindungan Sosial;
3. Pembangunan Infrastruktur ;
4. Pembangunan SDM;
5. Pembangunan Pariwisata;
6. Pendalaman Sektor Keuangan;
7. Pemulihan Industri dan Perdagangan; dan
8. Akselerasi Investasi.

Melalui peningkatan sinergi antar sektor pertanian dan infrastruktur terutama dengan bidang sumber daya air untuk meningkatkan produksi pertanian dalam rangka mendongkrak produksi pertanian.

Meningkatkan sarana dan prasarana untuk lahan pertanian berkelanjutan sebagai usaha meningkatkan mutu pasca panen petani.

Peningkatan pengawasan melalui peningkatan penyediaan sarana prasarana untuk pada bidang perikanan tangkap untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Pengembangan *eco-tourism*, *edu-tourism*, *ethnic-tourism* dan penyelenggaraan festival-festival dengan skala provinsi dan nasional, seperti *jungle trekking*, air terjun, air panas Tanuhi, festival Loksado, *bamboo rafting*, rumah adat/balai, dan upacara pesta adat/aruh ganal; Peningkatan jalan menuju destinasi pariwisata/obyek wisata sesuai dengan lingkup kewenangan secara berjenjang dari level pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat; Pengembangan usaha kecil dan menengah, fasilitasi jaringan permodalan dan legalitas usahanya.

Hal di atas ditempuh melalui integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pada berbagai urusan pemerintahan sesuai kewenangan, dalam rangka meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya dan efektivitas program kegiatan untuk pencapaian sasaran prioritas daerah.

Menyelenggarakan pelayan publik secara online melalui mal pelayanan publik untuk memudahkan akses perijinan dalam rangka meningkatkan investasi di daerah. Berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Merupakan suatu perjalanan pembaharuan sekaligus suatu langkah strategis sebagai bentuk perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Perlu diketahui, generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA). Kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan generasi kedua. Kehadiran MPP sebagai generasi ketiga dapat memayungi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya. Peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP. Pelayanan dalam MPP dikombinasikan menggunakan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. Dengan penggunaan teknologi, tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga memberikan perhatian untuk tetap menjaga kestabilan daya beli masyarakat khususnya pada

masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan melaksanakan program untuk jaring pengaman sosial.

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengelolaan inflasi, terutama dalam manajemen pasokan barang dengan memadukan kebijakan fiskal daerah, pusat dan kebijakan moneter. Infrastruktur yang terkait dengan konektivitas dan intervensi kebijakan tata niaga sinergitas antar-instansi dalam mengendalikan harga komoditas strategis.

Pergerakan inflasi lebih banyak ditentukan oleh kebijakan pemerintah terkait harga dan lonjakan harga komoditas pangan. Kedua hal tersebut lebih terkait dengan sisi pasokan barang sehingga diperlukan peran pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan.

Untuk menciptakan inflasi yang rendah perlu perpaduan kebijakan antara pemda dan otoritas moneter, karena inflasi tidak hanya terkait faktor uang beredar yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Kebijakan tata niaga yang panjang juga menyebabkan inflasi rentan berfluktuasi, terutama untuk "*volatile foods*". Struktur pasar yang terdistorsi dan informasi pasar yang tidak simetris akan membuat tata niaga menjadi rumit dan panjang.

Dalam kaitan inflasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga melakukan intervensi dalam memutus mata rantai perdagangan komoditas pertanian dengan langsung menghubungkan petani produsen ke industri selaku pemakai komoditas, sehingga jalur distribusi semakin pendek yang dampaknya harga lebih stabil dan kesejahteraan petani meningkat.

Selain itu, kebijakan fiskal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terkait dana pembangunan infrastruktur juga berpengaruh, karena bisa mengefisienkan jalur distribusi untuk menekan harga. Setiap tahun membangun berkilometer jalan hingga ke desa-desa meliputi pegunungan, dataran dan rawa, sangat berperan dalam mengendalikan inflasi dari sisi pasokan.

Perlunya melakukan langkah terobosan untuk pembelian hasil panen petani oleh Toko Tani Indonesia. Upaya ini untuk meminimalkan aksi tengkulak yang sering merugikan petani dan membuat harga barang melambung.

Gambar 3.1
Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Semakin cepat pandemi covid-19 ini bisa terkendali dan selesai maka akan semakin efisien penggunaan anggaran covid-19, sehingga perlu dilakukan Optimalisasi anggaran covid-19 kepada sektor-sektor yang mendukung pengendalian penyebaran virus covid-19 dan penanganan dampak covid-19 saat ini, antara lain :

1. Peningkatan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19.
2. Penyediaan fasilitas dalam mendukung penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19 dan metode 3T (*Tracking, Tracing, Testing*)
3. Penyediaan tempat karantina atau rumah singgah.
4. Bantuan sosial yang dapat menggerakkan ekonomi produktif.
5. Penerapan protokol kesehatan penanganan covid-19 di semua sektor dimulai dengan melakukan simulasi dan modeling serta dilanjutkan dengan sosialisasi sekaligus penerapan.
6. Perkiraan penurunan dan pelandaian kurva di Kab. Hulu Sungai Selatan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan di semua sektor serta optimalnya metode 3T (*Tracking, Tracing, Testing*).

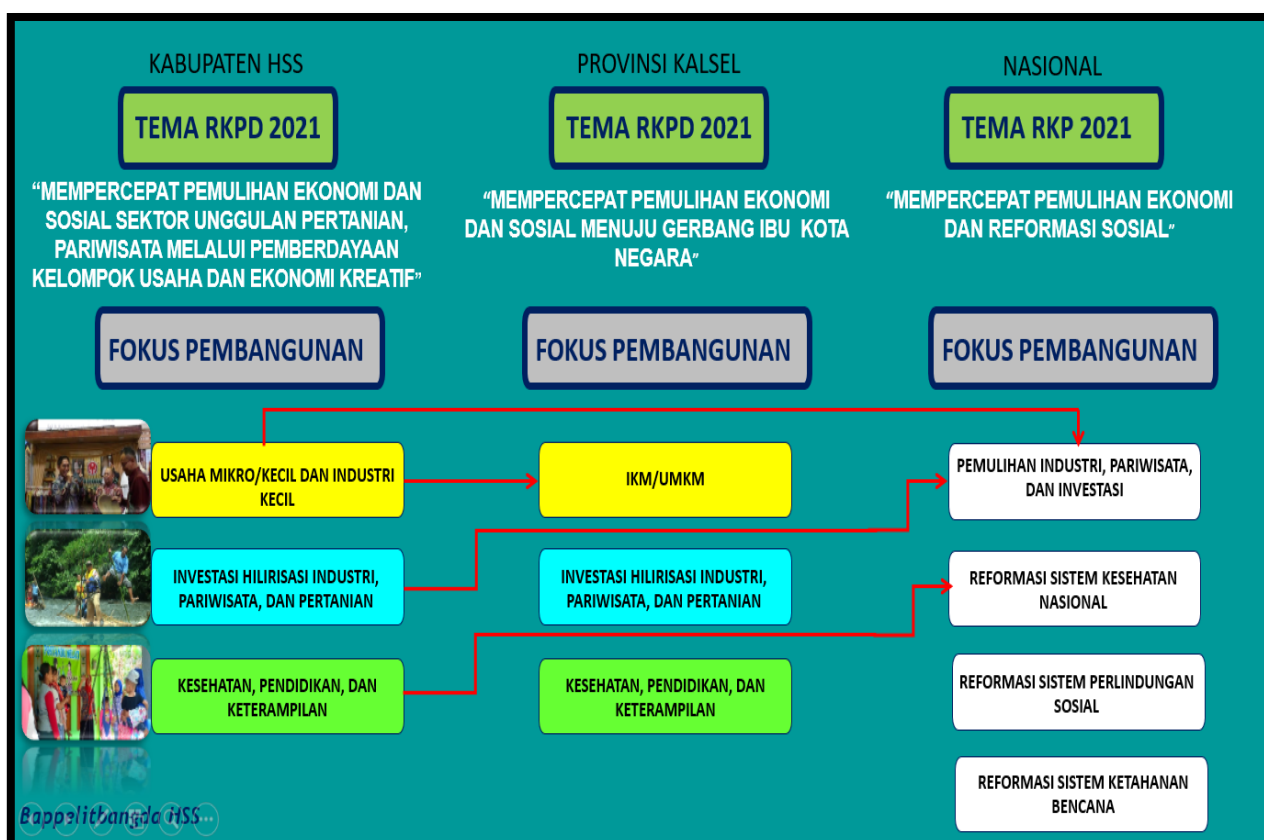
Memasuki era *new normal* ketika masyarakat tetap produktif dan aman Covid-19 akan terus ditingkatkan sehingga roda perekonomian masyarakat dapat kembali berputar. Pelaksanaan dengan berpedoman pada protokol kesehatan untuk mewujudkan ketahanan kesehatan masyarakat.

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2021 diselaraskan dengan fokus pembangunan provinsi Kalimantan Selatan dan fokus pembangunan Nasional. Hal ini bertujuan agar terjadi sinergi dan kolaborasi melalui program dan kegiatan sesuai dengan urusan dan kewenangan. Fokus pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 adalah :

1. Usaha Mikro/Kecil dan Industri Kecil;
2. Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata, dan Pertanian; dan
3. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan

Berikut disajikan gambar sinergi Fokus Pembangunan Nasional, Provinsi Kalsel dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.

Gambar
Fokus Pembangunan Nasional, Provinsi Kalsel dan Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021



Tabel 3.1
Indikator Kinerja Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2019-2021

No.	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	Capaian Tahun 2019	Target Tahun 2020		Target Tahun 2021
				Sebelum Revisi	Sesudah Revisi (*)	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,41	68,80	71,08	70,03	71,08
a	Harapan Lama Sekolah	12,07 Tahun	12,10 Tahun	12,89 Tahun	12,48 Tahun	13,08 Tahun
b	Rata-Rata Lama Sekolah	8,0 Tahun	7,74 Tahun	8,17 Tahun	8,17 Tahun	8,33 Tahun
c	Angka Harapan Hidup	66,05	65,89 Tahun	66,54 Tahun	66,03 Tahun	66,54 Tahun
d	Pengeluaran Perkapita (Rp)	13.335.000,00	12.835.000,00	13.010.000,00	13.010.000,00	13.210.000,00
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,23 Persen	5,32 Persen	5,53 Persen	5,45 Persen	5,96 Persen
3.	Indeks Gini	0,318	0,288	0,312	0,280	0,275
4.	Tingkat Kemiskinan	5,14 Persen	5,33 Persen	5,06 Persen	5,63 Persen	5,40 Persen
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,07 Persen	2,56 Persen	2,04 Persen	2,81 Persen	2,53Persen
6.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,08	55,96	55,27	59,23	61,28

(*) Revisi karena dampak COVID 19 tahun 2020

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber keuangan daerah di pandang sebagai bagian yang krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis keuangan daerah diharapkan dapat menjadi alat ukur untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, analisis keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan adanya analisa yang baik terhadap sumber-sumber pembiayaan daerah yang tersedia, maka pemerintah daerah dapat menyusun rencana kerja pemerintah daerah dengan efektif dan efisien dalam rangka menetapkan kinerja yang ingin dicapai.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD, karena itu maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah. Diperlukan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebelumnya.

1. Evaluasi atas Hasil Perhitungan Keuangan Daerah RKPD Tahun 2021

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui amanat dari RPJMD dalam menentukan kapasitas keuangan daerah serta penyesuaian yang dilakukan. Hal ini menjadi salah satu dasar penyusunan dan penentuan kapasitas keuangan daerah di Tahun Anggaran 2021. Gambaran umum evaluasi/catatan atas perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun 2021 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah
RKPD Tahun 2021 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD	Selisih Lebih/ (Kurang)	Catatan
PENDAPATAN DAERAH	1.402.456.203.000	1.223.574.330.000	(178.881.873.000)	
Pendapatan asli daerah	158.277.395.000	174.400.450.000	16.123.055.000	
Pajak daerah	13.375.350.000	15.102.635.000	1.727.285.000	Asumsi ada peningkatan penerimaan pajak

Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD	Selisih Lebih/ (Kurang)	Catatan
				penerangan jalan
Retribusi daerah	10.423.617.000	10.798.894.000	375.277.000	Asumsi ada peningkatan penerimaan retribusi usaha daerah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	7.922.379.000	5.004.500.000	(2.917.879.000)	Asumsi ada penurunan laba BUMD
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	126.556.049.000	143.494.421.000	16.938.372.000	Asumsi ada peningkatan penerimaan BLUD
Pendapatan Transfer	1.223.566.808.000	1.028.561.880.000	(195.004.928.000)	
Transfer Pemerintah Pusat	1.156.013.317.000	953.606.600.000	(202.406.717.000)	
dana Perimbangan (DTU dan DTK)	1.016.013.317.000	767.996.600.000	(248.016.717.000)	Asumsi ada penurunan DBH sesuai dengan kondisi ekonomi dan tanpa asumsi DAK
dana Insentif Daerah	20.000.000.000	56.010.000.000	36.010.000.000	Asumsi RKPD masih menggunakan asumsi pendapatan tahun sebelumnya, sedangkan dalam RPJMD menggunakan pendekatan rata-rata pertumbuhan pendapatan
dana Desa	120.000.000.000	129.600.000.000	9.600.000.000	Asumsi RKPD masih menggunakan asumsi pendapatan tahun sebelumnya, sedangkan dalam RPJMD menggunakan pendekatan rata-rata pertumbuhan pendapatan
Transfer Antar Daerah	67.553.491.000	74.955.280.000	7.401.789.000	
Pendapatan Bagi Hasil	67.553.491.000	74.955.280.000	7.401.789.000	Asumsi RKPD masih menggunakan asumsi pendapatan tahun sebelumnya, sedangkan dalam RPJMD menggunakan pendekatan rata-rata pertumbuhan pendapatan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20.612.000.000	20.612.000.000	-	

Uraian	Proyeksi RPJMD Tahun Rencana	Proyeksi RKPD	Selisih Lebih/ (Kurang)	Catatan
Hibah	20.612.000.000	20.612.000.000	-	Masih sesuai rencana dalam RPJMD
dana darurat				
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
Pembiayaan	116.386.708.000	121.904.855.000	5.518.147.000	
Penerimaan Pembiayaan	116.386.708.000	121.904.855.000	5.518.147.000	Pada saat penyusunan proyeksi penerimaan dalam RKPD mengasumsikan bahwa SiLPA meningkat sebesar 5 M
JUMLAH PROYEKSI PENERIMAAN	1.518.842.911.000	1.345.479.185.000	(173.363.726.000)	

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan 2020

Jika dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan penerimaan daerah terdapat selisih kurang sebesar Rp173.363.726.000, jika proyeksi penerimaan riil yang ditargetkan dalam RKPD dibandingkan dengan data RPJMD. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan asumsi yang dipakai dalam menyusun proyeksi penerimaan RKPD TA.2021.

Pada objek pendapatan dana Perimbangan (DTU dan DTK) terdapat selisih kurang sebesar Rp248.016.717.000. Pengurangan ini disebabkan adanya perbedaan asumsi yang dipakai. Pada saat penyusunan RPJMD, pendapatan DAU diproyeksikan tumbuh sebesar 4%. Sedangkan pada saat penyusunan RKPD mengambil asumsi disamakan dengan pagu indikatif Tahun Anggaran 2020 ditambah dengan DAU Tambahan yang diterima. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah daerah dalam menentukan target. Karena pernah terjadi alokasi DAU tetap sama dengan tahun sebelumnya, dan bahkan pernah turun pada TA.2017. Hal ini disadari pemerintah daerah, karena sebagaimana diketahui bahwa DAU penentuannya merupakan wewenang pemerintah pusat. dan sangat terkait dengan ketercapaian penerimaan pemerintah pusat dan juga kebijakan lainnya seperti penambahan daerah otonomi dan pemberian dana desa.

Selain hal di atas, Objek pendapatan dana Alokasi Khusus (DAK) pada RKPD diasumsikan nihil, sedangkan pada RPJMD diproyeksikan sebesar Rp200.000.000.000. Nilai DAK akan dimasukkan pada saat ada kepastian

nilai pendapatan DAK yang akan diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan di TA.2021. Hal ini sesuai dengan pedoman penyusunan APBD yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Dimana untuk penganggaran DAK dilakukan pada saat ada kepastian yang dituangkan dalam APBN TA.2021.

Objek pendapatan dana Insentif Daerah dalam proyeksi RKPD diasumsikan sebesar Rp56.010.000.000, sedangkan dalam RPJMD diasumsikan sebesar Rp20.000.000.000. Peningkatan ini dilakukan sesuai dengan asumsi bahwa pagu TA.2021 yang diberikan Pemerintah akan sama dengan pagu di TA.2020. Catatannya bahwa setiap rincian paket pekerjaan yang menggunakan dana ini tercatat dan terdeteksi dengan baik, sehingga dapat disesuaikan apabila pagu definitif pendapatan ini tidak sesuai dengan yang ditargetkan.

Objek penerimaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran dalam RKPD TA.2021 diproyeksikan sebesar Rp121.904.855.000. Sedangkan proyeksi dalam RPJMD sebesar Rp116.386.708.000. Terdapat selisih lebih sebesar Rp5.518.147.000. Penambahan ini sesuai dengan asumsi bahwa proyeksi dalam RKPD TA.2021 diperkirakan kurang lebih sama dengan sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD TA.2020.

2. Analisis dan Perhitungan Kapasitas Keuangan Daerah

Analisis dan perhitungan kapasitas keuangan daerah dalam RKPD dilakukan untuk mengetahui dana yang tersedia untuk menentukan pagu indikatif yang akan direncanakan. Untuk menentukan kapasitas keuangan daerah maka diperlukan beberapa data realisasi penerimaan, realisasi pengeluaran, belanja dan pengeluaran wajib daerah, asumsi-asumsi yang dipakai serta juga kontribusi setiap objek pendapatan dalam membentuk penerimaan daerah. Data tersebut kemudian dianalisis dan selanjutnya digunakan untuk membuat perhitungan kapasitas riil keuangan daerah.

A. Pertumbuhan Neraca Daerah

Untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan neraca Pemerintah kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3

Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019

Uraian	TAHUN			Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019 (<i>unaudited</i>)	
ASET	2.591.718.417.088,37	2.799.077.994.156,73	3.094.283.959.784,34	9,27
ASET LANCAR	166.736.575.305,30	238.843.524.240,32	325.464.833.378,18	39,76
Kas di Kas Daerah	117.661.189.145,10	178.797.543.275,38	249.364.637.403,69	45,71
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	10.102.300.162,00	6.526.316.906,00	22.085.611.087,00	101,51
Kas di Bendahara FKTP	1.464.623.437,00	1.460.147.783,00	1.600.857.949,75	4,67
Kas di Bendahara BOS	688.248.570,00	464.970.969,00	2.209.806.805,00	171,41
Kas Lainnya	101.852.323,00	5.537.301,00	7.103.318,00	-33,14
Setara Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	23.226.942.734,00	24.495.338.224,00	24.895.626.224,48	3,55
Piutang Lainnya	3.668.929.401,64	18.075.844.307,76	19.972.063.329,76	201,58
Penyisihan Piutang	-6.776.463.451,57	-7.648.334.245,08	-9.226.775.333,41	16,75
Beban Dibayar Di muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	16.598.952.984,13	16.666.159.719,26	14.555.902.593,91	-6,13
INVESTASI JANGKA PANJANG	87.979.007.518,10	87.979.007.518,10	87.979.007.518,10	0,00
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1.875.425.000,00	83.057.500,00	83.057.500,00	-47,79
Investasi Jangka Panjang Permanen	87.959.182.518,10	87.959.182.518,10	87.959.182.518,10	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen	-1.855.600.000,00	-63.232.500,00	-63.232.500,00	-48,30
ASET TETAP	2.326.971.482.700,97	2.455.839.984.976,31	2.664.531.245.785,06	7,02
Tanah	563.279.374.166,00	570.813.041.246	594.677.710.912,00	2,76
Peralatan dan Mesin	362.027.271.593,62	383.772.162.575	444.368.385.656,62	10,90
Gedung dan Bangunan	822.744.424.429,90	903.578.942.167	1.023.770.665.264,24	11,56
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.379.954.658.277,35	1.527.341.460.521	1.675.134.767.024,10	10,18

Uraian	TAHUN			Rata-Rata Pertumbuhan
	2017	2018	2019 (unaudited)	
Aset Tetap Lainnya	42.075.599.385,72	47.866.745.922	52.787.329.621,72	12,02
Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.964.410.900,00	4.449.078.700	7.205.188.675,00	3,30
Akumulasi Penyusutan	-853.074.256.051,62	-981.981.446.154,62	-1.133.412.801.368,62	15,27
DANA CADANGAN	8.267.656.255,00	8.267.656.255,00	8.267.656.255,00	0,00
ASET LAINNYA	1.763.695.309,00	8.147.821.167,00	8.041.216.848,00	180,33
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	3.054.061.380,11	4.116.942.830,11	4.477.642.830,11	21,78
Aset Lain-lain	2.374.335.730,00	18.251.785.093,00	18.292.630.093,00	334,47
Akumulasi amortisasi aset lainnya	-1.535.029.929,11	-1.921.818.102,11	-2.430.126.129,11	25,82
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-2.129.671.872,00	-12.299.088.654,00	-12.298.929.946,00	238,75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.591.718.417.088,37	2.269.876.834.074,36	2.565.082.799.701,97	0,29
KEWAJIBAN	13.599.301.578,00	19.382.140.916,00	26.321.238.280,00	39,16
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13.599.301.578,00	19.382.140.916,00	26.321.238.280,00	39,16
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	101.852.323,00	5.537.301,00	7.103.318,00	-33,14
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Di muka	128.398.100,00	92.173.100,00	32.323.100,00	-46,57
Utang Beban	13.217.555.276,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	151.495.879,00	19.284.430.515,00	26.281.811.862,00	6332,81
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS	2.578.119.115.510,37	2.250.494.693.158,36	2.538.761.561.421,97	0,05

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan 2020

Rata-rata pertumbuhan neraca daerah selama tiga tahun sebelumnya sebesar 9,27%. Total aset sampai dengan Tahun 2019 sebesar Rp3.094.283.959.784,34. Sementara itu kewajiban pada tahun 2019 berjumlah Rp26.321.238.280,00 yang berasal dari kewajiban jangka pendek yang harus diselesaikan segera. Ekuitas dana kumulatif di tahun 2019 sebesar Rp2.538.761.561.421,97.

B. Analisis Sumber Penerimaan Daerah

Dalam rangka mendapatkan gambaran tentang proyeksi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran 2021, maka dibuat data terkait pertumbuhan pendapatan, persentase sumber pendapatan, kinerja realisasi pendapatan dan perbandingan dengan proyeksi pada saat penyusunan RPJMD tahun rencana. Sehingga proyeksi yang disusun menjadi lebih realistis dan penuh perhitungan yang logis, analitik dan sistematis.

1) Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama tiga tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2017-2019

Uraian	REALISASI 2017	REALISASI 2018	REALISASI 2019 (UNAUDITED)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
Pendapatan	1.143.549.114.799,66	1.308.252.899.108,62	1.494.259.423.038,81	14,31
Pendapatan Asli Daerah	142.495.389.593,66	131.622.310.850,62	168.032.651.494,81	10,02
Pajak Daerah	11.313.216.077,00	12.801.054.147,00	14.412.031.504,00	12,87
Hasil Retribusi Daerah	9.799.649.224,00	12.038.952.596,00	15.116.946.827,00	24,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.920.129.530,00	7.793.951.775,00	3.149.352.464,00	-23,48
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	114.462.394.762,66	98.988.352.332,62	135.354.320.699,81	11,61
dana Perimbangan	819.334.317.451,00	944.483.236.729,00	1.057.953.649.787,00	13,64
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	147.858.503.157,00	235.167.555.906,00	280.116.030.596,00	39,08
dana Alokasi Umum	522.814.008.000,00	522.814.008.000,00	538.186.183.000,00	1,47
dana Alokasi Khusus	148.661.806.294,00	186.501.672.823,00	239.651.436.191,00	26,98
Lain-Lain Pendapatan Sah	181.719.407.755,00	232.147.351.529,00	268.273.121.757,00	21,66
Pendapatan Hibah	3.398.436.590,00	22.023.938.417,00	31.152.306.675,00	294,75
dana bagi hasil pajak dari provinsi	59.733.160.165,00	69.353.577.312,00	88.414.416.882,00	21,79
dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	118.587.811.000,00	140.769.835.800,00	148.706.398.200,00	12,17

Sumber: Bakeuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2020

Jika dilihat dari pertumbuhan pendapatan mulai Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 maka terlihat pertumbuhannya negatif 14,31%. Tren pertumbuhan positif ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Dimana pendapatan pada jenis pendapatan dana perimbangan masih merupakan faktor utama dalam menyokong pendapatan daerah.

Pada jenis pendapatan asli daerah semua objeknya mengalami pertumbuhan positif. Rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah mulai TA.2017 sampai dengan TA.2019 sebesar 10,02%. Hal ini menunjukkan tren positif atas pertumbuhan pendapatan asli daerah. Pembaharuan aturan pemungutan pendapatan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman turut memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PAD. Namun demikian terjadi penurunan rata-rata pertumbuhan pada objek pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 23,48% yang disebabkan turunnya pembagian bagi hasil laba BUMD, hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja perekonomian regional.

Pada jenis pendapatan dana perimbangan rata-rata pertumbuhannya adalah 13,64%. Pada objek pendapatan DAU tumbuh sebesar 1,47% dan DAK sebesar 26,98%. Sedangkan pada objek pendapatan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak rata-rata pertumbuhan sebesar 39,08%.

Pada jenis pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah, rata-rata pertumbuhannya adalah 21,66%. dana bagi hasil pajak dari provinsi tumbuh 21,79% dan dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus tumbuh 12,17%. Sedangkan Pendapatan Hibah tumbuh tinggi yaitu 294,75% hal ini disebabkan adanya perpindahan pencatatan dari pendapatan hibah dana BOS yang sebelumnya di PAD ke pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jika dilihat dari perkembangan kenaikan pendapatan riilnya maka terlihat bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini mengikuti perkembangan pendapatan nasional sehubungan jenis pendapatan yang berkontribusi paling besar terhadap pendapatan daerah adalah pendapatan dari dana transfer Pemerintah Pusat diikuti Lain-Lain Pendapatan Sah dan Pendapatan Asli Daerah.

2) Proporsi Pendapatan Daerah

Gambaran tentang proporsi sumber pendapatan dilakukan untuk mengetahui kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap pendapatan

keseluruhan. Melalui data ini diharapkan dapat membantu untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam rangka menyusun rencana kerja daerah.

Di bawah ini disajikan Tabel Proporsi Pendapatan Daerah selama tiga tahun sebelumnya:

Tabel 3.5
Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2017-2019

Uraian	2017 (%)	2018 (%)	2019(%)
Pendapatan	100,00	100,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	12,46	10,06	11,25
Pajak Daerah	0,99	0,98	0,96
Hasil Retribusi Daerah	0,86	0,92	1,01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,61	0,60	0,21
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	10,01	7,57	9,06
dana Perimbangan	71,65	72,19	70,80
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12,93	17,98	18,75
dana Alokasi Umum	45,72	39,96	36,02
dana Alokasi Khusus	13,00	14,26	16,04
Lain-Lain Pendapatan Sah	15,89	17,74	17,95
Pendapatan Hibah	0,30	1,68	2,08
dana bagi hasil pajak dari provinsi	5,22	5,30	5,92
dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	10,37	10,76	9,95

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan 2020

3) Kinerja Realisasi Pendapatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pendapatan daerah selama tiga tahun sebelumnya, data dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2016-2019

Uraian	2017		2018		2019	
	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja
Pendapatan	1.141.045.082.000	100,22	1.243.003.766.901	105,25	1.383.819.458.198	107,98
Pendapatan Asli Daerah	134.576.397.000	105,88	149.636.346.901	0,88	146.339.734.986	114,82
Pajak Daerah	9.566.351.000	118,26	10.509.711.000	121,80	12.811.090.600	112,50
Hasil Retribusi Daerah	10.128.023.000	96,76	12.328.088.500	97,65	16.011.492.000	94,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.920.129.000	100,00	7.004.500.000	111,27	7.004.500.000	44,96
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	107.961.894.000	106,02	119.794.047.401	82,63	110.512.652.386	122,48
dana Perimbangan	831.948.205.000	98,48	894.641.097.000	105,57	1.008.673.806.212	104,89
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	132.822.698.000	111,32	174.690.705.000	236,76	210.365.091.113	210,45
dana Alokasi Umum	532.162.390.000	98,24	522.814.008.000	100,00	539.722.183.000	99,72
dana Alokasi Khusus	166.963.117.000	89,04	197.136.384.000	94,61	258.586.532.099	92,68
Lain-Lain Pendapatan Sah	174.520.480.000	104,12	198.726.323.000	116,82	228.805.917.000	117,25
Pendapatan Hibah	4.772.859.000	71,20	1.000.000.000	2202,3	24.796.872.000	125,63
dana bagi hasil pajak dari provinsi	50.923.648.000	117,30	50.402.350.000	137,60	55.045.000.000	160,62
dana Penyesuaian dan Otsus (dana desa)	118.823.973.000	99,80	147.323.973.000	95,55	148.964.045.000	99,83

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Realisasi kinerja pendapatan merupakan ukuran kemampuan daerah dalam mencapai dan memenuhi target pendapatan. Kinerja pendapatan ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun proyeksi pendapatan daerah.

Kinerja realisasi pendapatan daerah selama tiga tahun berturut-turut mencapai 100,22% s/d 107,98%. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja realisasi pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat baik. Karena realisasinya berada dalam kisaran di atas 100% dan masih di bawah 110%. Dengan kinerja pendapatan yang selalu bisa di atas 100% maka proyeksi pengeluaran dan perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran yang bersumber dari pendapatan dapat dilakukan dengan tingkat optimisme yang tinggi. Sehingga akan meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan keuangan daerah dalam membayar kewajibannya.

4) Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun Anggaran 2021 diperkirakan turun sebesar -1,15% jika dibandingkan dengan APBD TA.2020. Dimana penurunan pertumbuhan pendapatan diproyeksikan terjadi pada kelompok dana perimbangan turun sebesar -4,79%. Adapun pada kelompok pendapatan asli daerah diproyeksikan naik sebesar 16,27%, sedangkan pada kelompok Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sama seperti tahun sebelumnya.

Berikut disajikan tabel proyeksi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2021:

Tabel 3.7
Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021

URAIAN	PROYEKSI RAPBD 2021
PENDAPATAN DAERAH	1.223.574.330.000
Pendapatan asli daerah	174.400.450.000
Pajak daerah	15.102.635.000
Retribusi daerah	10.798.894.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.004.500.000
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	143.494.421.000
dana perimbangan	767.994.535.000
dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	221.003.214.000
dana alokasi umum	546.991.321.000
dana alokasi khusus	
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	281.177.280.000
Hibah	20.612.000.000
dana darurat	0
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	74.955.280.000
dana Desa	129.600.000.000
DID	56.010.000.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.904.855.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2020	121.904.855.000

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Data proyeksi yang dikonversi sesuai dengan format Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3.8
Proyeksi Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021

Uraian	PROYEKSI RAPBD 2021
PENDAPATAN DAERAH	1.223.574.330.000
Pendapatan asli daerah	174.400.450.000
Pajak daerah	15.102.635.000
Retribusi daerah	10.798.894.000
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.004.500.000
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	143.494.421.000
Pendapatan Transfer	1.028.561.880.000
Transfer Pemerintah Pusat	953.606.600.000
dana Perimbangan (DTU dan DTK)	767.996.600.000
dana Insentif Daerah	56.010.000.000
dana Otonomi Khusus	-
dana Keistimewaan	-
dana Desa	129.600.000.000
Transfer Antar Daerah	74.955.280.000
Pendapatan Bagi Hasil	74.955.280.000
Bantuan Keuangan	-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	20.612.000.000
Hibah	20.612.000.000
dana darurat	
Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	121.904.855.000
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2020	121.904.855.000

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan 2020

dana Perimbangan (DTU dan DTK) turun sebesar -4,7% dibandingkan dengan tahun anggaran 2020. Penurunan ini disebabkan tidak dianggarkannya penerimaan DAK. Hal ini sesuai dengan ketentuan perundangan yang menyatakan bahwa alokasi DAK dapat dianggarkan jika sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau ada informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Pada kelompok pendapatan asli daerah, proyeksi pendapatan meningkat sebesar 16,27%. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan realisasi pendapatan

pada TA.2018 dan TA.2019. Terutama terkait jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang memang realisasinya pada TA.2019 meningkat cukup banyak jika dibandingkan dengan realisasi TA.2018. Hal ini terutama terkait dengan Objek Pendapatan BLUD yaitu Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah diproyeksikan tidak mengalami perubahan. Hal ini dengan asumsi bahwa Pemerintah Pusat tidak mengubah kebijakan dalam penentuan alokasi dana hibah (dana BOS). Selain itu ini juga merupakan bentuk kehati-hatian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memproyeksikan pendapatan sehubungan dengan belum membaiknya perekonomian dunia dan nasional yang berimbas pada perekonomian regional sehingga diperkirakan akan menekan anggaran Pemerintah Pusat.

Proyeksi penerimaan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah sebesar Rp121.904.855.000. Proyeksi ini memperhitungkan hampir seluruh sumber penerimaan daerah, kecuali pendapatan dana Alokasi Khusus yang secara aturan diharuskan menunggu pagu definitif dari pemerintah pusat.

Dalam rangka pencapaian target kinerja pendapatan daerah, maka dilaksanakan beberapa strategi di bidang pendapatan daerah yaitu:

1. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi secara selektif dan tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi masyarakat.
2. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Penyesuaian dana perimbangan dari dana Alokasi Khusus dan bagi hasil pajak/bukan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan dana perimbangan dari pusat dan bantuan keuangan dari provinsi.
5. Peningkatan dana penyesuaian dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, seperti dana untuk desa dan dana untuk kelurahan.
6. Peningkatan kerja sama dengan pihak swasta dalam rangka peningkatan peran serta dan mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
7. Optimalisasi kinerja penerimaan dari masing-masing SKPD penghasil PAD.
8. Evaluasi pengelolaan pendapatan daerah yang berkesinambungan.

C. Analisis dan Perhitungan Pengeluaran Wajib Daerah

Sebelum menghitung proyeksi pengeluaran wajib daerah, berikut rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah selama tiga tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tren pertumbuhan belanja yang wajib disediakan daerah. Di bawah ini disajikan tabel rata-rata pertumbuhan realisasi belanja tidak langsung daerah.

Tabel 3.9
Rata Rata Pertumbuhan Belanja Yang Mengikat
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017-2019

Uraian	2017	2018	2019 (Unaudited)	Rata-Rata Pertumbuhan
Belanja Tidak Langsung	679.929.055.257,00	671.177.910.324,00	706.488.030.704,75	1,99
Belanja Gaji	445.081.857.551,00	448.529.453.146,00	469.525.586.606,75	2,73
Belanja Subsidi	3.945.384.000,00	0,00	0,00	0,00
Hibah	22.108.510.000,00	23.305.513.986,00	18.177.883.000,00	-8,29
Bantuan Sosial	28.895.189.400,00	20.010.902.500,00	18.693.355.000,00	-18,67
Bagi Hasil kepada Pemdes	1.962.372.000,00	2.284.000.000,00	2.840.000.000,00	20,37
Bantuan Keuangan kepada Pemdes dan Parpol	177.935.742.306,00	176.962.925.292,00	197.251.206.098,00	5,46
Belanja Tidak Terduga	0,00	85.115.400,00	0,00	0,00

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan 2020

Berikut disajikan tabel proyeksi perhitungan Kebutuhan Belanja Yang Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Tabel 3.10
Proyeksi Penghitungan Kebutuhan Belanja Yang Mengikat
dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2021

URAIAN	PROYEKSI RAPBD 2021
Belanja Tidak Langsung	671.185.460.000
Belanja pegawai	427.706.595.000
Belanja hibah	9.000.000.000
Belanja bantuan social	21.250.000.000
Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.628.865.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	205.600.000.000
Belanja tidak terduga	5.000.000.000
Pengeluaran pembiayaan	5.000.000.000
Pembentukan dana cadangan	5.000.000.000
JUMLAH PENGELUARAN WAJIB	676.185.460.000

Sumber : Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Jika dibanding dengan Tahun Anggaran 2020, belanja pegawai diproyeksikan turun sebesar -18,17%. Belanja pegawai ini diproyeksikan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020 serta memperhitungkan access yang disiapkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan jabatan serta penerimaan dan pensiun Aparatur Sipil Negara. Penurunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan realisasi belanja pegawai.

Hibah yang terus menerus setiap tahun pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar 9 Milyar Rupiah. Hibah ini diperuntukkan untuk membantu persiapan Porprov. Selain itu juga digunakan untuk Belanja Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk lembaga pendidikan non pemerintah, hibah untuk organisasi-organisasi yang rutin diberikan setiap tahun dan hibah untuk partai politik.

Bantuan sosial diproyeksikan sebesar 21,25 Milyar Rupiah. Anggaran ini diperuntukkan bagi program-program pemerintah daerah dalam membuat jaring pengaman sosial. Seperti program rumah sejahtera, beasiswa untuk siswa tidak mampu, lansia, janda veteran dan lainnya.

dana bagi hasil untuk pemerintah desa dialokasikan sebesar 2,63 milyar rupiah. Anggaran ini diperhitungkan dari alokasi pendapatan pajak daerah dan retribusi sebesar kurang lebih 10%.

Bantuan keuangan diproyeksikan sebesar 205,6 milyar rupiah. Anggaran ini bersumber dari dana desa dari pemerintah pusat, alokasi dana desa dari APBD dan bantuan keuangan untuk partai politik.

Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar 5 milyar rupiah. Anggaran ini disiapkan untuk pengeluaran daerah dalam keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar 5 milyar rupiah. Anggaran ini diperuntukkan mengisi dana cadangan sebagai persiapan pengeluaran daerah untuk Pemilu serentak pada tahun 2024.

D. Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Berdasarkan uraian sebelumnya, telah dijelaskan berbagai hal terkait proyeksi penerimaan dan pengeluaran yang diperlukan sebelum belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga dapat dirangkum dalam tabel yang menggambarkan

kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Pendapatan	1.223.574.330.000
Perkiraan SiLPA	121.904.855.000
Total Penerimaan	1.345.479.185.000
Dikurangi:	
Belanja Mengikat (Belanja Pegawai, Hibah Uang, Bantuan Sosial Uang, DBH Pajak dan Retribusi untuk desa, ADD, dana Desa, Belanja Tidak Terduga)	671.185.460.000
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000
Total Pengeluaran yang Mengikat	676.185.460.000
Kapasitas Riil Keuangan Daerah	669.293.725.000

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Proyeksi pengeluaran daerah dapat dirangkum sebagaimana di bawah ini:

Tabel 3.12
Proyeksi Anggaran Pengeluaran Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Uraian	Proyeksi RKPD
Belanja Daerah	1.345.479.185.000
Belanja Operasi	844.688.320.000
Belanja modal	282.562.000.000
Belanja tidak terduga	5.000.000.000
Belanja transfer	208.228.865.000
Pembiayaan dana Cadangan Pilkada	5.000.000.000

Sumber: Bakeuda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Jumlah pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.345.479.185.000. Jumlah ini terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp1.223.574.330.000 dan penerimaan pembiayaan SiLPA sebesar Rp121.904.855.000.

Jumlah pengeluaran belanja yang mengikat dan pengeluaran pembiayaan yang diperlukan sebesar Rp676.185.460.000. Jumlah ini terdiri

dari belanja yang mengikat sebesar Rp671.185.460.000 dan pengeluaran pembiayaan untuk dana cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00.

Berdasarkan penghitungan penerimaan dengan pengeluaran wajib yang diperlukan maka didapatkan kapasitas riil keuangan daerah yang tersedia untuk belanja operasi dan belanja modal yang terkait dengan pencapaian kinerja pembangunan daerah sebesar Rp. 669.293.725.000,00

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang memuat visi **“Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”**. dan dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam periode 5 tahun dijabarkan ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang terintegrasi, sinkron dan sinergis dengan pembangunan provinsi dan nasional serta dinamikanya.

Selanjutnya tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
NO	Sasaran	Strategi 1: Membangun generasi yang handal melalui jaminan akses layanan dasar dan pengembangan pendidikan kejuruan yang berorientasi pada potensi daerah	
		Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	a. Memberikan jaminan akan akses dan kualitas Pendidikan bagi seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar 3. Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat
		b. Membangun kerja sama dan kemitraan pengembangan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Budaya Baca 2. Program Peningkatan Akses Perpustakaan 3. Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	a. Memberikan jaminan akan akses dan kualitas Kesehatan bagi seluruh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perbaikan Gizi masyarakat 2. Program Peningkatan Kesehatan ibu hamil bersalin, nifas, dan anak 3. Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan 4. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 5. Program Promosi kesehatan 6. Program Pengendalian dan pencegahan penyakit 7. Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 8. Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit 9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)

		b. Membangun kerja sama dan kemitraan pengembangan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 2. Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan 3. Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya
--	--	--	--

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 1 : Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya			
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
		Strategi 2: Pengarusutamaan Budaya berbasis penguatan modal sosial untuk kesadaran hukum, ketenteraman dan ketertiban umum, dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan politik daerah	
		Arah Kebijakan	Program
3	Tercukupinya Ketersediaan pangan yang beragam dan aman	a. Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial dan kesiapsiagaan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penguatan Cadangan Pangan Pemda dan Masyarakat 2. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan 3. Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan
4	Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	a. Penguatan kapasitas kelompok masyarakat, komunitas dan tokoh-tokoh agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat 3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar 4. Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5. Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan 6. Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih 7. Program Lingkungan Perumahan dan Permukiman Sehat
5	Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	a. Penegakan hukum dan pencegahan konflik sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 2. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 3. Program Penegakan Peraturan Daerah 4. Program Peningkatan Keluarga Sejahtera

	b. Meningkatkan kapasitas pengendalian dan pengawasan sosial budaya dan kesiapsiagaan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat 2. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana 3. Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana 4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
--	---	---

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal			
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan			
Strategi 3: Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata			
NO	Sasaran	Arah Kebijakan	Program
6	Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah	a. Peningkatan kemudahan usaha melalui stimulasi penguatan sektor pertanian, UMKM dan Ekonomi Kreatif	1. Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka		2. Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sektor unggulan		3. Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja
			4. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			5. Program Peningkatan Mutu Produk Industri
			6. Program Pengembangan Sentra Industri
			7. Program Peningkatan usaha sektor perdagangan
			8. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
			9. Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan
			10. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan
			11. Program Peningkatan Produksi Perkebunan
			12. Program Peningkatan Produksi Hortikultura

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 2 : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal			
Tujuan 2 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan			
NO	Sasaran	Strategi 3: Penciptaan Inklusivitas pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan berbasis Pariwisata	
		Arah Kebijakan	Program
			<ul style="list-style-type: none"> 13. Program Peningkatan Populasi Ternak 14. Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak 15. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 16. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 17. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 18. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian 19. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 20. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap 21. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan
9	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	a. Penguatan <i>database</i> objek pajak melalui pemutakhiran data dan pemberian insentif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan dana Perimbangan 2. Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB
10	Meningkatnya investasi PMDN	a. Penguatan investasi dalam negeri, serta pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema <i>Public Private Partnership</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Realisasi Investasi 2. Program Penguatan Iklim Investasi
11	Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan kebudayaan bagi masyarakat	a. Pengembangan perencanaan terintegratif terhadap potensi pariwisata, industri olahan dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3. Program Pengembangan Kemitraan 4. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya
		b. Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Koperasi

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian			
Tujuan 3 : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas			
NO	Sasaran	Strategi 4: Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian melalui kemitraan (<i>partnership</i>) pembiayaan pembangunan	
		Arah Kebijakan	Program
12	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	a. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur ekonomi untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 3. Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan danau 6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 7. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Lainnya 8. Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase
		b. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur sosial untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik 3. Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
		a. Menegakkan pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penataan dan Penguasaan Tanah 2. Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi : Mengoptimalkan Sumber Daya Daerah, Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan			
Tujuan 4 : Meningkatkan sumber daya daerah dan kualitas lingkungan hidup dalam menjamin pembangunan berkelanjutan			
NO	Sasaran	Strategi 5: Mengurangi kesenjangan yang berorientasi pada <i>pro-equity, pro-job, pro-growth, pro-environment</i> melalui penguatan interkoneksi spasial	
		Arah Kebijakan	Program
13	Meningkatnya kapasitas pemberdayaan kelompok masyarakat	a. Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan 3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4. Program Peningkatan Prestasi dan Pemasarakatan
14	Meningkatnya pemberdayaan responsif gender dan perlindungan terhadap anak	a. Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 2. Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan 3. Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 4. Program Peningkatan Pelindungan Anak
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a. Menjamin pemerataan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat

Misi 5 : Menghadirkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

NO	Sasaran	Strategi 6: Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	
		Arah Kebijakan	Program
16	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	a. Mengkaji, merumuskan kembali SOTK, tupoksi organisasi dan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah sehingga mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah 2. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur 4. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran RSUD Daha Sejahtera 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD Daha Sejahtera 7. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 9. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 10. Program Peningkatan Pelayanan Perijinan 11. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik 12. Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan 13. Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan 14. Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil 15. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 16. Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah

			<ul style="list-style-type: none"> 17. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 20. Program Peningkatan Pelayanan Perundang -Undangan dan Hubungan Masyarakat 21. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan 22. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 23. Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan 24. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati 25. Program Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah 26. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 27. Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan 28. Program Implementasi Kerja sama Pemerintahan Daerah 29. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 30. Program Pengendalian Pembangunan Daerah 31. Program Evaluasi Pembangunan Daerah 32. Program Perencanaan Pembangunan Sektoral 33. Program Penelitian dan Pengembangan 34. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
17	Meningkatnya kinerja keuangan dan kinerja birokrasi	a. Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah 2. Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 3. Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah 5. Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan peraturan daerah efisien. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2. Program Pembinaan Disiplin Aparatur 3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 4. Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 5 : Menghadirkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis			
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
NO	Sasaran	Strategi 7: Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi pada sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil	
		Arah Kebijakan	Program
18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi pembangunan yang berorientasi pada hasil 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Informasi dan Media Massa
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> c. Memfasilitasi dan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa 2. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 5 : Menghadirkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis			
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
NO	Sasaran	Strategi 8 : Mengembangkan sistem pembiayaan terpadu yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat	
		Arah Kebijakan	Program
19	Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan	a.Peningkatan penggunaan instrumen pembiayaan non-konvensional	4.1 Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah (Pada Setda Kab. HSS)

Sumber : RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan dengan menyesuaikan arah kebijakan, yang telah disusun dalam kerangka strategis pembangunan jangka menengah daerah, agar program yang dirumuskan merupakan salah satu elemen dalam pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah serta untuk meningkatkan rasa tanggung jawab untuk pencapaian kinerja program oleh Perangkat Daerah.

1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2021

Sejak awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi *Novel Corona virus-2019* (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan di Indonesia secara meluas ke hampir setiap wilayah, sehingga berakibat terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2021 akan difokuskan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar, yaitu yang terkait dengan sektor-sektor industri, pariwisata dan investasi. Juga direncanakan untuk melakukan peningkatan sistem kesehatan nasional, memperkuat sistem ketahanan pangan nasional, membangun sistem perlindungan sosial secara terpadu, serta lebih mengefektifkan sistem ketahanan bencana, untuk bencana alam maupun bukan alam. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2020

maka tema RKP 2021, **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**.

dan fokus pembangunan nasional pada RKP Tahun 2021 adalah :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi;
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial; dan
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Tema RKP 2021	Prioritas Nasional (PN)	
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial	PN 1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
	PN 2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
	PN 3	Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
	PN 4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
	PN 5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
	PN 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
	PN 7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Sumber : Bappenas/Kemen PPN RI Tahun 2020 (diolah)

Penekanan Prioritas Nasional tahun 2021 terletak pada PN1, PN3, PN5 dan PN 6.

2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Prov. Kalsel Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 setelah dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator makro pembangunan daerah tahun 2019-2020 mengakibatkan adanya perubahan target indikator makro tahun 2021.

Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 yaitu, **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Menuju Gerbang Ibu Kota**

Negara”. Dengan meletakan fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 pada :

1. IKM/UMKM;
2. Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata, dan Pertanian; dan
3. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan.

Tabel 4.3
Tema RKPD dan Prioritas Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2021

Tema RKPD 2021	Prioritas Nasional (PN)	
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Menuju Gerbang Ibu Kota Negara	PD 1	Transformasi Struktur Ekonomi Ke Sektor Industri, Pertanian dan Pariwisata
	PD 2	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
	PD 3	Memperkuat Sarana dan Prasarana Dasar Perekonomian
	PD 4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
	PD 5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Memperkuat Ketahanan Bencana

Sumber : Bappeda Prov. Kalsel Tahun 2020 (diolah)

3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan

daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip- prinsip SPM yaitu sederhana, konkret, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang.

Oleh karenanya perlu dilakukan perumusan permasalahan dan analisis isu strategis terhadap tujuan dan sasaran pembangunan di Daerah. Hal ini untuk menjamin konsistensi serta sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, yang melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) kabupaten, provinsi, dan nasional dalam proses perumusannya.

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi daerah, masalah pokok dipecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran strategis.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diberdayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang

yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa permasalahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan 5 (lima) tahun.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah :

1. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif ;
2. Belum Optimalnya Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Belum Optimalnya Infrastruktur Ekonomi Sosial Yang Berkualitas;
4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih; dan
5. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu-isu strategis yang tersebut dapat dideskripsikan seperti uraian berikut ini.

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif ;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Sosial Yang Berkualitas;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih; dan
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, regional dan daerah. Oleh karena itu tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional. Perspektif selama 5 tahun ke depan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018–2023 didasarkan pada kondisi objektif saat ini dan masa lalu dan diprediksi ke depan. Prediksi dilakukan terhadap indikator - indikator pembangunan yang bersifat makro. Perspektif Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk lima tahun ke depan dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Tema Pembangunan RKPD Tahun 2021 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023, “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Pertanian dan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Ekonomi Kreatif”.

Namun adanya dampak pandemi COVID-19 pada wilayah Negara Republik Indonesia secara keseluruhan, dari wilayah perkotaan sampai wilayah perdesaan. Mempengaruhi pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat hingga daerah dengan kebijakan *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Beberapa program dan kegiatan mengalami perlambatan pencapaian target terutama pembangunan sarana dan prasarana publik, infrastruktur wilayah, industri dan UKM, ketenagakerjaan, dll.

Dalam rangka penyesuaian terhadap hasil evaluasi pencapaian target pembangunan maka perlu dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah tahun berkenaan untuk mengetahui tingkat kesenjangan capaian terhadap target tahunan perangkat daerah dan kaitannya terhadap capaian indikator pembangunan daerah (indikator makro). Dari Analisis tersebut diperoleh permasalahan pembangunan dan faktor pendorong serta penghambatnya. Kemudian di dalam kerangka strategi dan arah kebijakan RPJMD yang menjadi ajuan dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2021.

Perubahan tema RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021, menjadi **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial, Sektor Unggulan Pertanian, Pariwisata Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Ekonomi Kreatif”**.

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 akan difokuskan pada :

1. Usaha Mikro/Kecil dan Industri Kecil;
2. Investasi Hilirisasi Industri, Pariwisata, dan Pertanian; dan
3. Kesehatan, Pendidikan, dan Keterampilan.

Tabel 4.4

Tema Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

TEMA PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN (PD)
Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Sektor Unggulan Pertanian, Pariwisata Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Ekonomi Kreatif	PD 1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Inklusif
	PD 2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
	PD 3. Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi Sosial yang Berkualitas
	PD 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
	PD 5 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 (diolah)

Asumsi pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan pada tahun 2021 pada kategori lapangan usaha :

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Adanya Peningkatan permintaan akibat konsumsi dan adanya Strategi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan untuk lahan batang banyu adanya strategi SERASI.

2. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Karena Keperluan bahan makanan tetap (khususnya makanan/kebutuhan Pokok) dan kembalinya kegiatan normal kembali.

3. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Adanya peningkatan akses RSUD H. Hasan Basry dan RSUD Daha Sejahtera serta adanya BPJS Kesehatan Semesta, adanya perlindungan dan jaminan sosial daerah.

4. Industri Pengolahan

Karena banyaknya permintaan industri kecil dan ekonomi kreatif seiring dengan normalnya kembali kegiatan pariwisata.

5. Pengadaan Listrik dan Gas

Karena kehidupan *new normal* yang mengakibatkan banyak bekerja dari rumah sehingga meningkat konsumsi listrik dan gas.

6. Pengadaan Air

Banyak cuci, mandi, dll. (pola hidup bersih)

7. Informasi dan Komunikasi

Peningkatan perdagangan (E-KRAF) dan promosi via *online* dan kebiasaan *meeting via online*

8. Jasa Perusahaan

Akan tetap mengalami peningkatan karena kehidupan berjalan normal kembali

Sektor pendorong pertumbuhan ekonomi untuk asumsi pertumbuhan ekonomi melalui 8 (delapan) kategori lapangan usaha di atas, dipengaruhi oleh :

1. Transportasi dan Pergudangan

Peningkatan transportasi akibat kembali di bukanya tempat pariwisata dan normalnya kembali angkutan tambang, meningkatnya belanja online memerlukan jasa kurir.

2. Jasa keuangan

Mulai tumbuhnya dan kembalinya usaha sehingga pembayaran kewajiban dll akan lebih lancar. Stimulus dan modal usaha bagi UMK.

3. Administrasi Pemerintahan

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Aktivitas di pemerintahan di asumsikan kembali normal seperti sebelum Covid-19

4. Jasa Pendidikan

Kondisi normal dengan kembalinya lembaga- pendidikan keterampilan serta terjadi peningkatan dimana kebijakan pemda, memprioritaskan peningkatan SDM.

5. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Dampak dari normalnya aktivitas masyarakat, pariwisata, dan pemerintahan

6. Jasa Lainnya, normalnya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat melalui masyarakat produktif dan aman covid.

Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diperkirakan juga mengalami tekanan dari :

1. Pertambangan dan Penggalian

Dipengaruhi oleh masih berlanjutnya *deep cleaning* migas serta adanya koreksi pada harga batu bara.

2. Konstruksi

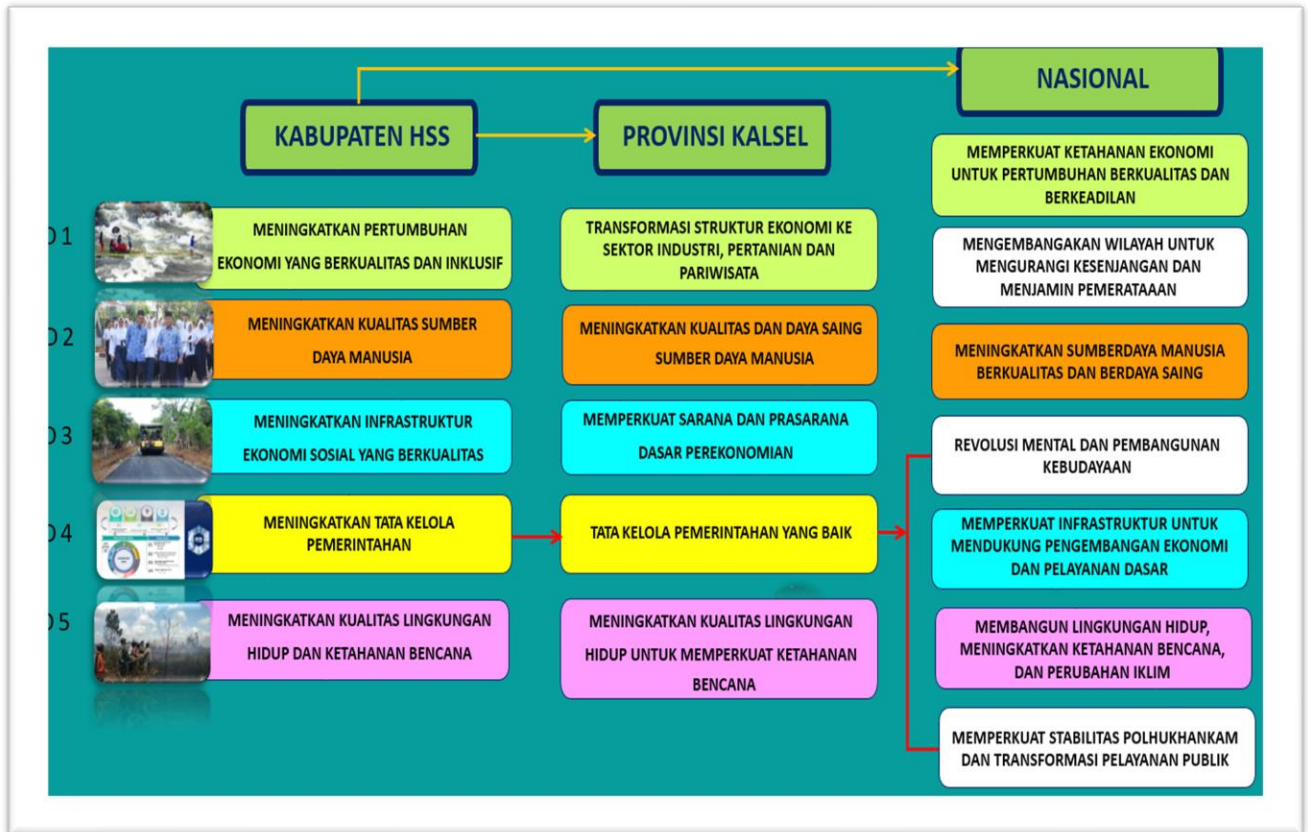
Penurunan akibat realokasi dana dari proyek fisik fokus ke penanggulangan Covid-19.

3. Real Estate

Karena masih fokus mengutamakan pengeluaran untuk bahan pokok dan Kesehatan.

Sebagai satu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, maka dalam menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 dirumuskan dengan sepenuhnya menyinkronkan terhadap Prioritas Nasional dan Prioritas Pembangunan Prov. Kalsel tahun 2021. Sinkronisasi prioritas pembangunan daerah terhadap pembangunan nasional ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan dapat dicapai melalui pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Gambar 4.1
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kab. Hulu Sungai Selatan Th. 2021



Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Berikut disajikan tabel Sinkronisasi Program RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 yang mendukung Prioritas Daerah:

Tabel 4.5 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Yang Mendukung Prioritas Daerah

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB	
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		2	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		3	Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan
		4	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan
		5	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		6	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		7	Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah	Dinas Pendidikan

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Menengah Pertama	
		8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
		9 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
		10 Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan
		11 Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan
		12 Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit	Dinas Kesehatan
		13 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		14 Program Promosi kesehatan	Dinas Kesehatan
		15 Program Pengendalian dan pencegahan penyakit	Dinas Kesehatan
		16 Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
		17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	RSUD Hasan Basry
		18 Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan	RSUD Hasan Basry
		19 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	RSUD Hasan Basry
		20 Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial
		21 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Dinas PPKBPPPA
		22 Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Dinas PPKBPPPA
		23 Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Dinas PPKBPPPA
		24 Program Peningkatan Pelindungan Anak	Dinas PPKBPPPA
		25 Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Dinas PPKBPPPA

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD		OPD PENANGGUNG JAWAB
		26	Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas PPKBPPPA
		27	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Porapar
		28	Program Peningkatan Prestasi dan Per masyarakatan Olahraga	Dinas Porapar
		29	Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		30	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD, Diklat
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	1	Program Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP
		2	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satpol PP
		3	Program Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		4	Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Dinas Dukcapil
		5	Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
		6	Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	Dinas Dukcapil
		7	Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		8	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Kominfo
		9	Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	Dinas Kominfo
		10	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Dinas PMPTSP
		11	Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	Dinas Kominfo
		12	Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua SKPD
		14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Semua SKPD
		15	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Semua SKPD

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		16 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Semua SKPD
		17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Inspektorat dan Sekretariat DPRD
		18 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Semua Kecamatan
		19 Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
		20 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat
		21 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat
		22 Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD
		23 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD
		24 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
		25 Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah
		26 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah
		27 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
		28 Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	Sekretariat Daerah
		29 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah
		30 Program Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah	Sekretariat Daerah
		31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Sekretariat Daerah

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pengadaan Barang/Jasa 32 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan 33 Program Implementasi Kerja sama Pemerintahan Daerah 34 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 36 Program Evaluasi Pembangunan Daerah 37 Program Perencanaan Pembangunan Sektoral 38 Program Penelitian dan Pengembangan 39 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan dana Perimbangan 40 Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB 41 Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah 42 Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah 43 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah 44 Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah 45 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik 46 Program Pembinaan Disiplin Aparatur 47 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Bappelitbangda Bappelitbangda Bappelitbangda Bappelitbangda Bakeuda Bakeuda Bakeuda Bakeuda Bakeuda Bakeuda BPB, Kesbangpol BKD, Diklat BKD, Diklat
3	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas dan Inklusif	1 Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3 Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		4 Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKP
		5 Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Nakerkop, UKP
		6 Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		7 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas PMD
		8 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Dinas PMD
		9 Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Dinas Nakerkop, UKP
		10 Program Peningkatan Realisasi Investasi	Dinas PMPTSP
		11 Program Penguatan Iklim Investasi	Dinas PMPTSP
		12 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan
		13 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		14 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		15 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Dinas Perikanan
		17 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Porapar
		18 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Porapar
		19 Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Porapar
		20 Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Pertanian
		21 Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Dinas Pertanian
		22 Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Dinas Pertanian
		23 Program Peningkatan Populasi Ternak	Dinas Pertanian
		24 Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	Dinas Pertanian

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		25 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian
		26 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian
		27 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		28 Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	Dinas Perdagangan
		29 Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Perdagangan
		30 Program Peningkatan Mutu Produk Industri	Dinas Nakerkop, UKP
		31 Program Pengembangan Sentra Industri	Dinas Nakerkop, UKP
4	Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Yang Berkualitas	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUTR
		2 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Lainnya	Dinas PUTR
		3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUTR
		4 Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Dinas PUTR
		5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Dinas PUTR
		6 Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Dinas PUTR
		7 Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Dinas PUTR
		8 Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Dinas PUTR
		9 Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas PUTR
		10 Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Dispera, KPLH
		11 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Dispera, KPLH
		12 Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		13 Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Dispera, KPLH
		14 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan

NO.	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD		OPD PENANGGUNG JAWAB
		15	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan danau	Dinas Perhubungan
		16	Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dispera, KPLH
		2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	Dispera, KPLH
		3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		4	Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	BPB, Kesbangpol

Sumber: Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan, 2020

Selanjutnya kami sajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Yang Mendukung Prioritas Provinsi:

Tabel 4.6 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Yang Mendukung Prioritas Provinsi

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD		OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian, dan Pariwisata	1	Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial
		2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		3	Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial
		4	Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKP
		5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Dinas Nakerkop, UKP
		6	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		7	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas PMD
		8	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Dinas PMD
		9	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Dinas Nakerkop, UKP

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		10 Program Peningkatan Realisasi Investasi	Dinas PMPTSP
		11 Program Penguatan Iklim Investasi	Dinas PMPTSP
		12 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan
		13 Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
		14 Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
		15 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Dinas Perikanan
		17 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Porapar
		18 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Porapar
		19 Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Porapar
		20 Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Pertanian
		21 Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Dinas Pertanian
		22 Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Dinas Pertanian
		23 Program Peningkatan Populasi Ternak	Dinas Pertanian
		24 Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	Dinas Pertanian
		25 Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian
		26 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian
		27 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
		28 Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	Dinas Perdagangan
		29 Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Perdagangan
		30 Program Peningkatan Mutu Produk Industri	Dinas Nakerkop, UKP
		31 Program Pengembangan Sentra Industri	Dinas Nakerkop, UKP
2	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber	1 Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Daya Manusia	2 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan
		3 Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan
		4 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat	Dinas Pendidikan
		5 Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		6 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan
		7 Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
		8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan
		9 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga	Dinas Kesehatan
		10 Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan
		11 Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan	Dinas Kesehatan
		12 Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit	Dinas Kesehatan
		13 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		14 Program Promosi kesehatan	Dinas Kesehatan
		15 Program Pengendalian dan pencegahan penyakit	Dinas Kesehatan
		16 Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya	Dinas Kesehatan
		17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD)	RSUD Hasan Basry
		18 Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan	RSUD Hasan Basry
		19 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik	RSUD Hasan Basry
		20 Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Dinas Sosial
		21 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Dinas PPKBPPPA
		22 Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan	Dinas PPKBPPPA

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		23 Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 24 Program Peningkatan Pelindungan Anak 25 Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 26 Program Peningkatan Keluarga Sejahtera 27 Program peningkatan peran serta kepemudaan 28 Program Peningkatan Prestasi dan Permasalahan Olahraga 29 Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan 30 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Dinas PPKBPPPA Dinas PPKBPPPA Dinas PPKBPPPA Dinas PPKBPPPA Dinas Porapar Dinas Porapar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan BKD, Diklat
3	Memperkuat Sarana dan Prasarana Perekonomian	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 2 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Lainnya 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 4 Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan 5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik 6 Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih 7 Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase 8 Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang 9 Program Pembinaan Jasa Konstruksi 10 Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat 11 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 12 Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan 13 Program Penataan dan Penguasaan Tanah 14 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dinas PUTR Dispera, KPLH Dispera, KPLH Dinas Ketahanan Pangan Dispera, KPLH Dinas Perhubungan

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		15 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan danau	Dinas Perhubungan
		16 Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan
4	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	1 Program Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP
		2 Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satpol PP
		3 Program Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
		4 Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Dinas Dukcapil
		5 Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
		6 Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	Dinas Dukcapil
		7 Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Dinas PMD
		8 Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Kominfo
		9 Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	Dinas Kominfo
		10 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Dinas PMPTSP
		11 Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	Dinas Kominfo
		12 Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua SKPD
		14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Semua SKPD
		15 Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Semua SKPD
		16 Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Semua SKPD
		17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Inspektorat dan Sekretariat DPRD
		18 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Semua Kecamatan
		19 Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		20 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat
		21 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat
		22 Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD
		23 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD
		24 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
		25 Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah
		26 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah
		27 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
		28 Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	Sekretariat Daerah
		29 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah
		30 Program Pelayanan Keprotokolanan dan Kehumasan Pimpinan Daerah	Sekretariat Daerah
		31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
		32 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	Sekretariat Daerah
		33 Program Implementasi Kerja sama Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
		34 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		35 Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		36 Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		37 Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	Bappelitbangda
		38 Program Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda
		39 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD dan dana Perimbangan	Bakeuda

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		40 Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Bakeuda
		41 Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Bakeuda
		42 Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Bakeuda
		43 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Bakeuda
		44 Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bakeuda
		45 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	BPB, Kesbangpol
		46 Program Pembinaan Disiplin Aparatur	BKD, Diklat
		47 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	BKD, Diklat
5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Memperkuat Ketahanan Bencana	1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Dispera, KPLH
		2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	Dispera, KPLH
		3 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		4 Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	BPB, Kesbangpol

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

Selanjutnya kami sajikan tabel Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 yang mendukung Prioritas Nasional:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Program RKPD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Yang Mendukung Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1 Program Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial
		2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Dinas Sosial
		3 Program Perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Dinas Sosial
		4 Program Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Nakerkop, UKP
		5 Program Peningkatan	Dinas Nakerkop, UKP

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Kesempatan Kerja	
6		Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
7		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Dinas PMD
8		Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Dinas PMD
9		Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Dinas Nakerkop, UKP
10		Program Peningkatan Realisasi Investasi	Dinas PMPTSP
11		Program Penguatan Iklim Investasi	Dinas PMPTSP
12		Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan
13		Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
14		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
15		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
16		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Ikan	Dinas Perikanan
17		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Porapar
18		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Porapar
19		Program Pengembangan Kemitraan	Dinas Porapar
20		Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Pertanian
21		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Dinas Pertanian
22		Program Peningkatan Produksi Hortikultura	Dinas Pertanian
23		Program Peningkatan Populasi Ternak	Dinas Pertanian
24		Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Ternak	Dinas Pertanian
25		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Dinas Pertanian
26		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian
27		Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
28		Program Peningkatan usaha sektor perdagangan	Dinas Perdagangan
29		Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Dinas Perdagangan
30		Program Peningkatan Mutu Produk Industri	Dinas Nakerkop, UKP
31		Program Pengembangan Sentra Industri	Dinas Nakerkop, UKP
32		Program Ketersediaan dan	Dinas Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Distribusi Pangan	
2	Meningkatkan Sumber daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Program Peningkatan Akses Pendidikan Anak Usia Dini 2 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini 3 Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat 4 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat 5 Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Dasar 6 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar 7 Program Peningkatan Akses Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 8 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 9 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 10 Program peningkatan akses sarana dan prasarana kesehatan 11 Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan 12 Program Peningkatan kualitas layanan rumah sakit 13 Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 14 Program Promosi kesehatan 15 Program Pengendalian dan pencegahan penyakit 16 Program Peningkatan Kualitas Layanan Puskesmas dan Jaringannya 17 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (BLUD) 18 Program Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Layanan 19 Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Penunjang Medik/Non Medik 20 Program Peningkatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 21 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 22 Program Peningkatan Perlindungan hak Perempuan 23 Program Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak 24 Program Peningkatan	Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan RSUD Hasan Basry RSUD Hasan Basry RSUD Hasan Basry Dinas Sosial Dinas PPKBPPPA Dinas PPKBPPPA Dinas PPKBPPPA Dinas PPKBPPPA

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Pelindungan Anak	
25		Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Dinas PPKBPPPA
26		Program Peningkatan Keluarga Sejahtera	Dinas PPKBPPPA
27		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Dinas Porapar
28		Program Peningkatan Prestasi dan Perasyarakatan Olahraga	Dinas Porapar
29		Program Peningkatan Mutu dan Akses Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
30		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	BKD, Diklat
31		Program Penegakan Peraturan Daerah	Satpol PP
32		Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Satpol PP
33		Program Penanganan Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP
34		Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Dinas Dukcapil
35		Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil	Dinas Dukcapil
36		Program Pelayanan Informasi Data Kependudukan	Dinas Dukcapil
37		Program Pembinaan dan Pelayanan Pemerintahan Desa	Dinas PMD
38		Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Dinas Kominfo
39		Program Pelayanan Informasi dan Media Massa	Dinas Kominfo
40		Program Peningkatan Pelayanan Perijinan	Dinas PMPTSP
41		Program Pelayanan Statistik dan Sandi Daerah	Dinas Kominfo
42		Program Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
43		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Semua SKPD
44		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Semua SKPD
45		Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Semua SKPD
46		Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Semua SKPD
47		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Inspektorat dan Sekretariat DPRD
48		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Semua Kecamatan

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		49 Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Inspektorat
		50 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Inspektorat
		51 Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Inspektorat
		52 Program Peningkatan Pelayanan Perundang-Undangan dan Hubungan Masyarakat	Sekretariat DPRD
		53 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Penganggaran dan Pengawasan	Sekretariat DPRD
		54 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
		55 Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan	Sekretariat Daerah
		56 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Sekretariat Daerah
		57 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
		58 Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	Sekretariat Daerah
		59 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Sekretariat Daerah
		60 Program Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah	Sekretariat Daerah
		61 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Sekretariat Daerah
		62 Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	Sekretariat Daerah
		63 Program Implementasi Kerja sama Pemerintahan Daerah	Sekretariat Daerah
		64 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		65 Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		66 Program Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
		67 Program Perencanaan Pembangunan Sektoral	Bappelitbangda
		68 Program Penelitian dan Pengembangan	Bappelitbangda
		69 Program Peningkatan dan	Bakeuda

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD	OPD PENANGGUNG JAWAB
		70 Pengembangan Pengelolaan PAD dan dana Perimbangan	Bakeuda
		71 Program Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB	Bakeuda
		72 Program Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah	Bakeuda
		73 Program Pengelolaan Adm. dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Bakeuda
		74 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah	Bakeuda
		75 Program Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Bakeuda
		76 Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik	BPB, Kesbangpol
		77 Program Pembinaan Disiplin Aparatur	BKD, Diklat
		Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	BKD, Diklat
3	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas PUTR
		2 Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Lainnya	Dinas PUTR
		3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas PUTR
		4 Program Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Dinas PUTR
		5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Publik	Dinas PUTR
		6 Program Peningkatan Akses dan Mutu Air Bersih	Dinas PUTR
		7 Program Pengelolaan Air Limbah dan Drainase	Dinas PUTR
		8 Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	Dinas PUTR
		9 Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Dinas PUTR
		10 Program Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Sehat	Dispera, KPLH
		11 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Dispera, KPLH
		12 Program Penataan dan Penguasaan Tanah	Dispera, KPLH
		13 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan
		14 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Sungai dan danau	Dinas Perhubungan
		15 Program Peningkatan sarana dan jaringan distribusi perdagangan	Dinas Perdagangan
4	Membangun	1 Program Pengembangan	Dispera, KPLH

NO	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM PD		OPD PENANGGUNG JAWAB
	Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	2	Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Areal Pemakaman	Dispera, KPLH
		3	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dispera, KPLH
		4	Program Penanganan Tanggap Darurat Pasca Bencana	BPB, Kesbangpol

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2020

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Tahun 2021 merupakan ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023, juga menjadi tahun kedua dari RPJMN 2020-2024. Pembangunan pada tahun 2021 dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya mewujudkan tema **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Sektor Unggulan Pertanian, Pariwisata Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Ekonomi Kreatif.”**

Pada bab ini secara eksplisit menguraikan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

Program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021 mengacu dengan RKPD. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD pada tahun direncanakan.

Sehingga perlu untuk mengetahui tingkat konsistensi antara program RPJMD dengan Program pada RKPD. Perumusan konsistensi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang juga berpedoman dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Gambaran konsistensi program pembangunan RPJMD dan RKPD dapat dilihat pada lampiran RKPD ini.

Uraian lengkap pagu indikatif yang direncanakan akan digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif RKPD untuk dana Pembangunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

NO	URAI OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
1	Dinas Pendidikan	12	47	274.467.205.541,00
2	Dinas Kesehatan	12	51	142.395.390.616,00
3	RSUD Brigjend H. Hasan Basry	5	8	175.497.746.995,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12	28	113.897.667.775,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	9	26	45.547.265.516,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7	16	10.423.997.147,00
7	Dinas Sosial	7	18	41.182.856.550,00
8	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil, dan Perindustrian	9	22	7.476.932.866,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	9	19	8.066.655.400,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	6	16	7.196.522.197,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	15	5.313.808.725,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7	17	4.877.595.800,00
13	Dinas Perhubungan	6	17	6.844.963.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	16	13.231.391.200,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	16	7.267.334.525,00
16	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	8	22	18.000.734.990,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	16	5.359.700.100,00

NO	URAI OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
18	Dinas Perikanan	8	21	7.399.131.600,00
19	Dinas Pertanian	11	29	25.173.545.500,00
20	Dinas Perdagangan	6	17	9.929.402.500,00
21	Kecamatan Sungai Raya	4	19	3.185.584.700,00
22	Kecamatan Padang Batung	4	18	3.668.004.160,00
23	Kecamatan Telaga Langsat	4	17	3.118.817.250,00
24	Kecamatan Angkinang	4	19	4.195.826.000,00
25	Kecamatan Kandangan	4	29	14.245.363.900,00
26	Kecamatan Simpur	4	19	4.416.900.500,00
27	Kecamatan Daha Selatan	4	19	3.588.905.520,00
28	Kecamatan Daha Utara	4	18	3.351.705.000,00
29	Kecamatan Kalumpang	4	19	3.381.693.020,00
30	Kecamatan Loksado	4	17	3.048.569.100,00
31	Kecamatan Daha Barat	4	18	2.718.029.600,00
32	Inspektorat	7	22	10.032.215.000,00
33	Sekretariat DPRD	6	24	37.749.754.425,00
34	Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan	1	3	713.369.500,00
35	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan	1	3	1.479.177.500,00
36	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat	1	3	10.512.393.750,00
37	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1	3	887.024.000,00

NO	URAI OPD	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH PAGU
38	Sekretariat Daerah Bagian Protokol dan Kehumasan	1	3	2.204.880.000,00
39	Sekretariat Daerah Bagian Umum	3	11	9.850.851.230,00
40	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	3	3	718.993.972,00
41	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Tata Usaha	4	10	19.547.093.940,00
42	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	8	23	6.451.319.700,00
43	Badan Keuangan Daerah	9	31	245.206.378.400,00
44	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik	6	18	6.389.328.800,00
45	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	7	21	15.267.157.490,00
JUMLAH		259	826	1.345.479.185.000,00

Sumber : Bappelitbangda Kab. Hulu Sungai Selatan 2020

Data nama program, kegiatan, pagu indikatif serta Perangkat Daerah penanggung jawab dapat dilihat pada lampiran RKPD ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan tentang Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021, pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2021

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. IPM = (akar pangkat 3 dari (Indeks kesehatan x Indeks pendidikan x Indeks pengeluaran)) x 100 $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$	68,41	68,80	70,03	71,08
		2. Harapan Lama Sekolah	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ I = Indeks HLS = Harapan Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	12,07	12,10	12,48	13,08
		3. Rata-rata Lama Sekolah	$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ I = Indeks RLS = Rata-Rata Lama Sekolah min = angka minimal maks = angka maksimum	7,72	7,74	8,17	8,33
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	4. Angka Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu. $\frac{\text{penjumlahan usia yang meninggal tahun itu}}{\text{jumlah orang yang meninggal tahun itu}} \times 100\%$	65,59	65,82	66,03	66,54
3	Tercukupinya Ketersediaan Pangan yang Beragam dan Aman	5. PPH Ketersediaan	Skor PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) disajikan angka rata-rata jumlah jenis Bahan Makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk per kapita per tahun dalam kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada kurun waktu tertentu.	83,77	84,61	85,46	86,31

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
4	Meningkatnya Pelayanan Dasar bagi Masyarakat	6. Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	$\frac{\sum \text{Jumlah SPM yang terpenuhi}}{\sum \text{SPM perangkat daerah di Kab. HSS}} \times 100\%$	52,00	57,00	61,00	67,00
5	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah	7. Tingkat Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan)	5,14	5,33	5,63	5,40
		8. Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ <p>Dimana : Pi = Persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi = Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika :</p>	0,317	0,288	0,280	0,275
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	9. Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\sum \text{Penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\sum \text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100$	2,43	2,56	2,81	2,53
7	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	10. Laju Pertumbuhan Ekonomi	<p>Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang tertentu</p> $\frac{\text{PDRB}(t) - \text{PDRB}(t - 1)}{\text{PDRB}(t - 1)} \times 100\%$ <p>ket : t = tahun berjalan t-1 = tahun sebelumnya tahun t</p>	6,14	5,32	5,45	5,96

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
		11. Laju pertumbuhan ekonomi kategori industri pengolahan	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori industri pengolahan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pengolahan tahun (N-1)}} \times 100\%$	4,55	3,97	3,82	4,61
		12. Laju pertumbuhan ekonomi kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun N)} - \sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun T)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (tahun T)}} \times 100\%$	4,84	4,96	4,73	5,35
		13. Laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan	$\frac{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun N} - \sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}}{\sum \text{Nilai tambah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun (N-1)}} \times 100\%$	2,06	2,97	2,97	4,97
8	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14. Persentase Peningkatan Retribusi dan Pajak Daerah	S Retribusi dan Pajak Daerah Thn N	21,1 milyar	29,93 milyar	24 milyar	25 milyar
9	Meningkatnya investasi PMDN	15. Persentase Peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	$\frac{\sum \text{nilai PMDN Tahun N} - \sum \text{nilai PMDN Tahun (N-1)}}{\sum \text{nilai PMDN Tahun (N-1)}} \times 100\%$	3,00	9,80	5,00	5,50
10	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Kebudayaan bagi	16. Tingkat Pengeluaran Wisatawan (<i>Spending of Money</i>)	Dihitung berdasarkan akumulasi jumlah pengeluaran wisatawan untuk konsumsi akhir dan transfer sosial bekerja sama dengan dinas / instansi / <i>stakeholders</i> terkait dan perhitungan akhir yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Kab. HSS	3.223.750.000	4.758.098.000	5.374.026.000	5.687.744.000

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
	Masyarakat						
11	Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas	17.	Persentase Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang berkualitas $\frac{\text{Jumlah infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas}}{100\%} \times \text{infrastruktur ekonomi dan sosial yang dibutuhkan}$	71,35	67,49	51,00	50,38
		18.	Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam $\frac{\sum \text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{total jumlah panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$	74,50	64,03	63,60	64,75
		19.	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi $\frac{\sum \text{ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam}}{\sum \text{ketersediaan air irigasi seluruh hektar}} \times 100\%$	85,00	55,85	65,60	67,35
		20.	Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana Publik $\frac{\sum \text{Sarana dan prasarana publik yang terbangun}}{\sum \text{sarana dan prasarana publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	14,00	23,80	48	67
		21.	Persentase Kecukupan RTH Publik $\frac{\sum \text{RTH publik yang terbangun}}{\sum \text{RTH publik yang dibutuhkan}} \times 100\%$	24,83	24,84	24,85	24,86
		22.	Persentase perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkualitas Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas x 100%	40,66	50,85	59,98	67,43
12	Meningkatnya Kapasitas Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	23.	Indeks Desa Membangun (IDM) $\text{IDM} = \frac{\sum \text{IDM se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$ IDM = rata-rata Indeks Desa Membangun Kab.HSS $\text{IDM} = \frac{\sum \text{IDM se Kab.HSS}}{\sum \text{Desa se Kab.HSS}}$	0,62	0,65	0,66	0,67

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
13	Meningkatnya Pemberdayaan Responsif Gender dan Perlindungan terhadap Anak	24. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPG : 1) Umur panjang dan sehat: 1. indikator angka harapan hidup perempuan 2. indeks dimensi : indeks harapan hidup perempuan 3. indeks sebaran merata : indeks / harapan hidup dengan sebaran merata	89,96	89,21	90,58	90,81
			2) Pengetahuan: 1. indikator AMH perempuan, MYS perempuan 2. Indeks dimensi : indeks pendidikan perempuan 3. Indeks sebaran merata : indeks pendidikan dengan sebaran merata				
			3) Kehidupan yang layak : 1. Indikator perkiraan pendapatan perempuan 2. Indeks dimensi : indeks pendapatan perempuan 3. Indeks sebaran merata : indeks dengan pendapatan sebaran merata				
		25. Persentase Desa/ Kelurahan Layak Anak	$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah desa/kelurahan yang ada}} \times 100$	0,68	2,03	3,38	4,73
14	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH dibentuk oleh komponen IKU + IKA + IKTL * IKU = Indeks Kualitas Udara * IKA = Indeks Kualitas Air * IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,94	55,96	59,53	61,28
15	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas Pelayanan Publik	27. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	63,88	64,66	72	78
		28. Predikat AKIP	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan	BB	BB	BB	A

No	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Target Kinerja Tahun 2020	Target Kinerja Tahun 2021
			kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%				
		29. Kategori Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari 6 aspek penilaian yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, Sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.	B	B	A	A
16	Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi	30. Opini WTP BPK terhadap LKPD	Hasil Audit BPK RI yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, penyajian laporan keuangan, meminimalkan penyimpangan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, penguatan dan pengendalian internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	WTP	WTP	WTP	WTP
		31. Indeks profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN merupakan salah satu cara mengukur profesionalisme ASN. Pengukuran dihitung dari data-data : SAPK, E-PUPNS, Sistem Informasi Kepegawaian, Daftar Gaji dan Tunjangan ASN, sasaran kerja pegawai dan pegawai yang terkena hukuman.	49,04	58,00	73,17	74,42
17	Meningkatnya Penggunaan Sistem Informasi Daerah	32. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dengan baik	$\frac{\sum \text{Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik}}{\sum \text{Perangkat daerah Se – Kab. HSS}} \times 100\%$	7,89	21,05	39,47	65,79
		33. Persentase pemerintah desa yang menggunakan teknologi informasi dalam pemberian layanan	$\frac{\sum \text{Desa yang menggunakan aplikasi TI}}{\sum \text{Desa Se – Kab. HSS}} \times 100\%$	0,60	9,03	15,97	23,61

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan (diolah)

BAB VII

PENUTUP

RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 ini menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan), serta berfungsi sebagai :

- a. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021; dan
- b. Pedoman dalam rangka Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 untuk :

- a. Menyusun rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021; dan
- b. Sebagai bahan untuk menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah;
- b. Pagu dana yang tertera dalam RKPD masih bersifat indikatif;
- c. Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya;

- e. Kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- f. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.

